

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**  
**Nomor : Kep / 415 / XI /2019**

Tentang

**RENCANA STRATEGIS  
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2020 – 2024**

---

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Polda Sultra Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003, tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004, tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005, tentang Grand Strategi Polri tahun 2005 – 2025.

MEMUTUSKAN . . . . .

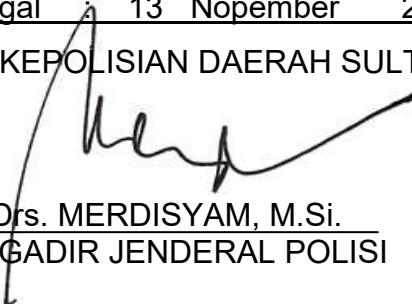
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Rencana Strategis Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Renstra Polda Sultra) tahun 2020-2024 sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Rencana Strategis Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dimaksud, berlaku untuk seluruh jajaran Polda Sultra, untuk dijadikan pedoman penyusunan Renstra Satker jajaran Polda Sultra;
3. Rencana Strategis Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara agar dapat menjadi dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Satker jajaran Polda Sultra;
4. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
pada tanggal : 13 Nopember 2019

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULTRA

  
Drs. MERDISYAM, M.Si.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Distribusi A, B dan C Polda Sultra

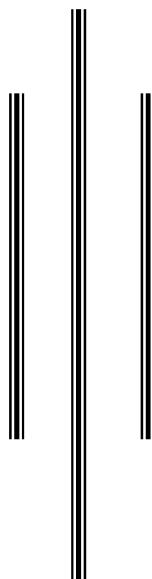
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI TENGGARA

---



**RENCANA STRATEGIS  
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2020-2024**

---



**Kendari, 13 Nopember 2019**

BAB I	PENDAHULUAN	
1.	Kondisi Umum .....	1
2.	Potensi dan Permasalahan .....	2
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
1.	Visi .....	39
2.	Misi .....	40
3.	Tujuan .....	41
4.	Sasaran Strategis .....	41
5.	Keterkaitan Sasaran <i>Impact</i> .....	41
6.	Penahapan Kebijakan .....	42
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
1.	Arah Kebijakan dan Strategi Polri .....	43
2.	Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sultra .....	51
3.	Kerangka Regulasi Polda Sultra .....	57
4.	Kerangka Kelembagaan Polda Sultra .....	59
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
1.	Target Kinerja .....	61
2.	Kerangka Pendanaan .....	69
BAB V	PENUTUP	
1.	Kaedah Pelaksanaan .....	76
2.	Autentifikasi dan Distribusi .....	76

**RENCANA STRATEGIS  
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2020-2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Kondisi Umum**

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.

Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Sebagai .....

Sebagai alat negara, Polri dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polri juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya, Renstra Polri ini menjadi acuan penyusunan Renja Polri dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polri serta kemudian diturunkan oleh segenap Satker Polri ke Renstra Satkernya masing-masing.

Polda Sultra sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal menyusun dokumen perencanaan mengacu pada Renstra Polri dengan menjabarkan arah kebijakan dan stragis Polri sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Polri 2020-2024.

## **2. Potensi dan permasalahan**

### **a. potensi gangguan keamanan**

#### **1) Perkembangan aspek kehidupan**

##### **a) Nasional**

###### **(1) Kondisi geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam.**

Kondisi geografis, demografi dan sumber daya alam, merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional.

Keberhasilan mengelola faktor-faktor tersebut akan menjadikan peluang dan kekuatan dalam menunjang kepentingan nasional. Kegagalan dalam pengelolaan faktor-faktor tersebut akan menjadi kendala dan ancaman.

**(2) Ideologi .....**

## (2) Ideologi

- (a) penganut faham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan "kebebasan" tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila;
- (b) peran utama perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia antara lain membangun aliansi melalui perkawinan, mencetak generasi radikal masa depan, menyiapkan anak menjadi generasi radikal melalui *home schooling*, menanamkan paham radikal pada anggota keluarga, mengelola forum percakapan dan pesan daring untuk perekrutan dan pernikahan, mengumpulkan dan mengelola dana baik untuk aksi terorisme atau dukungan bagi keluarga teroris;
- (c) kelompok penganut komunisme memanfaatkan organisasi massa dan LSM tertentu yang sepaham dengan ajaran komunisme berupaya mengangkat isu pelanggaran HAM untuk mencabut Ketetapan MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966, sehingga ajaran komunisme dapat hidup kembali di Indonesia, lebih dikenal dengan gerakan neo-komunisme (komunisme gaya baru);
- (d) penyebaran paham radikal juga terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan. Penyebaran paham radikal di dalam Lapas dan rumah tahanan terjadi karena sistem manajemen Lapas dan rumah tahanan yang belum optimal. Hal ini diperparah dengan kondisi Lapas

dan .....

dan rumah tahanan yang melebihi kapasitas dan tidak adanya pemisahan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya.

### (3) Politik

- a) pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi suasana euphoria demokrasi, sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) penerapan kebijakan otonomi daerah berdampak terhadap melemahnya pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Provinsi terhadap penyelenggaraan kewenangan di Kabupaten/Kota yang seharusnya memiliki kewenangan kuat dan mengikat terhadap pembinaan, pengawasan, perizinan, standar dan sertifikasi di kabupaten/kota dalam satu provinsi, menjadi tidak memiliki daya untuk menjadi koordinator pengembangan wilayah di semua bidang. Rencana Strategis dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) pemerintah kabupaten/kota kadang tidak sejalan atau bertentangan dengan Renstra pemerintah provinsi;
- (c) berkaitan dengan hubungan politik pusat dan daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung melalui mekanisme partai melahirkan dua permasalahan. Ada perbedaan pandangan bahwa kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah atau kepala daerah sebagai wakil masyarakat yang dipilih melalui mekanisme partai.

Jika terjadi konflik kepentingan antara partai pendukung presiden dengan partai pendukung kepala daerah, belum jelas garis kebijakan manakah yang akan diikuti oleh kepala daerah tersebut;

- (d) pemekaran wilayah di berbagai daerah menimbulkan permasalahan karena proses pembentukannya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh masyarakat di daerah tersebut dengan mencari dukungan dari berbagai pihak, baik di daerah maupun di pusat. Dalam banyak kasus, pemekaran daerah tidak dilakukan melalui rencana yang matang dan mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip pembentukan daerah otonomi seperti batas wilayah, partisipasi rakyat dan sumber daya;
- (e) persoalan kebangsaan merupakan salah satu isu terkini yang harus diperhatikan dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, rasa dan kondisi kebangsaan Indonesia semakin terancam ditandai oleh lunturnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta menguatnya fenomena intoleransi, eksklusivisme, radikalisme, dan terorisme. Tahun 2017, Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang kemudian secara kelembagaan berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2018. BPIP bersama kementerian/lembaga terkait akan menyusun arah kebijakan dan strategi pembinaan ideologi Pancasila, serta sinkronisasi program/kegiatan wawasan kebangsaan bagi seluruh warga negara.

#### (4) Ekonomi

- (a) Kondisi perekonomian nasional hingga tahun 2020-2024 masih dipengaruhi tekanan ekonomi global ditandai taraf hidup rakyat Indonesia belum sejahtera menyeluruh, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran masih tinggi, sementara reformasi ekonomi belum pulih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
- (b) berbagai persoalan ekonomi yang masih terjadi dapat melemahkan ketahanan ekonomi dan pangan nasional. Pembangunan infrastruktur sedang giat dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi namun masih dalam proses dan belum dapat dirasakan manfaatnya secara merata sehingga kesenjangan sosial masih dirasakan terjadi antardaerah, antara perkotaan dan perdesaan di kawasan Barat dan Timur Indonesia, sehingga gejolak sosial masih terjadi di masyarakat;
- (c) secara umum, situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2020-2024 diperkirakan masih dalam kondisi membaik, namun jika dikaitkan dengan situasi kerawanan stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024 mendatang, serta dampak situasi konflik global persaingan negara-negara internasional dan stabilitas kawasan dapat mempengaruhi terjadinya sentimen pasar modal, melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya kemampuan investasi nasional mempengaruhi terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

(5) Sosial ....

## (5) Sosial Budaya

- (a) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk membangun bangsa. Namun demikian pada sisi lain, keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang dapat menjadi pemicu desintegrasi bangsa;
- (b) kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan norma-norma agama yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
- (c) berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antarpemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya gejala .....

gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama.

#### **(6) Keamanan**

- (a) berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup membanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspada karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas, antara lain terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara dan Indonesia juga rentan menerima gangguan keamanan dari aktor non-pemerintah seperti terorisme, penyelundupan Narkoba hingga tindak pidana perairan. Pemerintah terus berupaya memerangi ancaman-ancaman tersebut;
- (b) lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta terbatasnya kerja sama internasional menjadikan Indonesia sebagai lahan subur tumbuhnya kejahatan transnasional. Di samping itu, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengancam kedaulatan negara, seperti yang ada di Papua, merupakan isu yang menonjol di tingkat nasional. Perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung kemajuan Iptek terutama dalam bidang komunikasi dan

informasi .....

informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional seperti peredaran Narkoba dan terorisme sulit untuk ditangani;

- (c) sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru. Kerja sama mereka dengan kelompok ekstrim di Filipina, seperti Abu Sayyaf dan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*. Sementara itu, kelompok Jamaah Islamiyah (JI) khususnya dari elemen eks Afganistan sedang mengalami perpecahan bersamaan dengan menurunnya kredibilitas Abu Bakar Baasyir di kalangan JI karena dinilai tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya;
- (d) secara umum peringkat dan skor Indonesia dalam *Global Terrorism Index (GT/)* tahun 2014-2017 terus membaik seiring dengan upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, saat ini penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui media sosial dan pesan instan. Sedangkan lima alat propaganda yang diidentifikasi paling sering digunakan di media sosial yaitu melalui video, forum diskusi (*chat rooms*), situs *web* (*websites*), gambar (*images*), dan tautan *web*, *retweets*, *likes* dan *hashtags*. Pada bulan Juli 2014, melalui media daring, ISIS meluncurkan video propaganda di Indonesia yang mengajak umat muslim Indonesia untuk memberikan kontribusi sumbangan, baik fisik ataupun keuangan untuk ISIS. Video propaganda

tersebut .....

tersebut diunggah, dibagikan, dan tersebar melalui media sosial dan pesan instan. Menurut perkembangannya, penyebaran paham radikal telah menyasar kelompok anak-anak dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekitar 40 perempuan dan 100 anak Indonesia di bawah umur 15 tahun telah menyebrang ke Suriah;

- (e) potensi gangguan Kamtibmas di calon Ibu Kota Negara baru dengan penduduk setempat terkait isu legalitas kepemilikan tanah dan resistensi masyarakat setempat terhadap pendatang.

**b) Wilayah Sulawesi Tenggara**

**(1) Geografi.**

Berdasarkan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kedudukan perairan Sultra berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang menghubungkan antara Samudra Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda menuju Timor Leste dan Benua Australia melalui Laut Banda pada wilayah Sultra bagian Timur serta perairan Sultra yang juga merupakan jalur nasional sekunder menjadi salah satu alternatif pelabuhan hubungan internasional komoditas berskala ekspor. Akan ramai dilewati oleh lalu lintas kapal-kapal dari kawasan Asia Tenggara kondisi tersebut rentan terhadap:

- (a) dijadikan jalur lintas/transit penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang hendak mencari suaka di Australia;
- (b) penyelundupan barang (bahan tambang, hasil hutan, hasil pertanian, perkebunan dll);
- (c) penangkapan ikan di perairan Sultra secara ilegal;
- (d) masuknya.....

- (d) masuknya pelaku teror dari Mindanau Selatan dan barang terlarang (Senpi, Handak dan Narkoba);
- (e) masuknya kapal asing yang berasal dari luar kawasan Asean secara ilegal.

Beberapa wilayah yaitu Kab. Konawe Utara berbatasan langsung dengan daerah rawan terorisme yaitu Sulawesi Tengah (Poso) yang saat ini lagi melaksanakan operasi perburuan pelaku teror (Tinombala), sehingga Provinsi Sultra berpotensi sebagai tempat pelarian/persembunyian pelaku teror dan penyebaran paham radikal untuk membentuk sel-sel jaringan baru.

Wilayah Provinsi Sultra terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim dengan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah tertentu berpotensi menimbulkan ancaman banjir dan tanah longsor, sementara pada musim kemarau yang berkepanjangan berpotensi pada terjadinya bencana kekeringan dan kebakaran hutan/laahan. Perkiraan terjadi anomali cuaca yang ekstrem akan kembali berlangsung di tahun 2020 s.d. tahun 2024 yang menyebabkan badai siklon tropis “Cendana” dan “Dahlia” yang menyebabkan terjadinya bencana hydrometeorologi (bencana alam yang disebabkan faktor cuaca) seperti angin puting beliung.

Selain itu wilayah Provinsi Sultra merupakan daerah kepulauan yang masih mengandalkan transportasi laut dalam mobilisasi masyarakat. Pada musim tertentu yaitu musim angin barat dan angin timur, wilayah laut /perairan Sultra memiliki gelombang laut yang cukup tinggi mencapai 3 hingga 6 Meter rawan terjadi di Perairan

Wakatobi, Laut Banda Timur Sultra, Perairan Manui Kendari dan Teluk Bone. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerawanan terjadinya kecelakaan laut khususnya pada daerah-daerah kepulauan.

Kondisi geografis wilayah Indonesia masuk dalam *Ring of Fire Pacific* (sabuk api Pasifik) dikelilingi oleh lempengan bumi antara lain lempeng Pasifik lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Sultra juga tidak terlepas dari ancaman bencana gempa bumi Tektonik yang disebabkan karena pergeseran, patahan atau tumbukan lempengan kerak bumi, yang apabila terjadi di wilayah perairan berpotensi menyebabkan Tsunami.

Beberapa wilayah Sultra memiliki sungai-sungai yaitu Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Buton Utara dan Kab. Buton yang dimanfaatkan oleh masyarakat pedalaman/pedesaan sebagai jalur transportasi air, namun dalam perkembangannya dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan khususnya *illegal logging* dengan mengangsur kayu melalui sungai dengan cara dijadikan rakit.

## (2) Demografi.

(a) dengan jumlah penduduk yang besar, perkembangan jumlah penduduk yang cepat, penyebaran dan kepadatan yang tidak merata serta tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terhadap terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan dengan dimensi yang kompleks dan luas, antara lain meningkatnya premanisme, gelandangan dan pengemis, WTS, *street crime*;

(b) periode.....

- (b) periode tahun 2012 s.d. 2045 Indonesia akan memperoleh bonus demografi begitu pula di Sultra, mengingat jumlah usia produktif mengalami peningkatan. Kondisi ini merupakan suatu peluang sekaligus dapat menjadi ancaman ketika usia produktif tersebut tidak memperoleh kesempatan lapangan pekerjaan yang layak, terlebih dengan perkembangan globalisasi mengakibatkan ketatnya persaingan kerja, bahkan beberapa negara mengalami kegagalan dalam mengoptimalkan bonus demografi oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya secara optimal;
- (c) penyebaran penduduk di wilayah daerah tertentu masyarakat pendatang lebih dominan atau cenderung seimbang dengan tingkat kesejahteraan antara masyarakat pendatang tidak seimbang maka sangat berpotensi terjadinya kecemburuan sosial yang dapat berujung pada terjadinya konflik horizontal berlatar belakang SARA;
- (d) keberagaman budaya, etnis, agama dan suku disatu sisi merupakan aset bangsa, namun dapat dijadikan celah oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan provokasi untuk memicu munculnya konflik komunal bernuansa SARA.

**(3) Sumber Daya Alam.**

Kondisi sumber daya alam di Provinsi Sultra selain merupakan potensi bagi pemasukan devisa negara dan daerah serta peningkatan perekonomian rakyat, apabila tidak dikelola dan diamankan dengan baik, juga merupakan potensi kerawanan, berupa:

- (a) terjadinya.....

- (a) terjadinya eksplorasi secara ilegal, baik berupa *illegal logging*, *illegal mining* dan *illegal fishing* yang dapat merugikan kekayaan negara serta menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
- (b) penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menimbulkan kerugian negara;
- (c) kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam;
- (d) persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal;
- (e) akan menjadi incaran negara asing untuk melakukan investasi/pengolahan, berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga akan berimplikasi pada situasi dalam negeri.

**(4) Ideologi.**

- (a) bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi, berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme gaya baru, Syariat Islam dan ideologi lain) dalam bentuk pertemuan terbuka maupun memanfaatkan kemajuan teknologi internet, media sosial dan media massa. Kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal;
- (b) rongrongan terhadap ideologi Pancasila bersumber dari pemikiran luar (barat maupun timur) yang dibawa dan disebarluaskan oleh warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini disalahgunakan sebagai alat propaganda untuk

mempengaruhi/ merubah pola pikir masyarakat Indonesia menjadi individualistik, feodal, hedonisme, vandalisme atau menerima LGBT sebagai penghargaan terhadap HAM. Kondisi tersebut dapat menjadi sumber muncul perpecahan di masyarakat yang dapat berujung pada terjadinya aksi persekusi;

- (c) tantangan ke depan khususnya terhadap generasi muda dan kelompok usia pertengahan akan pengaruh masuknya budaya/pemikiran dari luar maupun dalam negeri yang bersifat negatif melalui penafsiran yang keliru terhadap paham keagamaan, kesukuan dan golongan yang berdampak pada menguatnya politik identitas yang akan mengancam kebhinekaan.

**(5) Sosial Politik.**

- (a) terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan sistem politik pemerintahan masih rawan terjadi di wilayah Sultra, antara lain:
- (1)) terjadinya tarik menarik kepentingan politik dalam lembaga legislatif;
  - (2)) terjadinya manuver politik yang berdampak pada perebutan kekuasaan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan korup dalam penentuan kebijakan legislasi regulasi pemerintah;
  - (3)) korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan;
  - (4)) terjadinya pelanggaran kewenangan dan etika publik akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi.

(b) Pilkada .....

- (b) Pilkada serentak tahun 2020 merupakan proses pemilihan terakhir menuju pemilihan serentak nasional tahun 2024, persaingan kontestan akan semakin sengit karena diprediksi kontestan akan diramaikan oleh kepala daerah incumbent dari wilayah lain yang masih dalam satu ikatan garis primordial. Pilkada 2020 wilayah Sultra akan diikuti oleh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2015 yaitu Kab. Buton Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe Utara, Wakatobi dan Kab Muna. Adapun jadwal pemungutan suara akan dilaksanakan pada bulan September 2020. Beberapa masalah krusial yang berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkada antara lain:
- (1)) persaingan dalam proses penjaringan calon kepala daerah melalui internal partai politik berpotensi menimbulkan dualisme dukungan Parpol;
  - (2)) pemanfaatan media sosial baik untuk menggalang dukungan masyarakat maupun untuk pembunuhan karakter Paslon lain melalui hoax, ujaran kebencian dan fitnah;
  - (3)) proses dan mekanisme lelang pengadaan dan distribusi logistik kebutuhan Pilkada yang tidak transparan, berpotensi terjadinya penyalahgunaan keuangan Negara;
  - (4)) kurang profesionalnya KPUD dan Panwas selaku penyelenggara dan pengawas pelaksanaan Pilkada serta dilain pihak mendukung salah satu pasangan calon/tidak independen;
  - (5)) kecurangan .....

- (5)) kecurangan pelaksanaan kampanye dengan cara mencuri start, *money politik*, penggunaan fasilitas pemerintah dan terjadinya *black campaign*;
- (6)) potensi terjadinya kesalahan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada akan kembali terjadi disebabkan karena kualitas SDM individu penyelenggara yang berbeda dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya serta kualitas keperibadian yang mempengaruhi integritas penyelenggara;
- (7)) sikap tidak menerima hasil Pilkada yang sering ditunjukkan oleh pasangan calon yang kalah dengan menggerakkan massa pendukung dengan melakukan tindakan anarkis;
- (8)) pelibatan PNS sebagai tim sukses salah satu pasangan calon serta adanya oknum TNI/Polri yang tidak netral/mendukung salah satu pasangan calon.
- (c) potensi disharmonisasi hubungan antara kepala dilatar belakangi oleh persaingan jelang kontestasi Pilkada 2020, akibat tumpang tindih kewenangan atau karena pembagian peran/kewenangan yang dianggap tidak adil antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program kegiatan pemerintah bahkan terabaikannya aspirasi masyarakat;
- (d) efektifitas pemerintahan daerah yang akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah pada tahun 2022, 2023 hingga 2024 akan menjadi salah satu persoalan .....

persoalan mengingat kewenangannya yang terbatas sehingga dapat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan dan investasi di daerah. Keterbatasan tersebut juga berpotensi pada keluarnya keputusan dari pejabat kepala daerah yang akan dianggap melampaui kewenangan/penyalahgunaan wewenang, seperti persoalan mutasi pegawai, pembatalan perizinan atau perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

- (e) kompleksitas akan dihadapi oleh penyelenggara, pemilih dan partai politik dalam proses penyelenggara Pemilu serentak tahun 2024. Tantangan yang akan kembali dihadapi antara lain terkait banyaknya surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih di TPS, persoalan beban tugas KPPS yang berat akan menimbulkan kelelahan bahkan kembali berpotensi menelan korban jiwa, persoalan politik identitas, hoax, ujaran kebencian dan propaganda yang mengadu domba masyarakat;
- (f) tantangan terhadap proses penyelenggaraan Pilkada serentak nasional tahun 2024 akan semakin berat mengingat hanya terpaut sekitar tujuh bulan dengan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 pada April 2024, daerah-daerah kemudian akan melaksanakan pemungutan suara Pilkada serentak pada bulan November 2024. Residu permasalahan Pemilu 2024 akan berpengaruh terhadap kelancaran proses penyelenggaraan Pilkada 2024, disisi lain tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang beririsan dengan tahapan Pilkada 2024 akan memecah konsentrasi penyelenggara, peserta atau

Paslon maupun masyarakat, sehingga potensi kecurangan dalam tahapan Pilkada maupun Pemilu 2024 seperti pemanfaatan birokrasi, *money politik*, permasalahan SDM penyelenggara dan lain-lain dapat kembali terjadi;

- (g) pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangunan infrastruktur dan geliat investasi rentan menggelincirkan pejabat daerah dalam pusaran kasus korupsi berupa suap dan penyalahgunaan kewenangan;
- (h) isu degradasi terhadap kinerja pemerintahan baik di pusat maupun di daerah oleh elemen pergerakan aksi dan tokoh politik oposisi dengan mengkritisi kinerja pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan serta kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum;
- (i) dalam kondisi suprastruktur politik Indonesia, kekuasaan eksekutif dan legislatif memberikan peran besar terhadap partai politik dalam penentuan pimpinan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah serta legislatif. Kondisi tersebut telah berpengaruh pada independensi dan netralitas pejabat pemerintahan sehingga cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok/partainya;
- (j) upaya pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru sarat dengan kepentingan politik dari kelompok atau individu tertentu sehingga terkesan dipaksakan dan mengabaikan pentahapan serta prinsip-prinsip daerah otonom seperti tapal batas wilayah, letak ibukota, partisipasi masyarakat dan

sumber daya yang dimiliki sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;

- (k) peran media massa baik cetak maupun elektronik serta kebebasan pers yang terus tumbuh dan berkembang namun belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan. Media massa masih mengutamakan kepentingan kebutuhan ekonomi dibandingkan resiko sosial politik. Media massa memiliki peranan dalam memelihara stabilitas Kamtibmas yang kondusif dengan menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif;
- (l) dalam kaitan penegakan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sultra, beberapa hal yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, antara lain:
- (1) masih adanya substansi hukum yang tumpang tindih dan terjadinya inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dapat berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum sehingga berimplikasi terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan;
  - (2) masih kurang ketegasan dari lembaga penegak hukum, selain itu kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas serta masih kurang transparannya sistem peradilan sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan keamanan, akibat masih lemahnya penegakan hukum. Hal ini terlihat

dari .....

dari masih adanya komersialisasi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, masih adanya intervensi kekuatan politik dan kekuatan massa, sarana dan prasarana hukum yang belum memadai dan masih kurangnya budaya kesadaran hukum baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat;

- (3)) penegakan hukum masih akan dihadapkan pada belum optimalnya kinerja aparatur penegak hukum, adanya praktik mafia peradilan dan diskrimasi dalam penegakan hukum. Faktor lainnya yang dapat menghambat penegakan hukum disebabkan integritas, moralitas dan profesionalisme aparat penegak hukum yang sampai saat ini belum mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

#### **(6) Sosial Ekonomi.**

- (a) terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global diperkirakan masih akan mempengaruhi iklim investasi dan situasi perekonomian di wilayah Sultra, yang mana para investor akan mengalami beberapa permasalahan seperti terbatasnya kredit, sehingga akan berpotensi bagi munculnya konflik social;
- (b) dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara tanpa didukung dengan pengawasan/pengamanan yang ketat dari Kementerian ESDM dan nstansi/lembaga terkait diperkirakan .....

diperkirakan berpotensi terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya berdampak terhadap kerugian negara dan perekonomian nasional;

- (c) pemberlakuan kebijakan perdagangan bebas negara-negara kawasan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan iklim investasi, peningkatan ekspor barang, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Disisi lain kebijakan tersebut juga mengancam/memberikan dampak buruk terhadap perekonomian antara lain:
- (1)) banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas;
  - (2)) regulasi yang kurang dalam memproteksi kekayaan sumber daya alam, sehingga tindakan eksploitasi dalam skala besar oleh perusahaan asing dapat merusak ekosistem;
  - (3)) persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing, dimana kualitas kemampuan daya saing dan produktifitas tenaga kerja lokal masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri seperti China, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dengan disahkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing akan membuka peluang masuknya tenaga kerja kasar *unskilled worker* dari pihak asing yang mengancam

keberlangsungan .....

keberlangsungan dari lapangan kerja untuk pekerja lokal sehingga berpotensi menimbulkan konflik ketenagakerjaan;

- (4)) timbulnya permasalahan sosial baru sebagai dampak dari pemberlakuan pasar bebas, yang dapat berdampak pada timbulnya gangguan Kamtibmas;
- (5)) meningkatnya tenaga kerja asing dari luar khususnya China dan pekerja dari kawasan Asia Tenggara sehingga rentan terhadap terjadinya pelanggaran hukum dan tindak pidana.
- (d) sebagian besar perusahaan industri bermasalah dengan pencemaran lingkungan akibat tidak dilakukannya pengolahan terhadap limbah industri dan analisis dampak lingkungan yang membutuhkan biaya besar dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam.
- (e) kurangnya pemahaman kelompok masyarakat tertentu tentang kebijakan otonomi daerah yang memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya, telah disalah artikan sebagai kebebasan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam tambang dengan kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dampak lingkungan hidup, sehingga berakibat berbagai kasus *illegal mining* (penambangan tanpa izin) serta perusakan lingkungan hidup (tidak melaksanakan reklamasi) yang dapat menimbulkan bencana alam, tanah longsor dan banjir. Potensi timbulnya pelanggaran hukum berupa *illegal logging* yang dapat merugikan kekayaan ....

kekayaan negara, merusak lingkungan hidup, bencana alam, banjir yang menyengsarakan masyarakat cenderung masih akan terjadi;

- (f) kebijakan pemerintah terkait harga BBM dan tarif dasar listrik dimungkinkan akan mengalami koreksi/perubahan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kebijakan terkait harga BBM yang menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar akan berdampak pada terjadinya fluktuasi harga di pasaran, disisi lain kenaikan tarif dasar listrik akan semakin menambah beban hidup masyarakat khususnya pada masyarakat kalangan bawah. Protes terhadap kebijakan pemerintah tersebut akan kembali disuarakan oleh Ormas dan kelompok mahasiswa/LSM serta elit yang berseberangan dengan pemerintah (oposisi) baik melalui penyampaian *release* di media cetak/elektronik ataupun dalam bentuk aksi unjuk rasa;
- (g) meningkatnya aktifitas dan kegiatan perekonomian di wilayah Sultra yang ditandai dengan berdirinya pabrik dan industri yang dalam kegiatan operasionalnya membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah yang besar, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum/kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan penyalahgunaan BBM;
- (h) dengan adanya Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang tidak jauh berbeda dengan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 terkait aturan transportasi *online* yang pengawasan dan implementasinya

masih .....

masih lemah akan dimanfaatkan oleh transportasi *online* untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan penyimpangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan gesekan dengan moda transportasi konvensional;

- (i) kebijakan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan berakibat kepada timbulnya berbagai permasalahan di bidang lalu lintas seperti kemacetan, kesemerawutan dan pelanggaran serta lantas dan kecelakaan lalu lintas. Lemahnya pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi, serta tidak dipatuhi ketentuan dan peraturan tentang perhubungan/transportasi, merupakan ancaman terjadinya kasus-kasus kecelakaan kapal laut maupun kecelakaan pesawat udara;
- (j) permasalahan di bidang pertanian, perkebunan, eksplorasi sumber daya alam mineral dan pembangunan infrastruktur masih akan dihadapkan pada masalah sengketa lahan yang berpotensi memicu konflik vertikal maupun horizontal dengan adanya klaim masyarakat lokal atas hak tanah ulayat/adat;
- (k) berbagai permasalahan di bidang pertanian yang berpotensi menimbulkan gangguan dan cenderung masih akan dihadapi adalah:
  - (1) musim kemarau yang berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya kekeringan di sejumlah areal persawahan di wilayah Sultra. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produksi beras yang berakibat meningkatnya impor beras dari luar daerah;
  - (2)) permintaan ....

- (2)) permintaan pupuk meningkat, namun disisi lain terjadi penyalahgunaan distribusi pupuk yang mengakibatkan kelangkaan pupuk serta naiknya harga pupuk dipasaran, kondisi ini menyebabkan kesulitan para petani untuk meningkatkan hasil dan kualitas pertanian;
- (3)) seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, menimbulkan permasalahan kepemilikan atau status tanah, terutama di daerah perkebunan antara tanah adat/ulayat dengan tanah negara. Kondisi ini dapat memicu terjadi konflik antar kelompok maupun antar desa.
- (l) fluktuasi harga bahan pokok setiap tahunnya akan berdampak pada memberatkan hidup masyarakat khususnya golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah berpotensi menimbulkan dampak bagi gangguan keamanan dengan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pencurian, pemerasan, penipuan, perjudian, prostitusi dan lain-lain;
- (m) kurang ketatnya pengawasan di laut serta kurang tegasnya tindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum di laut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di laut berupa penggunaan bom dalam menangkap ikan, penggunaan kapal trawl, akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal diantara nelayan;
- (n) sempitnya .....

(n) sempitnya lapangan pekerjaan ditambah dengan beragamnya masalah tenaga kerja yang belum teratasi, cenderung masih akan dihadapi serta berpotensi menimbulkan gangguan, antara lain permasalahan PHK, UMR, masalah pesangon dan kesejahteraan pekerja serta upaya penghapusan *out sourching* dan permasalahan TKI di luar negeri.

**(7) Sosial Budaya.**

- (a) ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas khususnya dari kader/simpatisan eks HTI yang telah dibubarkan, akan diwujudkan dengan melakukan kritik terhadap pemerintah yang saat ini sedang berkuasa dengan tujuan untuk mendiskreditkan atau menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- (b) pengaruh globalisasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap terjadinya perubahan perilaku masyarakat Sultra yang mana sebagian masyarakat tidak lagi mengindahkan norma hukum, agama dan adat istiadat yang berlaku. Kondisi tersebut merupakan potensi dan kerawanan terhadap meningkatnya berbagai gangguan Kamtibmas seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran kasus-kasus kesusaiaan, pencurian, perusakan, perkelahian antar warga, premanisme, penyalahgunaan Narkoba dan lain-lain;
- (c) pemanfaatan media sosial maupun media daring oleh masyarakat tanpa memperhatikan kaidah maupun norma pemanfaatan informasi dengan terlebih dahulu menyaring dan menelaah informasi

yang .....

yang diperoleh menyebabkan terjadinya distorsi informasi dengan maraknya berita *hoax*, *hate speech*, *fake news* yang mengarah pada provokasi masyarakat yang bertujuan memicu instabilitas politik dan keamanan akan kembali terjadi di tahun 2020 hingga tahun 2024;

- (d) keragaman etnis, agama, suku dan ras merupakan aset bangsa, yang telah sejak lama terpelihara dalam bingkai kebhinekaan. Ancaman terhadap kebhinekaan akhir-akhir ini kerap kali disuarakan mengatasnamakan agama dalam bentuk ujaran kebencian melalui situs internet dan media sosial. Apabila pemerintah kurang merespon fenomena ancaman tersebut, sewaktu-waktu dapat memicu konflik horizontal yang bernuansa SARA;
- (e) aksi unjuk rasa di wilayah Sultra pada tahun 2020 s.d. tahun 2024 akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya dengan intensitas yang cukup tinggi. Fenomena penggunaan *people pressure* untuk capai tujuan tertentu ataupun sebagai bentuk kritik terhadap jalannya pemerintahan dengan menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat, lemahnya penegakan hukum, permasalahan pertambangan, sengketa lahan, indikasi korupsi dan lain-lain yang dimotori oleh elemen mahasiswa, LSM atau Ormas. Dalam pelaksanaannya Unras yang membawa massa dengan jumlah yang besar rentan terprovokasi untuk melakukan giat anarkis;
- (f) diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah

(penutupan sejumlah tempat ibadah yang dinilai tidak memperoleh izin) telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Masyarakat yang menolak beralasan Surat Keputusan Bersama tersebut dinilai merugikan agama tertentu dan membatasi kebebasan kegiatan beragama, mereka semakin sulit untuk mendirikan tempat ibadah, sedangkan menurut kelompok yang menyetujui berpendapat bahwa Keputusan Bersama tersebut sudah mewakili semua aspirasi dari berbagai kelompok agama. Perbedaan penafsiran tersebut dapat mengakibatkan konflik antar penganut agama, yang merupakan potensi bagi timbulnya gangguan Kamtibmas;

- (g) beberapa aliran/sekte keagamaan yang menyesatkan masyarakat telah menimbulkan keresahan masyarakat antara lain aliran Jamaah Ahmadiyah, Syiah dan Aliran Annatsir. Kebedaradaan penganut aliran tersebut, telah mendapat perhatian dan menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu penanganan khusus melibatkan seluruh *stakeholders*/ komponen terkait guna mencegah terjadinya aksi anarkisme terhadap sesama umat. Dilain pihak walaupun kerukunan antar umat beragama di wilayah Sultra cukup harmonis, namun adanya upaya-upaya provokosasi oleh oknum/kelompok tertentu terkait permasalahan yang dapat memicu konflik berlatar belakang SARA di wilayah Sultra perlu diwaspadai;
- (h) penanganan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat masih jauh dari harapan, menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit seperti demam berdarah (DBD),

flu .....

flu burung, HIV/AIDS, gizi buruk, Muntaber, diare, rabies dan lain-lain di wilayah Sultra yang pada gilirannya berimplikasi terhadap stabilitas Kamtibmas;

- (i) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah tujuan wisata, disatu sisi dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat namun dilain pihak berpotensi terjadi penyalahgunaan visa bebas kunjungan oleh wisatawan asing memanfatkan belum maksimalnya pengawasan dari instansi berwenang. Dampak negatif lainnya seperti penolakan dari warga lokal karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat di daerah tersebut serta adanya wisatawan asing yang terlibat tindak pidana;
- (j) pengelolaan pembangunan sektor pendidikan yang kurang terencana dengan baik dan kurangnya pengawasan, dapat menimbulkan berbagai kasus yang berkaitan dengan pendidikan, antara lain masalah ijazah palsu, masalah Ujian Akhir Nasional, masalah gelar kesarjanaan dari lembaga pendidikan yang tidak memenuhi syarat, penyimpangan dalam penyaluran dana subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain-lain;
- (k) penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Daerah setempat kepada beberapa pemilik, sehingga menimbulkan sengketa tanah yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut berpotensi terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas berupa pendudukan tanah oleh massa,

penjarahan .....

penjarahan hasil kebun milik perusahaan pada saat panen oleh masyarakat, pembakaran/pengrusakan aset perusahaan, sampai dengan terjadinya penganiayaan atau pembunuhan.

**(8) Keamanan.**

Trend gangguan Kamtibmas berdasarkan pengelompokannya (perbandingan antara 2016, 2017, 2018 dan 2019) yaitu:

- (a) kejahatan konvensional
  - (1)) tahun 2016 : 6.225 kasus;
  - (2)) tahun 2017 : 5.333 kasus;
  - (3)) tahun 2018 : 3.930 kasus;
  - (4)) tahun 2019 : 3.992 kasus.
- (b) kejahatan transnasional
  - (1)) tahun 2016 : 509 kasus;
  - (2)) tahun 2017 : 645 kasus;
  - (3)) tahun 2018 : 620 kasus;
  - (4)) tahun 2019 : 282 kasus.
- (c) kejahatan terhadap kekayaan negara
  - (1)) tahun 2016 : 64 kasus;
  - (2)) tahun 2017 : 39 kasus;
  - (3)) tahun 2018 : 47 kasus;
  - (4)) tahun 2019 : 30 kasus.
- (d) kejahatan berimplikasi kontinjensi
  - (1)) tahun 2016 : 32 kasus;
  - (2)) tahun 2017 : 30 kasus;
  - (3)) tahun 2018 : 58 kasus;
  - (4)) tahun 2019 : 91 kasus.

**b. Analisis SWOT**

Dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui Analisa SWOT, yaitu:

**1) Kekuatan**

- a) postur kekuatan Polda Sultra sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres jajaran sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek jajaran sebagai simpul terdepan pelayanan Kamtibmas prima kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan tergelar mulai tingkat Polda Sultra sampai tingkat kecamatan dengan struktur 1 (satu) Polda, 12 (dua belas) Polres, 125 (serratus dua puluh lima) Polsek dan 19 (sembilan belas) Polsubsektor;
- b) pegawai negeri pada Polda Sultra sebanyak 7.107 orang terdiri dari anggota Polri 6.928 orang dan PNS Polri 179 orang, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 2.10 %, maka jumlah penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 sejumlah 2.704.737 jiwa atau 0,99 % dari total populasi Indonesia (data Sulawesi Tenggara dalam angkata, 2020) sehingga rasio antara Polri dengan penduduk saat ini adalah 1: 380 jiwa;
- c) dukungan terhadap sarana dan prasarana Polda Sultara yang meningkat dari tahun ke tahun khususnya peralatan operasional seperti; transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil tergelar mulai dari Polda sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polda Sultra, guna kelancaran pelayanan Polda Sultra kepada masyarakat;
- d) meningkatnya .....

- d) meningkatnya dukungan anggaran operasional kepolisian yang telah terdistribusi dari Satker Mapolda sampai tingkat Polsubsektor melalui (Satker Polres) dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para Kasatker mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang telah diprioritaskan serta berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;
- e) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penanganan *transnational crime* (Narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara (*korupsi, illegal logging, illegal mining*) dan kejahatan berimplikasi kontinjenji (kerusuhan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polda Sultra;
- f) terisinya jabatan dan unit-unit baru dari mulai tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polda dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek semakin meningkatkan pelayanan Polda Sultra kepada masyarakat;
- g) adanya tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

## 2) Kelemahan

- a) rasio perbandingan antara Polri dan penduduk (1: 380) telah ideal, namun bila dilihat secara riil dari sejumlah 7.108 anggota Polri tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional kepolisian (sebagian melaksanakan tugas staf atau fungsi pendukung) dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini 2.704.737 jiwa atau 0,99 % dari total Penduduk Indonesia (data Sulawesi Tenggara dalam angka, 2020);  
b) kualitas ....

- b) kualitas dan kuantitas tenaga pendidik masih belum memadai sehingga belum menghasilkan hasil didik yang sesuai standar kompetensi yang diharapkan bila dihadapkan dengan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks;
- c) masih rendahnya keterampilan dan kemampuan personel Polda Sultra di lapangan terutama dalam segi penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis teknologi informasi serta kimia, biologi dan radioaktif di bidang kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih;
- d) reformasi di bidang kultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat dari masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polda Sultra yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan yang ditetapkan bila berurusan dengan Polri;
- e) masih terbatasnya penyidik Polda Sultra yang berlatar belakang pendidikan S1 atau yang setara, berdampak pada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan, seperti *cyber crime*, *money laundering*, terorisme, perdagangan gelap, kimia, biologi, radioaktif dan penyalahgunaan Narkoba.

### 3) Peluang

- a) program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), memberikan peluang bagi Polda Sultra untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek struktural dan instrumental, khususnya aspek kultural;

b) sistem .....

- b) sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sejalan dan saling menunjang dengan keberadaan organisasi Polda Sultra yang ada pada semua tingkatan pemerintahan;
- c) tugas operasional Polda Sultra dalam menciptakan keamanan wilayah Sulawesi Tenggara melalui strategi perpolisian masyarakat semakin meningkat, hal ini menjadi peluang bagi Polda Sultra dalam membangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*) terhadap Polda Sultra;
- d) semakin terjalannya hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait (*Partnership*) khususnya pemerintah daerah maupun instansi vertikal maupun seluruh elemen masyarakat dalam mendukung kebijakan Sinergi Polisional Proaktif.

**4) Ancaman**

- a) kecenderungan meningkatnya kejahatan konvensional serta penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin menganggu stabilitas dan keamanan wilayah Sulawesi Tenggara, baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan tugas Polda Sultra;
- b) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di samping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, serta kecepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polda Sultra untuk mampu menegakkan hukum serta menjaga keamanan dari kejahatan siber;
- c) turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontingensi di beberapa daerah tertentu serta penggunaan media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan *hoax* dan kebencian yang menganggu stabilitas dan keamanan nasional sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;
- d) kewenangan .....

- d) kewenangan dan komitmen internal instansi terkait sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintah yang bersih. Dalam penanggulangan kejahatan di perairan, Polda Sultra juga mengamankan laut, dimana 74,29 % wilayah Sulawesi Tenggara adalah laut. Laut memegang peran penting dalam ketahanan pangan dan juga keamanan, pertambangan dan kehutanan dapat menimbulkan kerugian negara yang semakin besar;
- e) meningkatnya kasus-kasus yang merugikan negara, masyarakat/individu diantaranya kasus korupsi, kasus Narkoba dan *money laundering*, disebabkan ringannya putusan hukuman terhadap terdakwa serta masih adanya putusan bebas murni;
- f) tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri;
- g) sistem hukum dan peradilan yang masih tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaruan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu permasalahan.

#### c. **permasalahan**

Permasalahan-permasalahan di bidang keamanan yang berpotensi menyebabkan timbulnya gangguan keamanan antara lain meliputi:

- 1) tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat besar dalam mempengaruhi situasi keamanan, sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan, masyarakat bertindak main hakim sendiri;
- 2) masih berkembangnya pemahaman ditengah tengah masyarakat bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungannya;

3) rendahnya ....

- 3) rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
- 4) kecenderungan masyarakat Sultra mengkonsumsi minuman keras sehingga berakibat mudah emosional, mudah tersinggung, dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah sehingga mengakibatkan sering terjadinya tindak kekerasan seperti penganiayaan, penggeroyokan, KDRT dan tindakan asusila;
- 5) terbatasnya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi terbatas beban biaya hidup yang semakin tinggi serta minimnya keterampilan, membuat orang atau kelompok tertentu berpikiran pendek mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang melalui cara-cara yang melawan hukum;
- 6) sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan segalanya dapat diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
- 7) kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan dan rambu rambu lalu lintas, kelalaian korban yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, kondisi kedaraan dan jalan serta pengaruh cuaca melatarbelakangi terjadinya kecelakaan;
- 8) menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap wibawa penegakan hukum yang disebabkan karena tindakan aparat Gakum yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang ditandai dengan pengungkapan kasus suap beberapa aparat penegak hukum. Kondisi tersebut telah membuat stigma negatif bahwa hukum menjadi tajam hanya ketika berhadapan dengan masyarakat kalangan bawah;
- 9) penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
- 10) Hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat;
- 11) media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan hoax dan kebencian yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
- 12) penyelundupan ....

- 12) penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- 13) adanya potensi bencana alam di Sulawesi Tenggara membutuhkan kesiapsiagaan Polda Sultra di dalamnya saat terjadi bencana;
- 14) masyarakat dan *stakeholders* masih belum merasakan bahwa Kamtibmas dan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Polda Sultra;
- 15) tuntutan masyarakat akan rasa keadilan semakin tinggi dan harapan untuk restorasi keadilan bila tidak terpenuhi dapat menjauhkan masyarakat dari Polri.

## BAB II

### PENJABARAN VISI, MISI POLRI DI POLDA SULTRA, SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana disebutkan di atas, Polda Sultra menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian di Sulawesi Tenggara menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam menjabarkan Visi dan Misi Polri berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 6 ayat (1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjabaran Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Sultra adalah sebagai berikut:

#### 1. Visi:

***"Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman dan tertib "***

Makna: Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Polri dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

2. Misi .....

2. **Misi:**

***"Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat"***

**Melindungi.** Dalam hal melindungi, banyak hal yang memerlukan perlindungan. Tetapi Polda Sultra bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Melayani.** Melayani kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

**Mengayomi.** Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jika apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin kalau dari kemauan masyarakat itu sendiri kurang, maka akan percuma saja apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi. Dan masyarakat akan terus berfikir bahwa seorang polisi tidak bisa mengayomi masyarakat.

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap masyarakat dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

Adapun Janji Presiden (JP) di Polri ialah:

- a. penegakkan hukum terhadap kejahanan Premanisme, Lingkungan Hidup, Narkoba, TPPU, Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi serta PPA;
- b. meningkatkan Sinergi dan Kerjasama antar Lembaga penegak hukum dan TNI;
- c. mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, reformasi birokrasi guna menekan menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksesif.

### **3. Tujuan**

- a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara;
- b. menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c. mewujudkan personel Polda Sultra yang profesional;
- d. menerapkan manajemen Polri yang terintegritas dan terpercaya.

### **4. Sasaran Strategis**

- a. Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan;
- c. Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional;
- d. Sistem pengawasan yang akuntabel, guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

### **5. Keterkaitan Sasaran *Impact* "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", Tujuan, dan Sasaran Strategis**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan.	Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan
3. mewujudkan personel Polda Sultra yang profesional.	Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional.
4. menerapkan manajemen Polri yang terintegritas dan terpercaya	Sistem pengawasan yang akuntabel, guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

## 6. Penahapan Kebijakan

### a. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polda Sultra yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

### b. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Sultra yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus yang modern;

### c. Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polda Sultra yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

### d. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Sultra yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

### e. Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polda Sultra yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat Polsubsektor dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri.

Titik hubung dari sasaran, arah kebijakan dan strategis dalam agenda pembangunan ke-7, kedudukan Polri terletak pada Kegiatan Prioritas (KP) di:

- a. Keamanan Dalam Negeri;
- b. Keamanan Laut;
- c. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
- d. Keamanan Siber.

Polri juga berkontribusi pada penegakan hukum yang berkaitan dengan *Restorative Justice* dan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Sedangkan titik hubungnya dapat dilihat dari arah kebijakan dan strategi Polri hingga ke level Proyek Prioritas Nasional serta keterkaitannya dengan tugas dan fungsi yang dipunyai oleh Polri dapat digambarkan kedalam Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Polri. Adapun Sasaran Strategis Polri adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis "**Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - 1) peningkatan kehadiran Polri pada 187 Lokasi Prioritas (Lokpri) dan 21 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
    - a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
    - b) meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik di darat maupun laut;
  - 2) pencegahan .....

- 2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
  - b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
  - c) meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (*Janji Presiden*)
  - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan memerlukan pengamanan;
  - e) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob;
- 3) peningkatan pelaksanaan Operasi Kepolisian termasuk di Ibukota Negara Baru;  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
  - b) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
  - c) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
- 4) peningkatan keamanan Laut;  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan .....

- a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi termasuk penguatan kapasitas cakupan operasi keamanan laut di perbatasan dan Selat Malaka serta mengungkap kejahatan di laut;
- b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;
- c) meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan NKRI;
- 5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
- b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;
- c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
- 6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif* serta peran *mediasi*" dalam setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
- 7) melaksanakan "Efektifitas Operasional" kegiatan operasional Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) meningkatkan .....

- (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
  - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan).
- b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
  - (2) menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;
- c) penguatan sistem informasi Polri berbasis "*Big Data Polri*" dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
  - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
  - (3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.
- b. Sasaran strategis "**Penegakan Hukum secara Berkeadilan**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan yaitu:
    - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
    - b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
    - c) meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;(Janji Presiden);
    - d) mempercepat .....

- d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; (*Janji Presiden*)
  - e) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari;
  - f) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang *Digital Forensik* bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker Polri dan aparat penegak hukum;
  - b) standardisasi data kriminal nasional;
  - c) mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- 3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
  - b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
  - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (*Janji Presiden*)

c. Sasaran .....

c. Sasaran strategis "**Profesionalisme SDM**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) peningkatan kualitas SDM Polri

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
- b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
- c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;
- d) meningkatkan kesejahteraan SDM; (*Janji Presiden*)

2) pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- a) melakukan pendataan personel Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru;
- b) menyusun *roadmap* pemindahan personel Mabes Polri ke Ibu Kota Negara Baru.

d. Sasaran strategis "**Modernisasi Teknologi**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut: modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- 1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polri tahun 2020-2024 termasuk peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
- 2) melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan Polri di Ibu Kota Negara Baru;

3) melakukan .....

- 3) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - 4) melakukan modernisasi kapal kelas A-1 dengan ukuran Panjang 90-95 M dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone dalam rangka mendukung kegiatan keamanan laut;
  - 5) membangun Big Data/Single Data Entry Polri;
  - 6) membangun smart security di Ibu Kota Negara Baru;
  - 7) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polri;
  - 8) membangun rumah sakit/layanan kesehatan bagi anggota Polri.
- e. Sasaran strategis "**Sistem Pengawasan yang Akuntabel guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Melayani**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) melaksanakan "Layanan Publik Polri yang Prima";  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polri;
    - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
    - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
    - a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; (*Janji Presiden*)
    - b) membangun .....

- b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
- c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek;
- 3) melaksanakan "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran";  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polri;
- (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polri;
- b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri;
- (2) menyusun LKIP Polri;
- 4) melaksanakan "Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif";  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) memperkuat kerangka regulasi Polri;
- (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
- b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
- (2) mengoptimalkan .....

- (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atas penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
- (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik; (*Janji Presiden*).

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sultra.

- a. Sasaran strategis "**Terwujudnya pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - 1) peningkatan kehadiran personel Polda Sultra pada tempat yang rawan gangguan Kamtibmas;  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
    - meningkatkan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini) fungsi intelijen keamanan Polda Sultra yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial;
  - 2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Sultra yang akan dilakukan yaitu:
    - a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
    - b) melakukan Lidikpamgal dan Binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
    - c) meningkatkan efektifitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya
    - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan Obvitnas dan Obvit lainnya;

3) peningkatan .....

3) peningkatan keamanan Laut;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendekripsi dan mengungkap kejahatan di laut;
- b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;

4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Sultra yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
- b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;
- c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Sultra;

5) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Sultra yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif* serta peran *mediasi*" dalam setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;

6) melaksanakan .....

- 6) melaksanakan "Efektifitas Operasional" kegiatan operasional Polda Sultra;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Sultra yang akan dilakukan yaitu:

- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polda Sultra dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
- (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan).

- b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
- (2) menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;

- c) penguatan sistem informasi Polda Sultra berbasis "*Big Data Polri*" dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
- (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda;
- (3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

- b. Sasaran strategis "**Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan**" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan kasus yang menjadi atensi publik;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan Polda Sultra yaitu:

- a) meningkatkan .....

- a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
  - b) mengusulkan personel untuk mengikuti sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung Penguanan Pengamanan Infrastruktur Siber;
  - c) meningkatkan kerja sama di bidang penyelidikan dan penyidikan; (*Janji Presiden*)
  - d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi attensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; (*Janji Presiden*)
  - e) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari;
  - f) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang *Digital Forensik* bagi pemeriksa forensik (Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);
- 2) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
  - b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
  - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (*Janji Presiden*)

c. Sasaran .....

- c. Sasaran strategis "Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- peningkatan kualitas SDM Polda Sultra.  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda ultra yang akan dilakukan yaitu:
    - a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
    - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
    - c) mengusulkan personel untuk mengikuti sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polda Sultra dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber.
- d. Sasaran strategis "sistem pengawasan yang akuntabel, guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) melaksanakan "Layanan Publik Polda Sultra yang Prima";  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Sultra yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda Sultra;
    - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal melalui akses yang mudah;
    - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan personel Polda Sultra dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Sultra yang akan dilakukan yaitu:
    - a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi yang andal;  
*(Janji Presiden)*
    - b) membangun .....

- b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
- c) meningkatkan manajemen kinerja dari tingkat Polda sampai dengan Polsek;
- 3) melaksanakan "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran";  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Sultra yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Sultra dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Sultra;
- (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Sultra;
- b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Sultra dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Sultra;
- (2) menyusun LKIP Polda Sultra;
- 4) melaksanakan "Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif";  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Sultra yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) memperkuat kerangka regulasi Polri;
- (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
- b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
- (2) mengoptimalkan .....

- (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atas penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
- (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik; (*Janji Presiden*).

### 3. Kerangka Regulasi Polda Sultra.

Polda Sultra dalam menjalankan roda organisasi mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebagai pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polda Sultra yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Polda Sultra yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang akan dilaksanakan oleh Polda Sultra selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan Polri yang tersusun dalam kerangka regulasi Polda Sultra. Kerangka regulasi pada Renstra Polda Sultra berisi tentang saran masukan penyusunan regulasi oleh Polri yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Polda Sultra adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada di bawah Kapolri. sehingga dalam implemtasi kerangka regulasi, Polda Sultra dapat memberikan saran masukan tentang pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

### KERANGKA REGULASI

NO	Arah Kerangka Regulasi Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Pengang Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Terget Penyelesaian
1.	Peraturan Kapolda Sultra Nomor 4 Tahun 2012 tentang HTCK di Lingkungan Polda Sultra	a. menyesuaikan dengan Perpol 14 tahun 2018 tentang SOTK Polda; b. menyesuaikan Perkap Nomor 2 tahun 2018 tentang pembentukan peraturan kepolisian	Rorena Polda Sultra	Bidkum Polda Sultra	Tahun 2020
2.	Peraturan Kasatfung/Kasatker lingkup Mapolda Sultra tentang HTCK di lingkungan Satfung/Satker Mapolda SULtra	tidak sesuai sesuai dengan Perkap Nomor 2 tahun 2018 tentang pembentukan peraturan kepolisian	Rorena	Seluruh Satfung Mapolda Sultra	2020
3.	Peraturan Kasatwil jajaran Polda Sultra	tidak sesuai sesuai dengan Perkap Nomor 2 tahun 2018 tentang pembentukan peraturan kepolisian	Rorena	Satwil jajaran Polda Sultra	2020
4.	Memberikan saran masukan terkait dengan revisi Peraturan yang dilakukan oleh Mabes Polri	Sesuai permintaan/arahan dari Mabes Polri	Sesuai dengan Tupoksi	Sesuai dengan Tupoksi	Sesuai permintaan/arahan dari Mabes Polri

#### 4. Kerangka Kelembagaan Polda Sultra.

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polda Sultra yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi dan saat ini jumlah anggota Polri Polda Sultra: 2.224 orang dan PNS 141 serta anggota Polri Polres: 4.704 orang dan PNS 38 total 7.108 orang hubungan inter organisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Polda Sultra mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter organisasi mencakup tata hubungan kerja inter organisasi Polda Sultra, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat Polri dan Aparatur Sipil Negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polda Sultra di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Tersedianya lembaga organisasi Polda Sultra yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu syarat keberhasilan Polda Sultra dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polda Sultra yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polda Sultra dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polda Sultra masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya efektivitas pembangunan kelembagaan Polda Sultra, melalui ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Polda Sultra.

Prioritas penguatan kelembagaan Polda Sultra sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. usulan pembentukan satuan organisasi kewilayahan Polres, Polsek dan Polsubsektor;
- b. usulan penataan dearah hukum untuk memudahkan rentang kendali dan mempercepat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- c. implementasi .....

- c. implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja;
- d. usulan peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polres dan Polsek;
- e. usulan penataan tipe satuan kewilayahan tingkat Polsek;
- f. pemutakhiran data Satuan Kewilayahan;
- g. penguatan sentra-sentra pelayanan publik Polri.

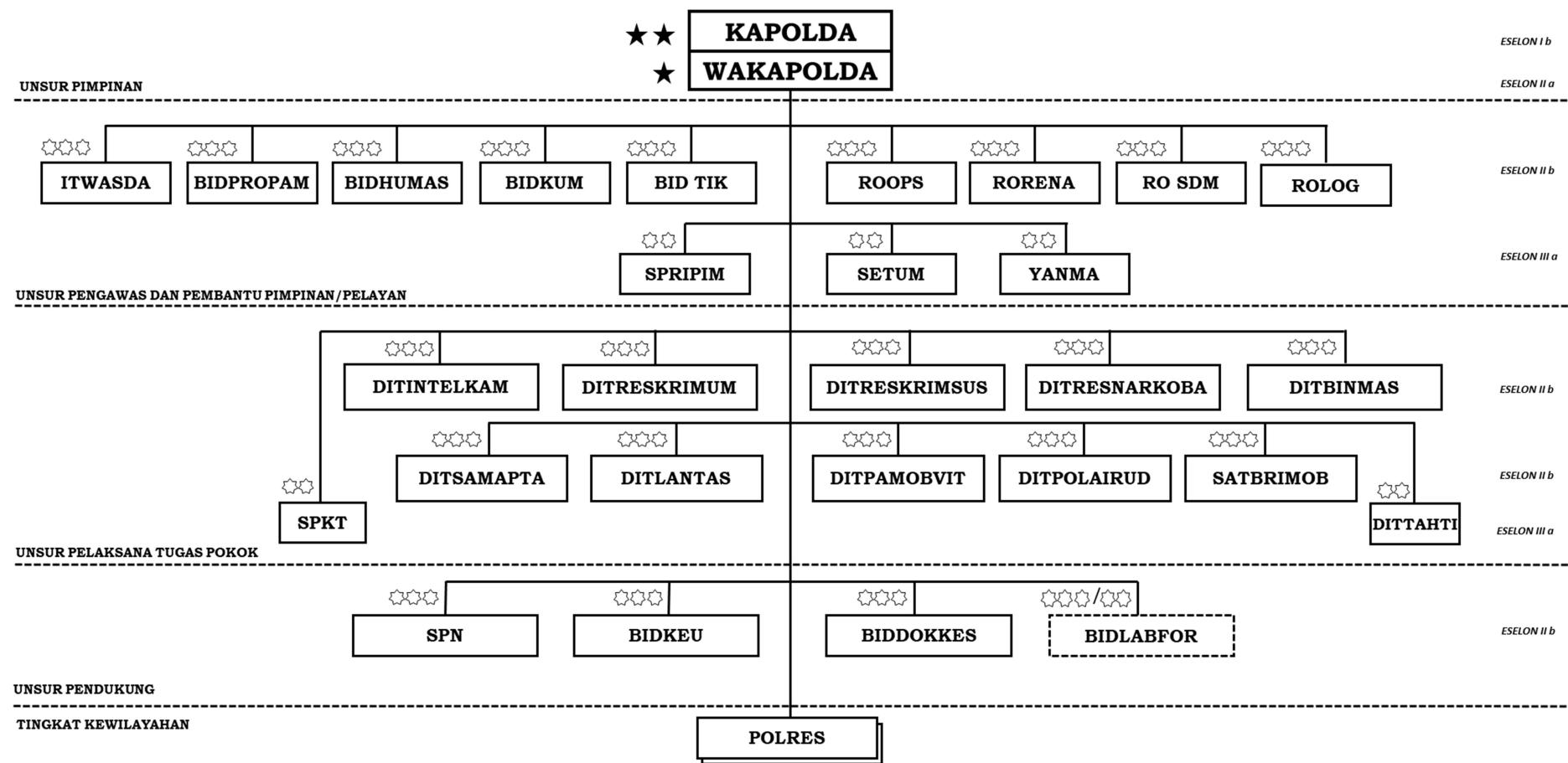
Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Polda Sultra, menyiapkan dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

#### KERANGKA KELEMBAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	sistem pengawasan yang akuntabel, guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani		01 Program Dukungan Manajemen 3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri						
	Peningkatan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal	Monitoring dan evaluasi organisasi	1. menyiapkan data evaluasi Polda Sultra		1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	
			2. Penilaian SIK3 Polres dan Polsek	10 Res 125 Sek	12 Res 125 Sek				
			3. Evaluasi :  a. Komposisi Pers dibanding DSP;  b. Unit Lantas Polsek;  c. Satpolair;  d. Unitintelkam;  e. Polsubsektor;		1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah
				10 Sek					
				3 Satpolair					
				125 Sek					
				19 Polsub sektor					

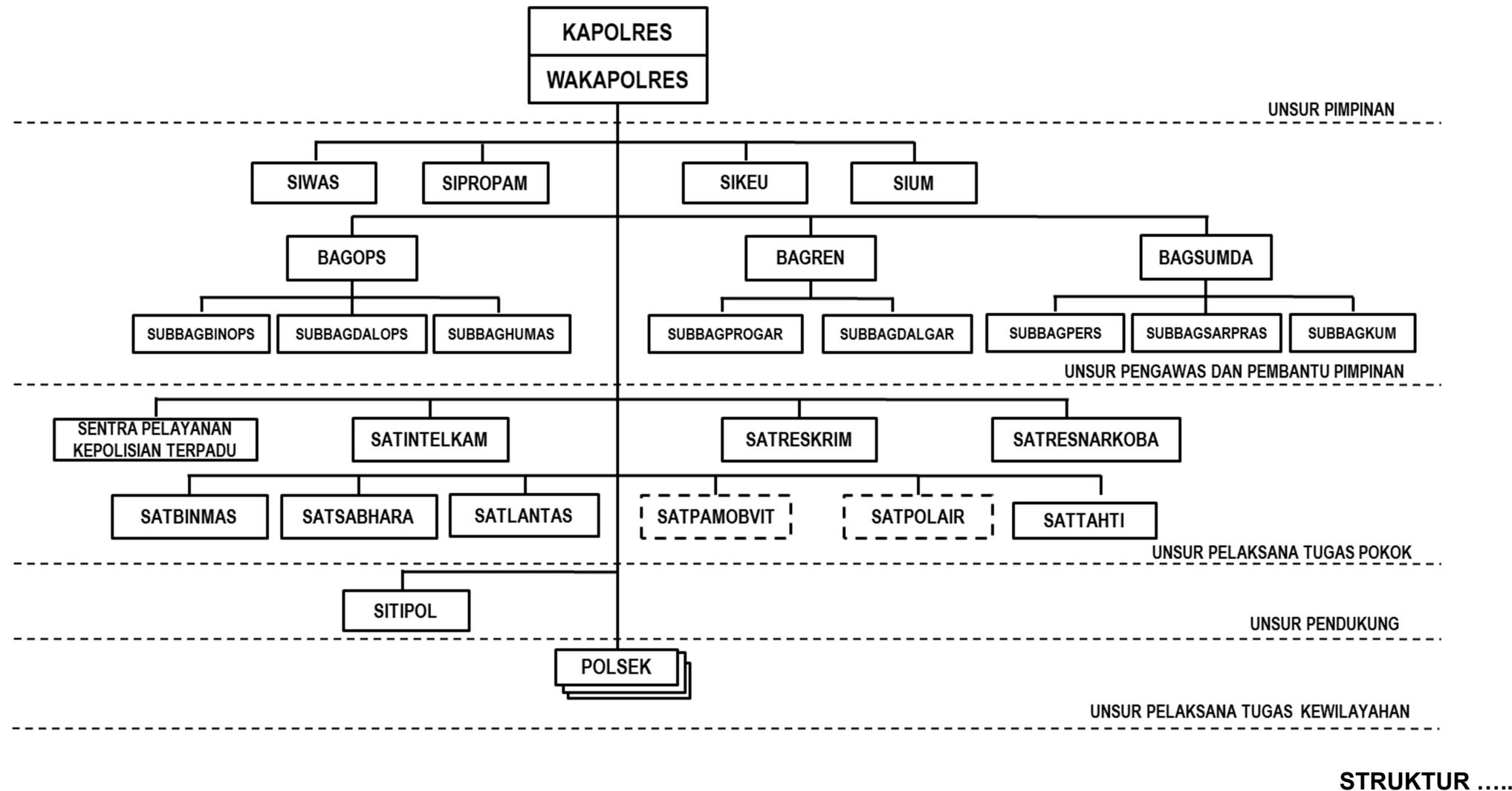
NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Penataan organisasi tingkat Polres	Studi kelayakan: 1. Perubahan tipe Polres	Usulan perubahan tipe Polres Kendari;	1 naskah	Usul Kembali bila blm di akomodir			
			2. Pembentukan Polres	Usulan pembentukan Polres di Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Kolaka Timur dan Kab. Buton Tengah		2 Polres	1 Polres + 2 Res yg blm di bentuk	Usul Res yg blm di bentuk	Usul Res yg blm di bentuk
		Penataan organisasi tingkat Polsek/ Polsubsektor	1. Pembentukan Polsek	Usulan pembentukan Polsek: Lalolae, Watumeeto, Baoito, Buke, Benua, Mowila, Meluhu, Wabula, Lea-Lea, Watubangga	9 Sek	1 Sek + Sek yang belum di bentuk	Usul Polsek yang blm di bentuk	Usul Polsek yang blm di bentuk	Usul Polsek yang blm di bentuk
			2. Pembentukan Polsubsektor	Usulan pembentukan Polsubsektor: Maginti, Kulisusu Utara, Kambowa, Lembo, Lasolo Kepulauan, Molawe, Wawonii Tenggara, Poleang Utara, Poleang Selatan, Mata oleo	2 Polsub sektor	2 Polsub sektor	2 Polsub sektor	2 Polsub sektor	2 Polsub sektor
		Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri	1. Penataan daerah hukum	Usulan penataan daerah hukum Polsek Mandonga dengan Polsek Baruga	1 Kegiatan	Usul Kembali bila blm di akomodir			
			2. Penataan tipe satuan kewilayahan	Polsek-polsek yang kelebihan beban kerja atau sebaliknya	2 Polsek	Usul Kembali bila blm di akomodir			
			3. Perubahan nomenklatur	Usul perubahan nomenclatur Polsek	3 Sek	Usul Kembali bila blm di akomodir			
			4. Penyempurnaan HTCK	Peraturan Kapolda Sultra tentang HTCK	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
			5. penyempurnaan ABK						

### STRUKTUR ORGANISASI POLD A TIPE A

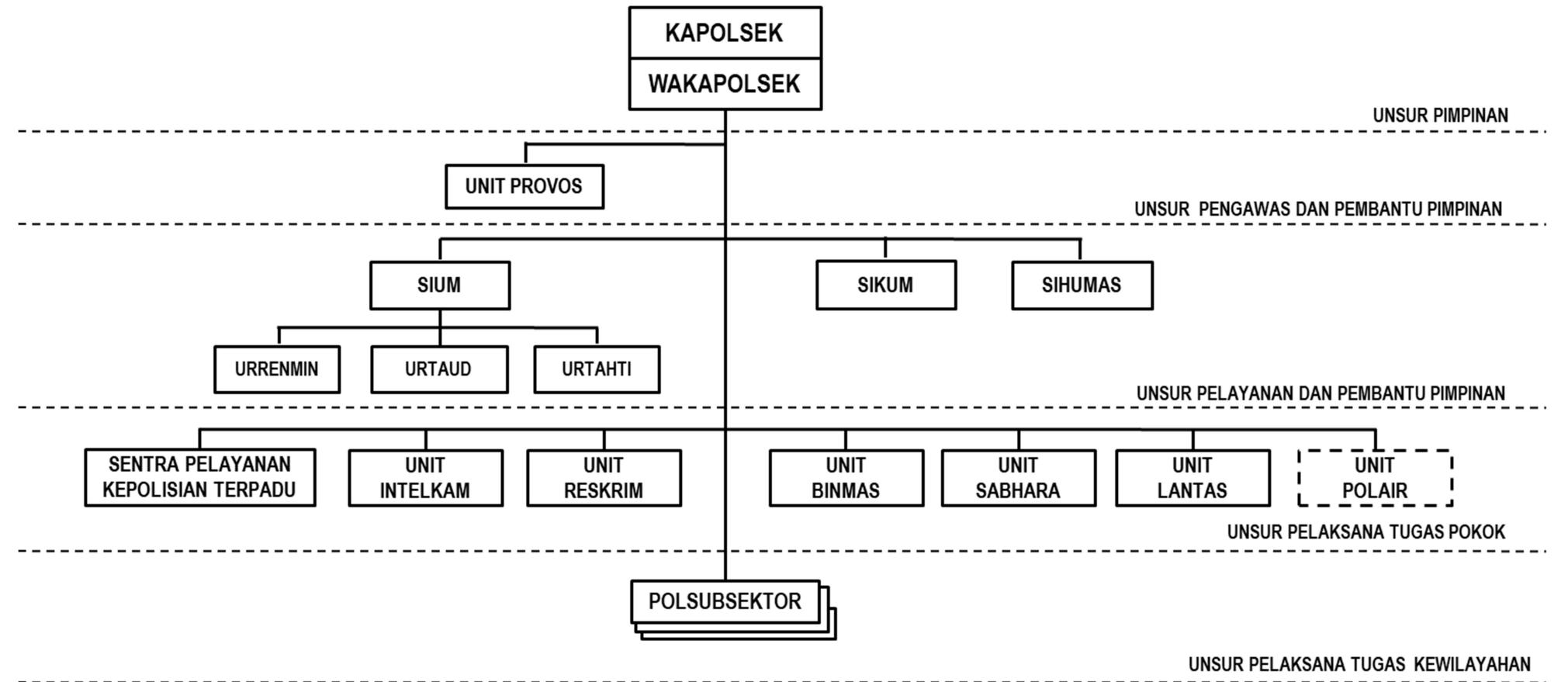


struktur ....

**STRUKTUR ORGANISASI POLRES  
( TIPE POLRES)**

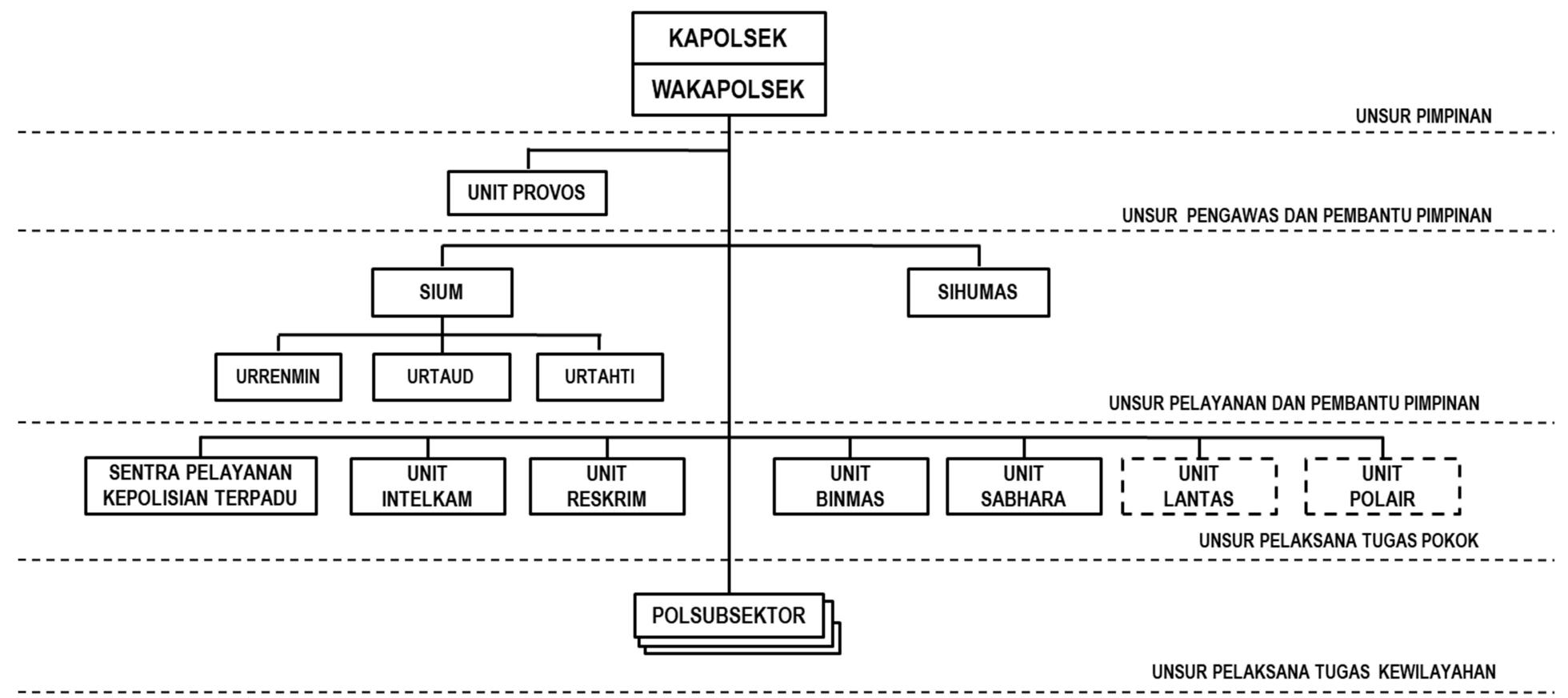


**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK  
( TIPE URBAN)**



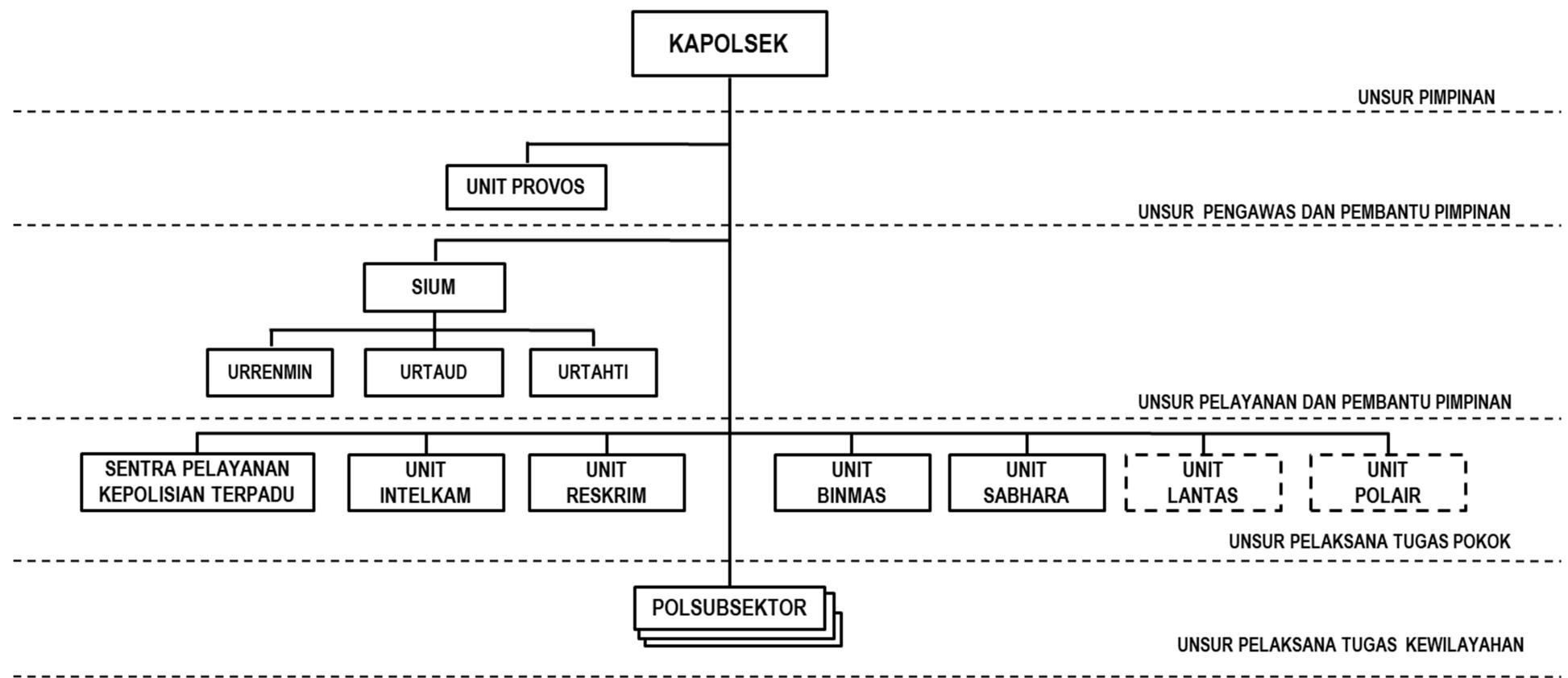
**STRUKTUR .....**

**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK  
( TIPE RURAL)**



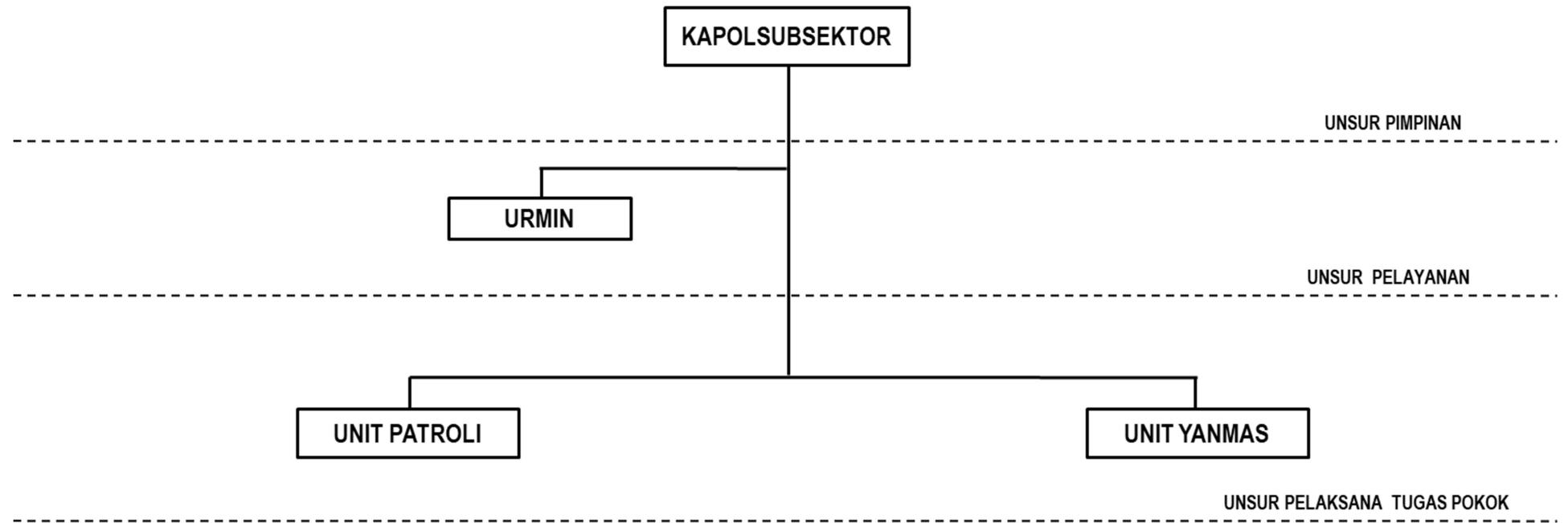
**STRUKTUR .....**

**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK  
 ( TIPE PRA RURAL)**



**STRUKTUR ....**

## STRUKTUR ORGANISASI POLSUBSEKTOR



BAB IV .....

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara serta mendukung tercapainya kebijakan pada level daerah, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menetapkan 4 (empat) tujuan dan telah dilengkapi dengan 4 (empat) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis terdapat indikator kinerja utama.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	<i>Base line</i>	Target						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>IK UTAMA</b>									
SS1	Terwujudnya Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	IKU1	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	71	77.7	75.8	73.6	71.8	69.5
SS2	Terwujudnya Penegakan hukum secara berkeadilan	IKU2	Indeks Penegakan Hukum	73	82.2	82.4	82.0	82.6	82.5
SS3	Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra	53.2	54.8	55.2	56.4	57.7	59.5
		IKP2	Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra	90.2	90.8	91.5	91.6	91.8	91.9
SS4	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.	IKP3	Nilai SAKIP	75,16	76.20	77.30	78.45	79,50	80.20
		IKP4	Nilai RBP	76.73	77	78	79	80	81
		IKP5	Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra	76.5	76.8	77.8	80.1	81.2	82.1
		IKP6	Nilai kinerja anggaran	85	89.6	89.8	90.1	90.3	90.6
		IKP7	Persentase penyerapan anggaran	98,78	98,78	98,78	98,79	98,79	98,80

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Base line</b>	<b>Target</b>					
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	IKP8	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	87	92	92	92	93	93
	IKP9	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra	90	93	93	94	94	95

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
- c. Program Profesionalisme SDM Polri;
- d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

## **2. Kerangka Pendanaan**

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam BAB terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN). Pendanaan APBN akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara Polda Sultra dengan Pemda (APBD). Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana lampiran I.

Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Ket
Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	<p>1. Melaksanakan Anev penerapan sistem dan manajemen;</p> <p>2. Pembentukan, perubahan tipe satuan kewilayahan;</p> <p>3. Melakukan pembangunan Polsek secara bertahap;</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Instansi terkait dan pemerintah daerah;</p> <p>5. Meningkatkan keamanan wilayah Sultra melalui penguatan Polsek/Subsektor yang ada di jajaran Polda Sultra;</p> <p>6. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat;</p> <p>7. Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas;</p> <p>8. Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;</p> <p>9. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;</p> <p>10. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemptif dan preventif;</p> <p>11. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;</p> <p>12. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas pada daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni;</p>	RM PNBP	

Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Ket
	<p>13. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara;</p> <p>14. Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat;</p> <p>15. Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian <i>trouble spot</i> dan <i>black spot</i> dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas;</p> <p>16. Melakukan kajian <i>black spot</i> kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;</p> <p>17. Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi <i>Traffic Accident Analysis</i>;</p> <p>18. Mengembangkan program <i>road safety/safety riding</i>;</p> <p>19. Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;</p> <p>20. Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;</p> <p>21. Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas;</p> <p>22. Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;</p> <p>23. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;</p> <p>24. Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholder dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/ diseminasi informasi digital melalui media online dan media sosial;</p> <p>25. Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PIO) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;</p>		

26. Meningkatkan .....

Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Ket
	<p>26. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;</p> <p>27. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;</p> <p>28. Mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.</p>		
Terwujudnya penegakkan Hukum secara Berkeadilan	<p>1. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan mengusulkan sertifikasi;</p> <p>2. Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik;</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan personel Polda Sultra dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNNP dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;</p> <p>4. Meningkatkan kapabilitas Polda Sultra dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan meningkatkan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan <i>stakeholder</i> lainnya;</p> <p>5. Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah daerah;</p> <p>6. Mengoptimalkan kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>) pada masing-masing kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan;</p> <p>7. Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontinjenji);</p> <p>8. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah.</p>	<b>RM</b>	

Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Ket
Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional.	<p>1. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas;</p> <p>2. Rasionalisasi dan realokasi personel Polda Sultra ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;</p> <p>3. Menyusun <i>database</i> postur Polri sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal <i>zero growth</i> Polri;</p> <p>4. Melakukan penataan dalam pembinaan personel melalui teknologi informasi berdasarkan merit sistem dan rekam jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;</p> <p>5. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem <i>computer assisted test</i>;</p> <p>6. Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme;</p> <p>7. Menerapkan standar kompetensi pendidik secara bertahap pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan kesatuan operasional dasar/Polres;</p> <p>9. Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan <i>reward and punishment</i>;</p> <p>10. Menyusun <i>Blue Print</i> kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara <i>bottom up</i> berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polda;</p>	RM	

Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Ket
	11. Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya; 12. Menyusun standardisasi DSP dan peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja; 13. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polda; 14. Memberikan keterampilan kewirausahaan kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun.		
Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.	1. Melaksanakan revolusi mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, melalui penunjukan <i>role model</i> . 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program <i>quick wins</i> ; 3. mengusulkan pemenuhan kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik kepolisian; 4. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 5. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara: a. penggelaran Satpas online; b. penggelaran sistem STNK online; c. penggelaran sistem BPKB online; 6. Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/ pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial; 7. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa; 8. Meningkatkan kemampuan personel Polda Sultra dan satuan dan sarana prasarana; 9. Menyusun rencana kontinjensi; 10. Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran;	<b>RM PNBP</b>	

Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Ket
	<p>11. Meningkatkan integritas anggota Polda Sultra dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri;</p> <p>12. Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;</p> <p>13. Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu;</p> <p>14. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengembangan fungsi pengawasan;</p> <p>15. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Sultra melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;</p> <p>16. Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara <i>online</i>.</p>		

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Polda Sultra Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polda Sultra, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Polda Sultra dalam mendukung Renstra Polri. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direview secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis dan arah bijak Polda Sultra. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polda Sultra sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polda Sultra Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban wilayah dapat terpelihara.

#### 1. **Kaedah Pelaksana**

- a. mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan negara (Polisi) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
- c. mengedepankan strategi *community policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan Kementerian, lembaga serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

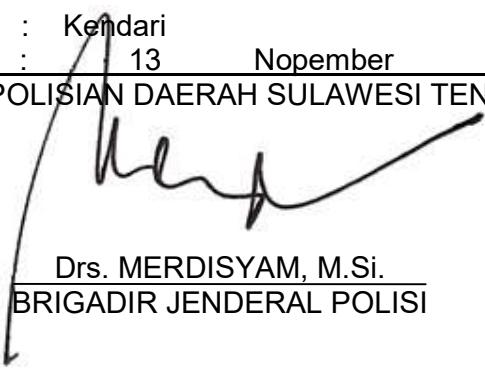
#### 2. **Autentifikasi dan Distribusi**

- a. autentifikasi Renstra Polda Sultra berikut merupakan jabatan dari Renstra Polri, yang telah disahkan oleh Kapolda Sultra sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

b. distribusi .....

- b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satker untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Kendari  
pada tanggal : 13 Nopember 2019  
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

  
Drs. MERDISYAM, M.Si.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**PENANGGUNG JAWAB PROGRAM, KEGIATAN DAN RENAKSI  
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI**

NO	KEBIJAKAN UTAMA (BIDANG)	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNGJAWAB RENAKSI
I.	<b>TRANSFORMASI ORGANISASI (TRANSFORMING ORGANIZATION)</b>	1. Penataan Kelembagaan <b>KARORENA</b>	01.Penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri. <b>KARORENA</b>	001. Pemenuhan 1 (satu) kecamatan 1 (satu) polsek secara bertahap. 002. Mengubah kewenangan Polsek pada daerah tertentu hanya untuk harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan). 003. Merestrukturisasi organisasi Polres sesuai dengan situasi kamtibmas dan kondisi wilayah tugasnya.	<b>KARORENA</b>
		2. Pengembangan organisasi Polri struktur <b>KARORENA</b>		004. Mengembangkan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Polri yang berorientasi tantangan tugas ke depan (siber dan intelijen). 005. Menata Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) di seluruh fungsi Polri yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat (pelayanan satu atap, sistem pengaduan terpadu, dan sistem pengawasan terpadu).	<b>KARORENA</b>
		02. Perubahan Sistem Dan Metode Organisasi <b>KAROOPS</b>	03. Penyempurnaan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur kepolisian yang PRESISI berbasis data dan teknologi informasi. <b>KAROOPS</b>	006. Menyempurnakan pedoman dan Standar Operasional Prosedur kegiatan Polri yang berorientasi pada pelayanan.	<b>KAROOPS, KABIDKUM DAN SATKER YANLIK</b>
		03. Menjadikan SDM Polri yang <b>KARO SDM</b>	04. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri <b>KARO SDM</b>	007. Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Kepolisian disusun berbasis data dan teknologi informasi (TI) yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel).  008. Rekrutmen Polri berdasarkan kebutuhan organisasi berbasis teknologi informasi (TI).	<b>KABID TIK</b>
					<b>KARO SDM</b>

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
		Unggul di era <i>police 4.0</i>		009. Pemantapan program rekrutmen proaktif dalam proses rekrutmen Polri ( <i>affirmative action, talent scouting, dan reward</i> ). 010. Mengalokasikan rekrutmen ASN Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus sesuai kebutuhan. 011. Peningkatan kemampuan SDM Polri dalam penguasaan Teknologi Informasi (TI). 012. Rekrutmen Tenaga Ahli dengan perjanjian kerja dalam rangka mendukung perubahan dalam level eselon tertentu sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan. 013. Penataan kurikulum pada pendidikan pembentukan, pengembangan spesialisasi, dan pengembangan umum. 014. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan menuju pendidikan berkelas dunia ( <i>world class standard</i> ). 015. Pemenuhan jumlah personel Polri sesuai kebutuhan prioritas berdasarkan demografi dan karakteristik kerawanan daerah (daerah konflik, Densus 88 AT, dll). 016. Peningkatan keterampilan (skill) bhabinkamtibmas dalam berkomunikasi dan pemanfaatan teknologi. 017. Memenuhi satu desa/kelurahan, satu bhabinkamtibmas secara bertahap dan menyelenggarakan pendidikan SIP khusus bhabinkamtibmas.	KARO SDM
		05. Peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja.	KARO SDM	018. Menerapkan merit sistem dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama untuk berkarya. 019. Memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas	KARO SDM

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
				<p>kepada Polwan untuk menjadi pimpinan dan di bidang operasional.</p> <p>020. Pemberlakukan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah.</p> <p>021. Menyiapkan Pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani, dan transformatif pada semua tingkatan.</p> <p>022. Menyempurnakan program manajemen talenta dalam rangka menjadikan SDM Polri yang memiliki spesialisasi.</p> <p>023. Meningkatkan sistem <i>reward and punishment</i> terhadap kualifikasi personel Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan bermasyarakat.</p>	KARO SDM
			<p>06. Perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri.</p> <p><b>KARO SDM</b></p>	<p>024. Meningkatkan kerja sama di dalam dan luar negeri pada pendidikan dan pelatihan anggota Polri.</p> <p>025. Bekerja sama dengan kementerian dan lembaga serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi pada lembaga pendidikan dan pelatihan Polri</p>	KARO SDM
			<p>07. Pengelolaan SDM yang humanis.</p> <p><b>KARO SDM</b></p>	<p>026. Internalisasi nilai-nilai etika dalam membangun kultur Polri yang melayani dan dekat dengan masyarakat.</p> <p>027. Mengembangkan hubungan kerja atasan dan bawahan yang berorientasi nilai-nilai Tribbrata dan Catur Prasetya.</p> <p>028. Percepatan pembentukan mental dan karakter personel Polri yang berbudaya dan menghormati Hak Asasi Manusia.</p>	KARO SDM

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
			08. Peningkatan kesejahteraan pegawai Polri <b>KARO SDM</b>	029. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi anggota secara bertahap (Asabri, Kementerian PUPR). 030. Tata kelola anggaran diarahkan untuk mendukung kesejahteraan (kesehatan, dll). 031. Pemenuhan kesejahteraan personel Polri dan masyarakat melalui peningkatan pelayanan bidang kesehatan di Rumah Sakit Polri. 032. Akselerasi pemenuhan hak pelayanan kesejahteraan pegawai pada Polri.	<b>KARO SDM</b> <b>KABIDDOKKES</b> <b>KARO SDM</b>
	04. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di era <i>Police 4.0</i> <b>KABID TIK</b>	09. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi. <b>KABID TIK</b>		033. Modernisasi teknologi kepolisian dengan mengutamakan produk dalam negeri. 034. Pembentukan Sistem Informasi Kepolisian yang terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Polri. 035. Revitalisasi <i>Command Center</i> dalam satu sistem informasi terintegrasi, termasuk mendorong terbentuknya regulasi yang wajibkan pemasangan CCTV pada instansi Pemerintah, Swasta, dan masyarakat agar terkoneksi dan terintegrasi. 036. Menata kembali layanan darurat/ <i>hotline</i> kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat.	<b>KABID TIK</b>
		10. Pemenuhan sarana dan prasarana Polri <b>KAROLOG</b>		037. Penyiapan dukungan peralatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri sesuai kebutuhan (daerah konflik, bencana, dan wilayah dengan karakteristik khusus).	<b>KAROLOG</b>

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
				038. Pengadaan sarana, prasarana, dan peralatan secara transparan, berkualitas, dan sesuai kebutuhan. 039. Membangun infrastruktur dan sistem teknologi kecerdasan buatan ( <i>artificial intelligence</i> ) untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi. 040. Membangun sarana prasarana yang berorientasi pada HAM dan kelompok rentan (perempuan, anak, dan berkebutuhan khusus).	KAROLOG
			11. Menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian. <b>KARORENA</b>	041. Pengembangan teknologi kepolisian berdasarkan hasil penelitian. 042. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian. 043. Mengintegrasikan hasil riset lembaga penelitian di lingkungan Polri dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.	KARORENA
II.	<b>TRANSFORMASI OPERASIONAL (TRANSFORMING OPERATION)</b>	05. Pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas  <b>DIRINTELKAM</b>	12. Pemeliharaan kamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif.  <b>DIRINTELKAM</b>	044. Meningkatkan deteksi aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual yang mampu memberikan pemetaan situasi kamtibmas. 045. Memelihara kamtibmas dengan memanfaatkan teknologi informasi. 046. Memantapkan interaksi dengan pemangku kepentingan yang berorientasi partisipasi dan <i>problem solving</i> . 047. Melibatkan para ahli dalam upaya preemptif dan preventif. 048. Memastikan kualitas kehadiran Polri di tengah masyarakat termasuk pada lokasi prioritas (lokpri), pos lintas batas negara (PLBN), pulau dan daerah terluar dan terdepan.	DIRBINMAS

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
				049. Mengedepankan edukasi daripada penindakan dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcar lantas). 050. Mendukung dan mengawal pengembangan sektor pariwisata, investasi, inovasi dan ekonomi kreatif serta ekosistem ekonomi. 051. Mengoptimalkan program-program unggulan pemolisian masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal (kampung tangguh, kampung siaga, kampung bebas narkoba, kampung sehat, kampung aman, kampung asuh, kampung wisata, dll).	DIRLANTAS
			13. Penguatan partisipasi masyarakat dalam skema masyarakat informasi di ruang siber ( <i>Society 5.0</i> ).  <b>DIRRESKRIMSUS</b>	052. Mengoptimalkan kampanye siber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data pribadi dan budaya etika bermedia sosial tanpa menutup ruang kreativitas. 053. Menghadirkan polisi dunia maya ( <i>virtual police</i> ) yang mampu memberikan edukasi bagi masyarakat daring.	DIRRESKRIMSUS DAN KABIDHUMAS
			14. Penguatan Bhabinkamtibmas dengan penerapan “ <i>personal smart tools</i> ”  <b>DIRBINMAS</b>	054. Revitalisasi <i>Binmas Online System</i> . 055. Menjadikan bhabinkamtibmas sebagai sahabat dan pusat informasi bagi masyarakat desa.	DIRBINMAS
			15. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pengarusutamaan moderasi beragama dalam memperkokoh NKRI.  <b>DIRINTELKAM</b>	056. Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dalam rangka menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara. 057. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila.	DIRINTELKAM

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
				<p>058. Memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat untuk beribadah dengan mengedepankan peran aktif masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan.</p> <p>059. Melibatkan para ahli dan <i>civil society</i> dalam upaya pencegahan dan penanganan intoleransi dan radikalisme.</p>	DIRINTELKAM
		16. Pemeliharaan kamtibmas dari bahaya terorisme  DIRINTELKAM		<p>060. Menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik sektarian yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme.</p> <p>061. Meningkatkan kegiatan dengan mengedepankan pendekatan lunak (<i>soft approach</i>) terhadap terorisme.</p> <p>062. Mengoptimalkan kerjasama dengan BNPT dalam menjalankan program kontra radikalisasi, kontra ideologi, kontra propaganda, dan moderasi beragama.</p> <p>063. Patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris.</p> <p>064. Meningkatkan peran <i>civil society</i> dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme.</p> <p>065. Melakukan Pembinaan masyarakat (bagi pelaku, keluarga pelaku dan lingkungan pelaku) dengan sasaran kesejahteraan, psikososial dan doktrin yang dilakukan secara berkelanjutan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya.</p>	DIRINTELKAM

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
			<p>17. Pemeliharaan kamtibmas dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).</p> <p style="text-align: center;"><b>DIRINTELKAM</b></p>	<p>066. Meningkatkan sistem deteksi terhadap dinamika kegiatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) secara sistematis yang berkelanjutan.</p> <p>067. Transformasi pemecahan masalah dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal melalui Binmas pionir.</p> <p>068. Setiap kebijakan yang diterapkan berorientasi kepada masyarakat dan mendapat legitimasi publik.</p> <p>069. Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan (<i>desk</i>) dalam menghadapi propaganda KKB.</p>	DIRINTELKAM
			<p>18. Menjamin keamanan agenda Nasional Internasional yang dilaksanakan di Indonesia.</p> <p style="text-align: center;"><b>KAROOPS</b></p>	<p>070. Menjamin keamanan dan netralitas Polri pelaksanaan Pemilu 2024.</p> <p>071. Mengamankan kegiatan PON ke-XX.</p> <p>072. Menjamin keamanan pelaksanaan MTQ di</p> <p>073. Mengamankan event internasional (Piala dunia U-20, <i>Superbike, Formula E</i>, dll.)</p>	KAROOPS
			<p>19. Peningkatan sinergisitas dan kolaborasi dengan TNI</p> <p style="text-align: center;"><b>KAROOPS</b></p>	<p>074. Memantapkan sinergisitas antara TNI-Polri melalui peningkatan kolaborasi kegiatan harkamtibmas sejak dulu.</p>	KAROOPS, DANSATBRIMOB, DITPOLAIRUD DAN DIRSAMAPTA

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
			075. Meningkatkan sinergisitas melalui kegiatan pendidikan pembentukan dan pengembangan terintegrasi pada level pimpinan. 076. Meningkatkan sinergisitas melalui kegiatan pelatihan terintegrasi pada level pelaksana. 077. Meningkatkan sinergisitas melalui pengembangan nilai-nilai tradisi integrasi melalui kegiatan inovatif.  20. Peningkatan sinergisitas dan kolaborasi antar lembaga.  <b>DIRPAMOBVIT</b>	078. Memantapkan sinergisitas Polri dan pemangku kepentingan yang ada di masyarakat dalam mendukung tugas Polri.	<b>KAROOPS, DANSATBRIMOB, DITPOLAIRUD DAN DIRSAMAPTA</b>  <b>DIRPAMOBVIT</b>
			21.Peningkatan peran pamswakarsa  <b>DIRBINMAS</b>	079. Mem-peran-aktifkan pamswakarsa sebagai garda terdepan harkamtibmas di lingkungan/wilayah kerjanya.  080. Memantapkan pembinaan pamswakarsa dalam mewujudkan harkamtibmas.	  <b>DIRBINMAS</b>
			22. Pengembangan kerjasama Internasional  <b>KAROOPS</b>	081. Meningkatkan kerjasama internasional dibidang harkamtibmas dan pengamanan batas wilayah. 082. Kerjasama internasional yang lebih mengutamakan upaya pencegahan kejahatan transnasional. 083. Meningkatkan peran Polri dalam misi perdamaian, misi kemanusiaan internasional, dan misi internasional lainnya.	  <b>KAROOPS</b>
	06.Peningkatan kinerja penegakan hukum.  <b>DIRRESKRIMUM</b>	23.Proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.  <b>DIRRESKRIMUM</b>	084. Mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui <i>restorative justice</i> yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan.		<b>DIRRESKRIMUM DAN DIRRESKRIMSUS</b>

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
				085. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang mengutamakan pencegahan dan pemulihan kerugian negara ( <i>asset recovery</i> ). 086. Meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan) 087. Meningkatkan penegakan hukum kejahatan jalanan ( <i>street crime</i> ) yang meresahkan masyarakat. 088. Penanganan kejahatan pada ruang siber ( <i>cyber crime</i> ) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat. 089. Memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional. 090. Mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik. 091. Penegakkan hukum di bidang lalu lintas berbasis elektronik (ETLE) guna meminimalisir penyimpangan. 092. Meningkatkan kerja sama dengan <i>Criminal Justice System</i> dan aparat penegak hukum (APH) lainnya ( <i>joint investigation</i> , tukar menuar informasi, gelar perkara dan dukungan sarana prasarana). 093. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi penyidik melalui sertifikasi penyidik. 094. Melaksanakan penegakan hukum tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.	DIRRESKRIMSUS  DIRRESKRIMUM  DIRRESKRIMSUS  DIRRESKRIMUM, DIRRESKRIMSUS DAN DIRRESNARKOBA  DITLANTAS  DIRRESKRIMUM, DIRRESKRIMSUS DAN DIRRESNARKOBA  DIRRESKRIMUM,

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
				095. Transformasi sistem penahanan terhadap tersangka kasus terorisme menjadi sarana re-edukasi (pendidikan pesantren selama dalam masa penahanan). 096. Meningkatkan jumlah penyidik fungsional dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara. 097. Mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan dan transparansi. 098. Penegakan hukum yang berorientasi kepada gender dan kelompok rentan.	DIRRESKRIMUM
			24. Pengembangan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas)  DIRRESKRIMSUS	099. Pembentukan database kriminalitas melalui Sistem Informasi Kriminal Terintegrasi ( <i>Integrated Smart Criminal Information System</i> ). 100. Mengintegrasikan <i>database</i> kriminalitas dari seluruh satker dilingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya.	DIRRESKRIMUM, DIRRESKRIMSUS DAN DIRRESNARKOBA
	07. Pemantapan dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19 (PC).	25. Meningkatkan kegiatan kepolisian dalam penanganan Covid-19  DIRSAMAPTA		101. Mengembangkan program Kampung tangguh di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan pemangku kepentingan. 102. Menegakan hukum yang tegas dan proporsional terhadap setiap pelanggar protokol kesehatan. 103. Mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan.	DIRBINMAS
	KABIDDOK KES	26. Menguatkan peran polri dalam satuan tugas penanganan Covid-19.  KABIDDOKKES		104. Menggerakkan seluruh sumber daya Polri dalam membantu pemerintah menanggulangi Covid-19. 105. Menggerakkan seluruh sumber daya Polri dalam mendukung program vaksinasi nasional.	KAROOPS DAN KABIDDOKKES

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
		08. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  DIRRESKRIMSUS	27. Daya dukung Polri terhadap upaya mengembalikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.  DIRRESKRIMSUS	106. Menjamin program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional agar terlaksana dengan baik di masyarakat. 107. Melakukan pendampingan dan pengawasan untuk memastikan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dapat terlaksana dengan benar, tepat sasaran, dan akuntabel. 108. Berperan aktif memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. 109. Menjamin keamanan kebijakan fiskal, moneter, dan investasi.	DIRRESKRIMSUS
			28. Menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai dampak terjadinya Covid- 19.  DIRRESKRIMSUS	110. Berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan 111. Melakukan komunikasi dengan serikat pekerja guna menjaga stabilitas keamanan 112. Pemetaan kerawanan kamtibmas guna mencegah terjadinya tindak pidana.	DIRINTELKAM
		09. Menjamin keamanan program Prioritas Nasional  DIRPAMOBVIT	29. Mempersiapkan infrastruktur dan sumberdaya manusia Polri yang dapat mendukung program prioritas nasional  KAROLOG	113. Menyusun perencanaan kebutuhan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia Polri dalam mendukung program prioritas nasional. 114. Menetapkan metode untuk pengamanan dan pengawalan yang lebih terpadu setiap program prioritas nasional berdasarkan kebutuhan dan riset. 115. Menyiapkan sarana prasarana yang tepat sesuai kebutuhan program prioritas Nasional.	KAROLOG DAN KARO SDM  DIRPAMOBVIT  KAROLOG

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
			<p>30. Melaksanakan Pengamanan program prioritas nasional <b>DIRRESKRIMSUS</b></p> <p>31. Melakukan evaluasi Sistem pengamanan yang dapat menjamin program prioritas nasional <b>DIRPAMOBVIT</b></p>	<p>116. Memastikan keamanan dalam pengembangan wilayah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Negara (IKN).</p> <p>117. Mengawal pengamanan pembangunan <i>Science Techno Park</i> guna peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.</p> <p>118. Menjamin pengamanan dalam penguatan Sistem Kesehatan Nasional.</p> <p>119. Melaksanakan pengamanan pada lokasi-lokasi pembangunan Pipa gas bumi trans Kalimantan.</p> <p>120. Melaksanakan pengamanan terhadap 10 lokasi destinasi pariwisata sebagai bentuk penguatan ketahanan ekonomi.</p> <p>121. Menjamin keamanan pada lokasi pembangunan dan pengembangan kilang minyak.</p> <p>122. Menjamin keamanan pada daerah pembangunan infrastruktur pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi 19.000 KMS dan gardu Induk 38.000 MVA.</p> <p>123. Memastikan pengamanan pada lokasi yang terdampak pasca bencana dalam rangka pemulihan wilayah untuk mengurangi kesenjangan serta menjamin pemerataan.</p> <p>124. Menjamin keamanan dalam rangka penguatan pengembangan jaringan pelabuhan utama terpadu.</p> <p>125. Melaksanakan pengamanan pada jalur pembangunan Jalan Tol.</p> <p>126. Mengevaluasi sistem pengamanan pada seluruh program prioritas Nasional.</p> <p>127. Menyusun pedoman dan SOP pengamanan pada program prioritas Nasional.</p>	<p><b>DIRSAMAPTA</b></p> <p><b>DIRSAMAPTA DAN KABIDDOKKES</b></p> <p><b>DIRPAMOBVIT DAN DIRPOLAIRUD</b></p> <p><b>DIRPAMOBVIT</b></p> <p><b>DANSATBRIMOB</b></p> <p><b>DIRPAMOBVIT</b></p> <p><b>DIRPAMOBVIT</b></p>

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
				128. Mengevaluasi metode pendampingan dan pengawalan program prioritas nasional berdasarkan hasil riset dan kebutuhan.	DIRPAMOBVIT
			32. Penanganan bencana alam <b>KAROOPS</b>	129. Peningkatan anggaran kontijensi dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan daerah rawan bencana.	<b>KAROOPS</b>
		10. Penguatan Penanganan Konflik Sosial  <b>KAROOPS</b>	33. Penanganan konflik perebutan sumber daya (ekonomi).  <b>DIRINTELKAM</b>	130. Memanfaatkan hasil pemetaan potensi konflik untuk mencegah terjadinya konflik.	<b>DIRINTELKAM</b>
			34. Penanganan konflik unsur SARA, sosial, budaya dan ideologi.  <b>DIRINTELKAM</b>	131. Menyelesaikan akar permasalahan berdasarkan pemetaan konflik bersama pemangku kepentingan dengan melibatkan ahli dan masyarakat.	<b>DIRINTELKAM</b>
			35. Penanganan konflik perebutan pengaruh (politik).  <b>DIRINTELKAM</b>	132. Menjamin proses penanganan konflik yang menimbulkan rasa aman.	<b>DIRINTELKAM</b>
			36. Penanganan konflik berlatar belakang lainnya.  <b>DIRINTELKAM</b>	133. Meningkatkan jumlah personel khususnya brimob dan sabhara berdasarkan pemetaan potensi konflik dan dilengkapi peralatan pendukung. 134. Peningkatan anggaran kontijensi dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan pada daerah perbatasan, daerah terluar rawan konflik dan potensi ancaman nasional.	<b>DANSATBRIMOB</b>
III.	<b>TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK (TRANSFORMING PUBLIC SERVICE)</b>	11. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Polri.  <b>DIRLANTAS</b>	37. Modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik.  <b>DIRLANTAS</b>	135. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan public yang mudah diakses masyarakat ( <i>online</i> ). 136. Meningkatkan metode pelayanan publik yang mudah, cepat dan nyaman. 137. Meningkatkan kualitas SDM yang melayani	<b>DIRLANTAS</b>

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
			<p>38. Penguatan standarisasi sistem manajemen mutu dan kontrol di semua sentra pelayanan publik. <b>DIRLANTAS</b></p> <p>39. Peningkatan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh sentra pelayanan publik. <b>KARORENA</b></p> <p>40. Pembuatan pelayanan <i>online</i> dan <i>delivery service system</i> layanan kepolisian <b>DIRLANTAS</b></p> <p>12. Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. <b>KABID TIK</b></p>	<p>138. Memetakan (<i>mapping</i>) terhadap permasalahan strategis terkait pelayanan publik.</p> <p>139. Menetapkan standarisasi dan penyederhanaan regulasi pelayanan pada sentra pelayanan publik.</p> <p>140. Mengusulkan dan mendorong satfung dan satwil yang belum berstatus WBK menjadi WBK dan yang berstatus WBK menjadi WBBM.</p> <p>141. Membentuk layanan <i>drive thru</i> untuk pembuatan surat kehilangan, SKCK, perpanjangan SIM, Samsat, dll.</p> <p>142. Pelaksanaan pelayanan SIM yang memudahkan masyarakat kapanpun dan dimanapun.</p> <p>143. Membentuk layanan jasa pengantaran (<i>delivery service</i>) ke alamat pemohon atau masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>144. Membentuk pelayanan berbasis TI (<i>online</i>) yang mudah diakses oleh masyarakat.</p> <p>145. Membangun sinergisitas dan interkoneksi seluruh fungsi kepolisian ke dalam satu <i>cetak biru</i> program pelayanan publik.</p> <p>146. Menyatukan seluruh pintu pelayanan publik ke dalam satu atap pada setiap tingkatan satuan kewilayahan.</p> <p>147. Bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka memudahkan pelayanan masyarakat.</p>	<p><b>DIRLANTAS</b></p> <p><b>KARORENA</b></p> <p><b>DIRLANTAS DAN DIRINTELKAM</b></p> <p><b>DIRLANTAS</b></p> <p><b>DIRLANTAS DAN KABID TIK</b></p> <p><b>KABID TIK</b></p> <p><b>SPKT</b></p> <p><b>DITLANTAS</b></p>

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
			<p>42. Peningkatan integrasi teknologi dan komunikasi dengan media untuk akses layanan, informasi, pengaduan, dan partisipasi masyarakat.</p> <p><b>KABIDHUMAS</b></p>	<p>148. Meningkatkan kerja sama Polri dan media terkait akses layanan publik.</p> <p>149. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian layanan kepolisian melalui akses integrasi informasi dan komunikasi.</p> <p>150. Membuka ruang pengaduan terhadap pelayanan publik pada Polri yang terintegrasi.</p>	<b>KABIDHUMAS</b>
	13. Pemantapan Komuniasi Publik.	<p><b>KABIDHUMAS</b></p>	<p>43. Penguatan sistem komunikasi publik.</p> <p><b>KABIDHUMAS</b></p>	<p>151. Mengelola input sumber pemberitaan Polri secara berjenjang dari tingkat polres hingga Mabes Polri, guna mendapat proporsi pemberitaan yang baik dan berimbang.</p> <p>152. Menguatkan fungsi <i>content creative, content writer, dan media relation</i> guna mengelola kegiatan kepolisian yang mengandung nilai kepahlawanan yang tinggi.</p> <p>153. Meningkatkan kapasitas anggota Polri serta sarana dan prasarana komunikasi publik.</p>	<b>KABIDHUMAS</b>
			<p>44. Layanan hubungan media.</p> <p><b>KABIDHUMAS</b></p>	<p>154. Menguatkan fungsi Humas Polri untuk menjalin kerja sama yang baik dengan media.</p> <p>155. Meningkatkan hubungan dengan insan pers/pewarta yang mengedepankan sinergisitas dalam pembuatan konten positif baik mengenai Polri maupun dalam rangka pemeliharaan kamtibmas.</p> <p>156. Optimalisasi <i>platform</i> media sosial Polri untuk memastikan informasi Polri sampai ke seluruh pelosok Indonesia.</p>	<b>KABIDHUMAS</b>

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI	
			45. Penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik. <b>KABIDHUMAS</b>	157. Meningkatkan pelatihan media untuk pengembangan fungsi Humas dalam rangka penguatan publikasi Polri. 158. Kerjasama penguatan kapasitas personel pengembangan fungsi Humas. 159. Menguatkan Media Center sebagai <i>media hub</i> bagi insan media yang melakukan peliputan di instansi Polri.	<b>KABIDHUMAS</b>	
			46. Kemitraan dengan berbagai pihak. <b>DIRINTELKAM</b>	160. Membangun kemitraan dengan instansi, tokoh agama, tokoh masyarakat, <i>patron hand, public figure</i> dengan narasi yang berbasis data dan fakta. 161. Meningkatkan partisipasi tokoh berpengaruh ( <i>endorsement opinion leader</i> ) untuk membangun citra positif Polri.	<b>DIRINTELKAM</b>	
IV.	<b>TRANSFORMASI PENGAWASAN (TRANSFORMING SUPERVISION)</b>	<b>KABIDPROPAM</b>	14. Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan	47. Penguatan peran pimpinan <b>KABIDPROPAM</b>	162. Melaksanakan pengawasan secara langsung kepada anggota baik dalam hal kedinasan maupun non-kedinasan. 163. Membangun sistem pengawasan pimpinan berbasis teknologi informasi. 164. Memberlakukan <i>punishment</i> secara tegas terhadap pimpinan yang lalai mengawasi anggota	<b>KABIDPROPAM</b>
			15. Penguatan fungsi pengawasan	48. Sistem pengawasan Internal <b>KABIDPROPAM</b>	165. Mendorong kepatuhan pengisian LHKPN bagi anggota yang berkewajiban. 166. Membentuk HTCK antar fungsi pengawas agar tidak tumpang tindih dan menyulitkan masyarakat. 167. Membangun pelayanan pengaduan terpadu fungsi pengawas. 168. Optimalisasi mekanisme pengawasan secara proporsional, transparan dan akuntabel yang dapat dilaksanakan anggota. 169. Mengoptimalkan satgas saber punjli di lingkungan internal Polri.	<b>IRWASDA</b> <b>KABIDPROPAM</b>

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
			<p>49. Sistem pengawasan eksternal <b>IRWASDA</b></p> <p>50. Sistem pengaduan online terintegrasi dengan fungsi pengawasan lainnya <b>IRWASDA</b></p>	<p>170. Melakukan penguatan sistem pengawasan melalui kerja sama dengan pihak eksternal.</p> <p>171. Mengkomunikasikan secara proaktif isu-isu yang menjadi perhatian publik kepada pengawas eksternal.</p> <p>172. Memperkuat koordinasi dengan pengawas eksternal dalam menyelesaikan pengaduan secara tuntas.</p> <p>173. Bersama dengan pengawas eksternal mencari akar permasalahan penyimpangan anggota dalam rangka pencegahan.</p> <p>174. Menguatkan sinergisitas bersama Kementerian dan lembaga terkait dalam rangka terwujudnya sistem laporan pengaduan/komplain masyarakat secara terpadu dan transparan (Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, dll.)</p> <p>175. Membangun sistem pengawasan <i>online</i> secara terpadu dan terintegrasi berbasis teknologi dan informasi.</p>	<b>IRWASDA</b>
					<b>KABID TIK</b>

NO	KEBIJAKAN UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	RENAKSI	PENANGGUNG JAWAB RENAKSI
	16. Pengawasan oleh masyarakat ( <i>Public Complaint</i> )  IRWASDA	51.Pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat yang cepat dan mudah  IRWASDA		<p>176. Menyediakan sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan pelayanan kepolsian (<i>online</i>) dan dengan disertai indikator penyelesaian masalah.</p> <p>177. Membuka ruang saran masukan dari masyarakat sebagai sistem pengawasan eksternal Polri di setiap Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu.</p>	KABID TIK

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA



**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN POLDA SULTRA**  
**TAHUN 2020-2024**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
023	KEPOLISIAN DAERAH SULTRA							860,232,563	877,968,633	922,199,506	955,237,967	990,046,141	
		1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat						217,640,054	209,781,416	225,691,081	229,959,878	234,356,740	
		- Indeks Harkamtibmas	77.70	75.80	73.60	71.80	69.50						
		2. Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan						67,246,017	68,000,688	69,016,172	69,276,489	69,539,410	
		- Indeks Gakkum	82.20	82.40	82.00	82.60	82.50						
		3. Profesionalisme SDM						21,637,023	21,659,344	21,769,551	21,880,860	21,993,282	
		- Indeks Profesionalitas SDM Polri	53.20	54.80	55.20	57.70	59.50						
		- Indeks Kompetensi Diklat Polri	90.80	91.50	91.60	91.00	91.90						
		4. Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif						419,544,830	443,172,638	469,398,820	496,817,829	525,864,980	
		- Nilai SAKIP	76.20	77.30	78.45	79.50	80.20						
		- Nilai Reformasi Birokrasi	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00						
		- Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	76.80	77.80	80.10	81.20	82.10						
		- Nilai kinerja Anggaran	92.00	92.00	92.00	93.00	93.00						
		- Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	93.00	93.00	94.00	94.00	95.00						
01	dukungan manajemen							419,544,830	443,172,638	469,398,820	496,817,829	525,864,980	
		Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan Internal dan pembayaran gaji yang di laksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Kewilayahan											
		a. Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis	6	6	6	8	9						
		b. % kebijakan yang berpihak pada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%						
		c. Jumlah aparatur yang dikelola pengembangan karirnya yang diberikan penghargaan/sanksi sesuai kinerjanya											
		d. % perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu	90%	92%	92%	95%	95%						
		e. % pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%						
		f. % unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel	99%	99%	99%	99%	99%						
		g. % peraturan Kapolri yang selaras di tingkat Mabes dan Kewilayahannya.											
		h. % kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan Internal	79%	80%	82%	85%	87%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri							209,500	209,500	209,500	209,500	209,500	
		Terlaksananya pengelolaan keuangan secara terpadu											
		% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	65%	72%	80%	88%	96%						
3070	Penerangan Masyarakat							1,169,580	1,169,580	1,169,580	1,169,580	1,169,580	
		Terlaksannya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat											
		Jumlah kegiatan penyampaian informasi publik	95%	95%	95%	95%	95%						
3071	Penyelenggaraan Teknologi Informasi							27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
		Terlaksananya Teknologi Informasi											
		persentase Layanan Teknologi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%						
3072	Pelayanan Kesehatan Polri							30,683,574	32,376,827	33,995,668	35,695,452	37,480,224	
		Tersedianya pelayanan kesehatan bagi personel/Keluarga Polri											
		Pelayanan Kesehatan bagi anggota/PNS polri dan keluarganya antara lain :											
		a. Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi personel dan keluarga Polri	75%	75%	75%	75%	75%						
		b. Kegiatan Promotif dan Preventif	2	2	2	2	2						
		c. Kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif	2	2	2	2	2						
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri							382,111,848	404,390,322	428,653,741	454,372,966	481,635,344	
		Meningkatkan kualitas pelayanan internal											
		Jumlah Layanan Internal Perkantoran Polri	12 BLN										
3149	Pengelolaan Multimedia							25,489	25,489	25,489	25,489	25,489	
		terlaksananya pengelolaan multimedia											
		Jumlah produk laporan multimedia	93%	93%	93%	93%	93%						
5053	Reformasi Birokrasi Polri							417,760	417,760	417,760	417,760	417,760	
		Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Polri											
		Nilai Reformasi Birokrasi Polri	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00						
5054	Manajemen Anggaran							740,854	740,854	740,854	740,854	740,854	
		Tersusunnya Manajemen Anggaran Polri											
		Persentase Dokumen Manajemen Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%						
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi							56,200	48,500	56,200	56,200	56,200	
		Tersedianya layanan produk data kepolisian secara elektronik											
		Jumlah paket produk pengolahan data kepolisian	95%	95%	95%	95%	95%						
3088	Pertanggungjawaban Profesi							467,653	467,653	467,653	467,653	467,653	
		Terwujudnya pemuliaan profesi anggota Polri											
		Persentase penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Polri	95%	95%	95%	95%	95%						
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri							421,983	421,983	421,983	421,983	421,983	
		Terpeliharnya keamanan internal Polri											
		Persentase penyelesaian jumlah penyelidikan	75%	75%	75%	75%	75%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri							378,934	277,654	378,934	378,934	378,934	
		Terselenggaranya tata tertib dan Disiplin Polri											
		Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin	95%	95%	95%	95%	95%						
3091	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan							2,063,435	1,828,495	2,063,435	2,063,435	2,063,435	
		Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan terhadap organisasi Polri sesuai dengan ketentuan berlaku											
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi objek Wasrik	37	37	37	37	37						
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum							549,000	549,000	549,000	549,000	549,000	
		Terselenggaranya bantuan dan Nasehat Hukum											
		Jumlah bantuan dan Nasehat Hukum	55	55	55	55	55						
3155	Penyusunan dan Penyuluhan Hukum							220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
		Terlaksananya penyusunan peraturan Hukum											
		Jumlah Dokumen Penyusunan Peraturan Hukum.	1	1	2	2	2						
		Terlaksananya penyuluhan hukum											
		Jumlah kegiatan penyuluhan hukum	3	3	3	3	3						
XXXX	Monitoring dan Evaluasi (Usulan Giat Baru)												
<b>02</b>	<b>MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA POLRI</b>							<b>134,164,639</b>	<b>135,354,547</b>	<b>136,323,882</b>	<b>137,302,911</b>	<b>138,291,729</b>	
		Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.											
		Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.	30,53%	38,62%	57,8%	78,34%	100%						
3084	Pengembangan Peralatan Polri							6,816,748	6,816,748	6,816,748	6,816,748	6,816,748	
		Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan											
		persentase penambahan Almatsus Polri dibandingkan tahun sebelumnya (SIMAK-BMN)	72%	77%	82%	87%	92%						
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras							95,743,604	96,933,512	97,902,847	98,881,876	99,870,694	
		Meningkatkan kualitas pelayanan internal Sarpras											
		Jumlah Layanan perkantoran Sarpras	12 bln										
5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri							31,604,287	31,604,287	31,604,287	31,604,287	31,604,287	
		Terdukungnya Fasilitas dan Kontruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri											
		Persentase ketersediaan Fasilitas dan Kontruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri dibandingkan tahun sebelumnya	31,67%	33,25%	34,92%	36,66%	38,49%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
xxxx	Pengadaan Polri (Usulan Giat Baru)												
3	PROFESIONALISME SDM POLRI							21,637,023	21,659,344	21,769,551	21,880,860	21,993,282	
		Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional proposional.											
		a. Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan Diklat Polri yang memenuhi standar kompetensi melalui uji kompetensi	22	26	32	40	49						
		Memberdayakan SDM Polri di bidang rekrutmen, pembinaan karier,perawatan personel hingga pengakhiran dinas secara proposisional sesuai standar kompetensi.											
		a. Jml pengembangan kekuatan SDM Polri sesuai Analisa Beban Kerja Polri.	7107	7358	7609	7860	8111						
		b. Berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri	1,5%	2%	2,5%	3%	4%						
3097	Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri												
		Terlaksananya Pendidikan Sespimma Polri											
		Jumlah Peserta Pendidikan Sespimma Polri											
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri							7,926,830	7,926,830	7,926,830	7,926,830	7,926,830	
		Mencetak personel kompeten Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi menuju civilian police											
		Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Polri	1325 pers										
3103	Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri							10,998,279	11,020,599	11,130,805	11,242,113	11,354,534	
		Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis SDM Polri											
		Jumlah Layanan Perkantoran SDM	12 bln										
3105	Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri							201,636	201,636	201,636	201,636	201,636	
		Terlaksananya Perawatan Pegawai Polri											
		Jumlah Layanan hak dan Perawatan Pegawai Polri	7107	7358	7609	7860	8111						
3107	Pengendalian Pegawai Polri							2,162,611	2,162,611	2,162,611	2,162,611	2,162,611	
		Menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri											
		a. Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri	251	251	251	251	251						
		b. Jumlah personel Polri yang mengikuti Pendidikan Pengembangan	64	64	64	64	64						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAHKAKA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3108	Pembinaan Karier Personel Polri	Menyelenggarakan Rekrutmen jabatan terbuka sesuai kompetensi dilingkungan Polri.						167,647	167,647	167,647	167,647	167,647	
		Jumlah Seleksi Jabatan yang transparan dan akuntabel	56	56	56	56	56						
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri	Menyelenggarakan fungsi Psikologi, pembinaan serta pengkajian dan pengembangan materi khusus, pengolahan dan penyajian data serta pengelolaan informasi psikologi						178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
		Jumlah Pelayanan Psikotes Diktuk, Dikbangum, profils klinis psikologi dan pendampingan psikologis pegawai negeri pada polri, keluarga dan masyarakat	632	632	632	632	632						
04	<b>Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>							<b>217,640,054</b>	<b>209,781,416</b>	<b>225,691,081</b>	<b>229,959,878</b>	<b>234,356,740</b>	
		Mengembangkan langkah – langkah strategi dalam mencegah dan menanggulangi potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, dari sumber penyebab sampai kepada akibat kejadian, ketertiban dan konflik sosial di masyarakat, dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan sehingga dapat menurunkan potensi gangguan Kamtibmas.											
		a. Jumlah Kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri	3620	3620	3620	3620	3620						
		b. Jumlah jaringan di bidang Ipoleksosbudkam	118	118	118	118	118						
		c. Jumlah produk intelijen yang dihasilkan	56	56	56	56	56						
		Memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/ lembaga baik dalam maupun luar negeri.											
		a. Jumlah Kerjasama dengan departemen/instansi terpusat dan daerah	3	3	3	3	3						
		b. Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat.	3	3	3	3	3						
		Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan											
		a. Jumlah Kasat/Kanit Binmas yang telah mendapatkan pelatihan Polmas	3	3	3	3	3						
		b. Jumlah problem solving yang dihasilkan dalam penyelesaian persengketaan di masyarakat	1764	1764	1764	1764	1764						



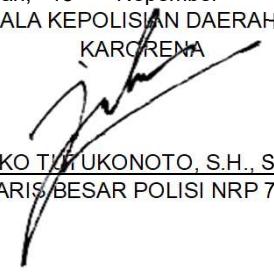
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang Sosial Budaya						5,000,662	5,000,662	5,000,662	5,000,662	5,000,662	
		Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Sosial Budaya	1 operasi										
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang Keamanan Negara						7,061,448	4,552,799	7,061,448	7,061,448	7,061,448	
		Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Keamanan Negara	1 operasi										
3150	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus	Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang khusus						2,563,347	2,563,347	2,563,347	2,563,347	2,563,347	
		Jumlah kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Keamanan Khusus	1 operasi										
3120	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L	Meningkatkan kerjasama dengan instansi Dalam Negeri						17,884	17,884	17,884	17,884	17,884	
		Jumlah Kerjama dengan Kementerian dan Lembaga /instansi terpusat dan daerah	6 kerma										
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam Harkamtibmas						20,377,637	18,510,921	20,377,637	20,377,637	20,377,637	
		Penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas di setiap Desa secara bertahap	614 pers	614 pers	626 pers	639 pers	652 pers						
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masy.	Terseleggaranya dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat						134,242,149	138,148,711	142,293,172	146,561,967	150,958,827	
		Rata-rata jumlah paket pelayanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bln										
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	Meningkatkan pengamanan kegiatan masyarakat						10,985,325	7,595,965	10,985,325	10,985,325	10,985,325	
		Jumlah layanan/kegiatan Fungsi Sabhara	12 Polres 1 Polda										
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	Meningkatkan keamanan objek vital/khusus						5,903,006	5,642,173	5,903,006	5,903,006	5,903,006	
		Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP.	12 Polres 1 Polda										
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masy. di Bidang Lantas	Meningkatkan pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka Kamseltibcarlantas						10,658,284	8,150,756	10,658,284	10,658,284	10,658,284	
		Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka Kamseltibcarlantas	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	Meningkatkan keamanan perairan, pantai dan sungai						958,354	174,962	958,354	958,354	958,354	
		Persentase penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut.	100%	100%	100%	100%	100%						
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	Terlaksananya Penanggulangan gangguan kamtibmas						6,522,273	6,522,273	6,522,273	6,522,273	6,522,273	
		Jumlah laporan Gangguan kamtibmas	12 lap										
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	tertanggulanginya Gangguan Keamanan Dalam Negeri						1,130,133	681,409	1,130,133	1,130,133	1,130,133	
		% perencanaan penggelaran operasi	81%	82%	83%	84%	85%						
<b>05</b>	<b>PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA</b>							<b>67,246,017</b>	<b>68,000,688</b>	<b>69,016,172</b>	<b>69,276,489</b>	<b>69,539,410</b>	
		Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.											
		a. Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.	62%	64%	66%	67%	68%						
		b. Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.	90%	91%	92%	93%	94%						
		c. Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara.	70%	71%	72%	73%	74%						
		d. Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.	40%	40%	42%	43%	45%						
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana							25,549,017	25,773,889	26,031,628	26,291,944	26,554,864	
		Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana											
		Jumlah layanan Perkantoran Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	12 bln										
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum							24,897,524	24,139,780	24,897,524	24,897,524	24,897,524	
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum											
		Persentase penyelesaian Tindak Pidana umum	61%	62%	63%	64%	65%						
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba							11,162,709	11,162,709	11,162,709	11,162,709	11,162,709	
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkoba											
		persentase penyelesaian tindak pidana Narkoba	86%	88%	87%	89%	90%						
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus							555,395	555,395	555,395	555,395	555,395	
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Ekonomi Khusus											
		Persentase penyelesaian tindak pidana Ekonomi Khusus	65%	66%	67%	68%	69%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dlm ribuan Rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi						4,170,191	4,170,191	4,170,191	4,170,191	4,170,191	
		Percentase penyelesaian tindak pidana Korupsi	63%	64%	65%	66%	67%						
5082	Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Meningkatnya kerjasama Pembinaan Operasional Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana						112,186	112,186	112,186	112,186	112,186	
		Jumlah Laporan Kerjasama Pembinaan Operasional Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana	12 lap										
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana tertentu						613,377	613,377	613,377	613,377	613,377	
		Percentase penyelesaian tindak pidana Tertentu	63%	64%	65%	66%	67%						
5086	Pengawasan Penyidikan	Meningkatnya kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyidikan Tindak Pidana						183,598	183,598	183,598	183,598	183,598	
		Percentase jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana	80%	81%	82%	83%	84%						
xxxx	Penindakan Tindak Pidana Perairan (Usulan Giat Baru)							424,414	424,414	424,414	424,414	424,414	
xxxx	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas (Usulan Giat Baru)							863,128	863,128	863,128	863,128	863,128	
<b>RUPIAH MURNI</b>								<b>761,761,716</b>	<b>806,238,907</b>	<b>819,579,514</b>	<b>850,470,897</b>	<b>882,981,697</b>	
<b>PNBP</b>								<b>71,947,447</b>	<b>43,063,796</b>	<b>71,947,447</b>	<b>71,947,447</b>	<b>71,947,447</b>	
<b>BADAN LAYANAN UMUM</b>								<b>26,523,400</b>	<b>28,665,930</b>	<b>30,672,545</b>	<b>32,819,623</b>	<b>35,116,997</b>	

Kendari, 13 Nopember 2019  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULTRA

KARORENA

  
JOKO TUMUKONOTO, S.H., S.I.K.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050530

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI TENGGARA

**RENCANA PENGEMBANGAN KEKUATAN (RENBANGKUAT) SARPRAS POLRI TAHUN 2020-2025**

NO.	JENIS MATERIIL	SAT	DATA AWAL	KIRSUT	BUT IDEAL	KU RANG	TARGET RENSTRA												TOTAL JUM BUT		KET		
							TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024				
							VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	GAR			
A. BAG PERALATAN																							
1 Ranmor R2 :																							
a. Ran Bhabinkamtibmas	Unit	58	6	196	120	30	30,000,000	900,000,000	25	32,000,000	800,000,000	25	35,000,000	875,000,000	20	37,000,000	740,000,000	20	40,000,000	800,000,000	120	4,115,000,000	
b. Ran Rimas 150 cc	Unit	75	8	225	135	30	33,000,000	990,000,000	30	34,000,000	1,020,000,000	15	35,000,000	525,000,000	30	36,000,000	1,080,000,000	30	40,000,000	1,200,000,000	135	4,815,000,000	
c. Ran Tindak PHH	Unit	60	6	150	90	30	33,000,000	990,000,000	15	34,000,000	510,000,000	15	35,000,000	525,000,000	15	36,000,000	540,000,000	15	40,000,000	600,000,000	90	3,165,000,000	
d. Ran Lidik Sidik	Unit	8	1	73	65	15	30,000,000	450,000,000	15	30,000,000	450,000,000	10	32,000,000	320,000,000	10	33,000,000	330,000,000	15	34,000,000	510,000,000	65	2,060,000,000	
2 Ranmor R4 :																							
a. Ranjab	Unit	20	2	45	25	5	225,000,000	1,125,000,000	5	250,000,000	1,250,000,000	5	275,000,000	1,375,000,000	5	300,000,000	1,500,000,000	5	325,000,000	1,625,000,000	25	6,875,000,000	
b. Ranpat Double Cabin	Unit	33	3	58	25	5	350,000,000	1,750,000,000	5	360,000,000	1,800,000,000	5	370,000,000	1,850,000,000	5	380,000,000	1,900,000,000	5	400,000,000	2,000,000,000	25	9,300,000,000	
c. Ranpat Minibus	Unit	16	2	41	25	5	165,000,000	825,000,000	5	170,000,000	850,000,000	5	175,000,000	875,000,000	5	180,000,000	900,000,000	5	190,000,000	950,000,000	25	4,400,000,000	
d. Ransus Lidik Sidik	Unit	3	-	13	10	2	460,000,000	920,000,000	2	470,000,000	940,000,000	2	480,000,000	960,000,000	2	490,000,000	980,000,000	2	495,000,000	990,000,000	10	4,790,000,000	
e. Ransus Security Barier	Unit	2	-	12	10	3	700,000,000	2,100,000,000	2	720,000,000	1,440,000,000	2	730,000,000	1,460,000,000	2	740,000,000	1,480,000,000	1	750,000,000	750,000,000	10	7,230,000,000	
f. Ransus Public Addres	Unit	1	-	7	6	2	560,000,000	1,120,000,000	1	570,000,000	570,000,000	1	575,000,000	575,000,000	1	580,000,000	580,000,000	1	585,000,000	585,000,000	6	3,430,000,000	
g. Ransus Satwa K9	Unit	1	-	2	1	1	450,000,000	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	450,000,000		
h. Ransus Ambulance	Unit	7	-	16	9	2	450,000,000	900,000,000	2	460,000,000	920,000,000	2	470,000,000	940,000,000	2	475,000,000	950,000,000	1	500,000,000	500,000,000	9	4,210,000,000	
i. Ransus APC Baracuda	Unit	2	-	3	1	1	3,800,000,000	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,800,000,000		
j. Ranpat Pick Up	Unit	74	7	114	40	10	220,000,000	2,200,000,000	10	230,000,000	2,300,000,000	10	235,000,000	2,350,000,000	5	250,000,000	1,250,000,000	5	260,000,000	1,300,000,000	40	9,400,000,000	
3 Ranmor R6																							
a. Bus angkut personil	Unit	14	1	33	19	5	790,000,000	3,950,000,000	5	795,000,000	3,975,000,000	5	800,000,000	4,000,000,000	2	810,000,000	1,620,000,000	2	820,000,000	1,640,000,000	19	15,185,000,000	
b. Truk angkut peralatan Box	Unit	8	1	33	25	5	440,000,000	2,200,000,000	5	450,000,000	2,250,000,000	5	460,000,000	2,300,000,000	5	465,000,000	2,325,000,000	5	470,000,000	2,350,000,000	25	11,425,000,000	
c. Ransus Tahanan	Unit	5	-	13	8	2	450,000,000	900,000,000	2	460,000,000	920,000,000	2	470,000,000	940,000,000	1	475,000,000	475,000,000	1	480,000,000	480,000,000	8	3,715,000,000	
d. Ran Jibom EOD	Unit	1	-	2	1	1	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,500,000,000		
e. Ran Dapur Lapangan	Unit	1	-	2	1	1	700,000,000	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	700,000,000		
f. Ransus AWC	Unit	6	1	8	2	2	2,700,000,000	5,400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,800,000,000	5,600,000,000	2	11,000,000,000	
g. Ransus Tangki BBM	Unit	1	1	3	2	2	450,000,000	900,000,000	2	455,000,000	910,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,810,000,000	
4 Alat Apung																							
a. Kapal Patroli B2	Unit	-	-	1	1	1	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,000,000,000		
b. Kapal Patroli B3	Unit	-	-	1	1	1	4,500,000,000	4,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,500,000,000		
c. Kapal Patroli C1	Unit	-	-	1	1	1	2,500,000,000	2,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,500,000,000		
d. Kapal Patroli C2	Unit	5	1	15	9	5	1,700,000,000	8,500,000,000	1	1,750,000,000	1,750,000,000	1	1,800,000,000	1,800,000,000	1	1,850,000,000	1,850,000,000	1	1,900,000,000	1,900,000,000	9	15,800,000,000	
g. Rubber Boat	Unit	5	3	26	18	10	180,000,000	1,800,000,000	2	185,000,000	370,000,000	2	190,000,000	380,000,000	2	195,000,000	390,000,000	2	200,000,000	400,000,000	18	3,340,000,000	
a. Senpi Genggam																							
1) Pistol Glock 17 C 9 mm	Pck	3	-	103	100	20	15,000,000	300,000,000	20	17,000,000	340,000,000	20	18,000,000	360,000,000	20	17,500,000	350,000,000	20	18,000,000	360,000,000	100	1,710,000,000	
2) Pistol Styer 9 mm	Pck	2	-	102	100	20	4,500,000	90,000,000	20	4,600,000	92,000,000	20	4,700,000	94,000,000	20	4,800,000	96,000,000	20	5,000,000	100,000,000	100	472,000,000	
c. Senpi Bahu																							
1). SS2 V 1	Pck	350	18	432	100	20	9,000,000	180,000,000	20	9,500,000	190,000,000	20	9,600,000	192,000,000	20	9,500,000	190,000,000	20	10,000,000	200,000,000	100	952,000,000	
2). SS1 V 5	Pck	50	-	150	100	20	8,000,000	160,000,000	20	8,500,000	170,000,000	20	8,600,000	172,000,000	20	9,000,000	180,000,000	20	9,500,000	190,000,000	100	872,000,000	
3). Sabhara V2	Pck	460	-	560	100	20	7,500,000	150,000,000	20	8,000,000	160,000,000	20	8,500,000	170,000,000	20	9,000,000	180,000,000	20	9,500,000	190,000,000	100	850,000,000	
4). Snp.Sniper Kal.7.62	Pck	-	-	5	5	18,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	90,000,000		

NO	JENIS MATERIIL	SAT	DATA AWAL	KIRSUT	BUT IDEAL	KU RANG	TARGET RENSTRA												TOTAL JUM BUT			KET
							TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			
							VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	GAR		
c. Senjata Dakhura																						
1. Snp.Laras Licin	Pck	6	-	31	25	5	3,700,000	18,500,000	5	3,800,000	19,000,000	5	3,900,000	19,500,000	5	4,000,000	20,000,000	5	4,500,000	22,500,000	25	99,500,000
2. Flash Ball	Pck	152	15	227	75	15	7,000,000	105,000,000	15	7,500,000	112,500,000	15	8,000,000	120,000,000	15	8,500,000	127,500,000	15	9,000,000	135,000,000	75	600,000,000
6 Peralatan Khusus																						
1. Tactical Riot Gear	Set	429	43	551	122	30	6,500,000	195,000,000	30	6,600,000	198,000,000	30	6,700,000	201,000,000	30	6,800,000	204,000,000	2	6,900,000	13,800,000	122	811,800,000
2. Rompi Anti Peluru Lv.III	Buah	165	17	315	150	30	14,500,000	435,000,000	30	14,600,000	438,000,000	30	14,700,000	441,000,000	30	14,800,000	444,000,000	30	14,900,000	447,000,000	150	2,205,000,000
3. Quick Respons Set	Set	50	5	100	50	10	53,000,000	530,000,000	10	53,500,000	535,000,000	10	55,000,000	550,000,000	10	55,600,000	556,000,000	10	56,000,000	560,000,000	50	2,731,000,000
4. Walk Through Detector	Set	2	-	12	10	2	75,000,000	150,000,000	2	76,000,000	152,000,000	2	77,000,000	154,000,000	2	25,000,000	50,000,000	2	30,000,000	60,000,000	10	566,000,000
5. GPS Garmin Portable	Unit	-	-	25	25	5	5,000,000	25,000,000	5	5,500,000	27,500,000	5	6,000,000	30,000,000	5	6,500,000	32,500,000	5	7,000,000	35,000,000	25	150,000,000
6. Night Vision Google	Unit	-	-	10	10	2	8,000,000	16,000,000	2	8,500,000	17,000,000	2	8,800,000	17,600,000	2	9,000,000	18,000,000	2	9,500,000	19,000,000	10	87,600,000
7. Live Jacket	Unit	170	17	278	108	100	150,000	15,000,000	2	200,000	400,000	2	8,800,000	17,600,000	2	9,000,000	18,000,000	2	9,500,000	19,000,000	108	70,000,000
8.Peralatan Selam	Set	7	1	37	30	10	10,000,000	100,000,000	5	10,500,000	52,500,000	5	11,500,000	57,500,000	5	12,000,000	60,000,000	5	12,500,000	62,500,000	30	332,500,000
9.Teropong Siang	Unit	2		27	25	5	6,000,000	30,000,000	5	6,500,000	32,500,000	5	7,000,000	35,000,000	5	7,000,000	35,000,000	5	7,500,000	37,500,000	25	170,000,000
10.Digital Wiraless	Unit	76	7	126	50	10	20,000,000	200,000,000	10	25,000,000	250,000,000	10	28,000,000	280,000,000	10	30,000,000	300,000,000	10	32,000,000	320,000,000	50	1,350,000,000
11.Mega Phone	Unit	116	12	166	50	10	450,000	4,500,000	10	500,000	5,000,000	10	550,000	5,500,000	10	570,000	5,700,000	10	600,000	6,000,000	50	26,700,000
12.Tameng Sekat	Unit	275	28	475	200	100	1,500,000	150,000,000	100	2,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	350,000,000
13.Helm PHH	Unit	250	25	550	300	100	300,000	30,000,000	100	350,000	35,000,000	100	400,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	300	105,000,000
14.Rompi PHH	Unit	170	17	470	300	100	5,500,000	550,000,000	100	6,000,000	600,000,000	100	6,500,000	650,000,000	-	-	-	-	-	-	300	1,800,000,000
15.Tameng PHH Transparan	Unit	30	10	330	300	100	600,000	60,000,000	100	650,000	65,000,000	100	700,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	300	195,000,000
16.Fire Kill teknakan Tinggi	Unit	6	6	21	15	15	190,000,000	2,850,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2,850,000,000	
17.Tongkat Sodok	Unit	60	10	660	600	300	40,000	12,000,000	300	50,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	600	27,000,000	
18.Hand metal Detector	Unit	19	-	69	50	10	2,500,000	25,000,000	10	2,600,000	26,000,000	10	2,700,000	27,000,000	10	2,800,000	28,000,000	10	3,000,000	30,000,000	50	136,000,000
7 Amunisi																						
a. Tajam																						
1) Kal. 38 Spc 6 tj	Btr	120,212	12,021	160,212	40,000	10,000	3,500	35,000,000	10,000	4,000	40,000,000	10,000	4,500	45,000,000	5,000	5,000	25,000,000	5,000	5,500	27,500,000	40,000	172,500,000
2) Kal.9 X 17 mm 380 A	Btr	7,900	790	32,900	25,000	5,000	6,000	30,000,000	5,000	6,500	32,500,000	5,000	7,000	35,000,000	5,000	7,500	37,500,000	5,000	8,000	40,000,000	25,000	175,000,000
3) Kal.5,56 mm 4 tj	Btr	61,990	6,199	106,990	45,000	10,000	3,500	35,000,000	10,000	4,000	40,000,000	10,000	4,500	45,000,000	5,000	5,000	25,000,000	10,000	5,500	55,000,000	45,000	200,000,000
4) Kal.5,56 mm 5 tj	Btr	73,320	7,332	118,320	45,000	10,000	3,500	35,000,000	10,000	4,000	40,000,000	10,000	4,500	45,000,000	5,000	5,000	25,000,000	10,000	5,500	55,000,000	45,000	200,000,000
5) Kal.9 mm 1 tj	Btr	2,820	282	27,820	25,000	5,000	6,000	30,000,000	5,000	6,500	32,500,000	5,000	7,000	35,000,000	5,000	7,500	37,500,000	5,000	8,000	40,000,000	25,000	175,000,000
6) Kal.7,62 x 45 mm 11 tj	Btr	68,362	6,836	113,362	45,000	10,000	6,500	65,000,000	10,000	7,000	70,000,000	10,000	7,500	75,000,000	5,000	8,000	40,000,000	10,000	8,500	85,000,000	45,000	335,000,000
7) Kal.7,62 x 39 mm	Btr	120,998	12,100	165,998	45,000	10,000	9,500	95,000,000	10,000	10,000	100,000,000	10,000	10,500	105,000,000	5,000	11,000	115,000,000	10,000	11,500	115,000,000	45,000	470,000,000
b. Karet																						
1) Kal. 38 Spc 6 Dk	Btr	19,639	1,964	59,639	40,000	5,000	1,500	7,500,000	10,000	2,000	20,000,000	10,000	2,500	25,000,000	5,000	3,000	15,000,000	10,000	3,500	35,000,000	40,000	102,500,000
2) Kal.5,56 mm Dk	Btr	25,435	2,544	70,435	45,000	10,000	4,500	45,000,000	10,000	5,000	50,000,000	10,000	5,500	55,000,000	5,000	6,000	30,000,000	10,000	6,500	65,000,000	45,000	245,000,000
3) Kal.7,62 x 45 mm 11 Dk	Btr	40,307	4,031	80,307	40,000	10,000	3,500	35,000,000	10,000	4,000	40,000,000	10,000	4,500	45,000,000	5,000	5,000	25,000,000	5,000	5,500	27,500,000	40,000	172,500,000
c. Hampa																						
1) Kal. 38 Spc Blank	Btr	-	-	45,000	45,000	10,000	1,500	15,000,000	10,000	2,000	20,000,000	10,000	2,500	25,000,000	5,000	3,000	15,000,000	10,000	3,500	35,000,000	45,000	110,000,000
2) Kal.5,56 mm Hampa	Btr	39,715	3,972	84,715	45,000	10,000	9,500	95,000,000	10,000	10,000	100,000,000	10,000	10,500	105,000,000	5,000	11,000	55,000,000	10,000	11,500	115,000,000	45,000	470,000,000
3) Kal.7,62 x 45 mm 11 H	Btr	5,900	590	50,900	45,000	10,000	3,500	35,000,000	10,000	10,000	100,000,000	10,000	10,500	105,000,000	5,000	11,000	55,000,000	10,000	11,500	115,000,000	45,000	410,000,000
d.Dakhura																						
1). Cad.Flash Ball	Btr	1,745	175	26,745	25,000	5,000	20,000	100,000,000	5,000	25,000	125,000,000	5,000	30,000	150,000,000	5,000	35,000	175,000,000	5,000	40,000	200,000,000	25,000	750,000,000
2).MU.53 AR Smoke	Btr	1,500	150	3,500	2,000	500	93,000	46,500,000	500	95,000	47,500,000	500	100,000	50,000,000	200	110,000	22,000,000	300	150,000	45,000,000	2,000	211,000,000
3).MU.53 AR Powder	Btr	1,100	110	3,100	2,000	500	93,000	46,500,000	500	95,000	47,500,000	500	100,000	50,000,000	200	110,000	22,000,000	300	150,000	45,000,000	2,000	211,000,000
4).GT.6 Supar	Btr	33	3	133	100	20	150,000	3,000,000	20	200,000	4,000,000	20	250,000	5,000,000	20	300,000	6,000,000	20	350,000	7,000,000	100	25,000,000

NO	JENIS MATERIIL	SAT	DATA AWAL	KIRSUT	BUT IDEAL	KU RANG	TARGET RENSTRA														TOTAL JUM BUT		KET		
							TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024						
							VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	GAR		
	5).38 mm Kartel(24AR)	Btr	1,901	190	2,001	100	20	150,000	3,000,000	20	200,000	4,000,000	20	250,000	5,000,000	20	300,000	6,000,000	20	350,000	7,000,000	100	25,000,000		
	6).Granat DH 2	Btr	400	40	500	100	20	200,000	4,000,000	20	250,000	5,000,000	20	300,000	6,000,000	20	350,000	7,000,000	20	400,000	8,000,000	100	30,000,000		
	7).Granat DH 3	Btr	520	52	620	100	20	200,000	4,000,000	20	250,000	5,000,000	20	300,000	6,000,000	20	350,000	7,000,000	20	400,000	8,000,000	100	30,000,000		
A. Belanja barang operasional																									
1.	Jasa Kebersihan	Bulan					12	Rp 400,000	Rp 4,800,000	12	Rp 450,000	Rp 5,400,000	12	Rp 450,000	Rp 5,400,000	12	Rp 500,000	Rp 6,000,000	12	Rp 500,000	Rp 6,000,000	12	Rp 500,000	Rp 6,000,000	Rp 27,600,048
a.	Sapu juk	Buah	-	-	-	-	6	Rp 41,975	Rp 251,850	6	Rp 48,271	Rp 289,628	6	Rp 55,512	Rp 333,072	6	Rp 63,839	Rp 383,032	6	Rp 73,415	Rp 440,487	Rp 1,698,093			
b.	Sapu Lidi	Buah	-	-	-	-	6	Rp 11,500	Rp 69,000	6	Rp 13,225	Rp 79,350	6	Rp 15,209	Rp 91,253	6	Rp 17,490	Rp 104,940	6	Rp 20,114	Rp 120,681	Rp 465,248			
c.	Slaber	Buah	-	-	-	-	6	Rp 40,250	Rp 241,500	6	Rp 46,288	Rp 277,725	6	Rp 53,231	Rp 319,384	6	Rp 61,215	Rp 367,291	6	Rp 70,398	Rp 422,385	Rp 1,628,309			
d.	Tempat Sampah	Buah	-	-	-	-	9	Rp 115,000	Rp 1,035,000	9	Rp 132,250	Rp 1,190,250	9	Rp 152,088	Rp 1,368,788	9	Rp 174,901	Rp 1,574,106	9	Rp 201,136	Rp 1,810,221	Rp 6,978,401			
e.	Serbet	Ibr	-	-	-	-	12	Rp 5,750	Rp 69,000	12	Rp 6,613	Rp 79,350	12	Rp 7,604	Rp 91,253	12	Rp 8,745	Rp 104,940	12	Rp 10,057	Rp 120,681	Rp 465,272			
f.	Pembersih Kaca	Botol	-	-	-	-	24	Rp 21,275	Rp 510,600	24	Rp 24,466	Rp 587,190	24	Rp 28,136	Rp 675,269	24	Rp 32,357	Rp 776,559	24	Rp 37,210	Rp 893,043	Rp 3,442,756			
g.	Pembersih Lantai	Botol	-	-	-	-	24	Rp 22,425	Rp 538,200	24	Rp 25,789	Rp 618,930	24	Rp 29,657	Rp 711,770	24	Rp 34,106	Rp 818,535	24	Rp 39,221	Rp 941,315	Rp 3,628,846			
h.	Sendok Sampah	Buah	-	-	-	-	5	Rp 17,250	Rp 86,250	5	Rp 19,838	Rp 99,188	5	Rp 22,813	Rp 114,066	5	Rp 26,235	Rp 131,175	5	Rp 30,170	Rp 150,852	Rp 581,550			
i.	Ember	Buah	-	-	-	-	5	Rp 20,125	Rp 100,625	5	Rp 23,144	Rp 115,719	5	Rp 26,615	Rp 133,077	5	Rp 30,608	Rp 153,038	5	Rp 35,199	Rp 175,994	Rp 678,472			
j.	Kemoceng	Buah	-	-	-	-	6	Rp 14,375	Rp 86,250	6	Rp 16,531	Rp 99,188	6	Rp 19,011	Rp 114,066	6	Rp 21,863	Rp 131,175	6	Rp 25,142	Rp 150,852	Rp 581,554			
3.	ATK :																								
1.	Kertas A4	Rim	-	-	-	-	120	Rp 46,500	Rp 4,899,000	120	Rp 53,475	Rp 6,417,000	120	Rp 61,496	Rp 7,379,550	120	Rp 70,721	Rp 8,486,483	120	Rp 81,329	Rp 9,759,455	Rp 36,941,967			
2.	Kertas F4	Rim	-	-	-	-	120	Rp 49,000	Rp 5,037,000	120	Rp 56,350	Rp 6,762,000	120	Rp 64,803	Rp 7,776,300	120	Rp 74,523	Rp 8,942,745	120	Rp 85,701	Rp 10,284,157	Rp 38,802,682			
3.	Kertas Karton Jilid	Rim	-	-	-	-	30	Rp 50,000	Rp 897,000	30	Rp 57,500	Rp 1,725,000	30	Rp 66,125	Rp 1,983,750	30	Rp 76,044	Rp 2,281,313	30	Rp 87,450	Rp 2,623,509	Rp 9,510,692			
4.	Kertas HVs Warna	Rim	-	-	-	-	50	Rp 50,500	Rp 1,035,000	50	Rp 58,075	Rp 2,903,750	50	Rp 66,786	Rp 3,339,313	50	Rp 76,804	Rp 3,840,209	50	Rp 88,325	Rp 4,416,241	Rp 15,534,713			
5.	Kertas Foto	Pcs	-	-	-	-	12	Rp 125,000	Rp 345,000	12	Rp 143,750	Rp 1,725,000	12	Rp 165,313	Rp 1,983,750	12	Rp 190,109	Rp 2,281,313	12	Rp 218,626	Rp 2,623,509	Rp 8,958,620			
6.	Tinta Printer hitam	Dos	-	-	-	-	140	Rp 35,000	Rp 3,059,000	140	Rp 40,250	Rp 5,635,000	140	Rp 46,288	Rp 6,480,250	140	Rp 53,231	Rp 7,452,288	140	Rp 61,215	Rp 8,570,131	Rp 31,197,228			
	ATK :																								
7.	Tinta Printer Warna	Dos	-	-	-	-	80	Rp 40,000	Rp 1,886,000	80	Rp 46,000	Rp 3,680,000	80	Rp 52,900	Rp 4,232,000	80	Rp 60,835	Rp 4,866,800	80	Rp 69,960	Rp 5,596,820	Rp 20,261,940			
8.	Tinta Mesin Foto Copy	bks	-	-	-	-	4	Rp 138,000	Rp 552,000	4	Rp 158,700	Rp 634,800	4	Rp 182,505	Rp 730,020	4	Rp 209,881	Rp 839,523	4	Rp 241,363	Rp 965,451	Rp 3,721,810			
9.	Buku Agenda Besar	Buah	-	-	-	-	40	Rp 18,400	Rp 736,000	40	Rp 21,160	Rp 846,400	40	Rp 24,334	Rp 973,360	40	Rp 27,984	Rp 1,119,364	40	Rp 32,182	Rp 1,287,269	Rp 4,962,553			
10.	Buku Agenda Kecil	Buah	-	-	-	-	6	Rp 14,950	Rp 89,700	6	Rp 17,193	Rp 103,155	6	Rp 19,771	Rp 118,628	6	Rp 22,737	Rp 136,422	6	Rp 26,148	Rp 156,886	Rp 604,816			
11.	Buku Kultansi	Buah	-	-	-	-	12	Rp 3,450	Rp 41,400	12	Rp 3,968	Rp 47,610	12	Rp 4,563	Rp 54,752	12	Rp 5,247	Rp 62,964	12	Rp 6,034	Rp 72,409	Rp 279,183			
12.	Stofmap Biasa	Pack	-	-	-	-	48	Rp 28,750	Rp 1,380,000	48	Rp 33,063	Rp 1,587,000	48	Rp 38,022	Rp 1,825,050	48	Rp 43,725	Rp 2,098,808	48	Rp 50,284	Rp 2,413,629	Rp 9,304,678			
13.	Stofmap Satker	Ibr	-	-	-	-	400	Rp 4,025	Rp 1,610,000	400	Rp 4,629	Rp 1,851,500	400	Rp 5,323	Rp 2,129,225	400	Rp 6,122	Rp 2,448,609	400	Rp 7,040	Rp 2,815,900	Rp 10,856,834			
14.	Map Snelhecter Plastik	Lusin	-	-	-	-	15	Rp 25,300	Rp 379,500	15	Rp 29,095	Rp 436,425	15	Rp 33,459	Rp 501,889	15	Rp 38,478	Rp 577,172	15	Rp 44,250	Rp 663,748	Rp 2,558,794			
15.	Bundel Ordner	Buah	-	-	-	-	150	Rp 25,000	Rp 3,450,000	150	Rp 28,750	Rp 4,312,500	150	Rp 33,063	Rp 4,959,375	150	Rp 38,022	Rp 5,703,281	150	Rp 43,725	Rp 6,558,773	Rp 24,984,530			
16.	Amplop Surat warna c	Pack	-	-	-	-	4	Rp 12,000	Rp 41,400	4	Rp 13,800	Rp 55,200	4	Rp 15,870	Rp 63,480	4	Rp 18,251	Rp 73,002	4	Rp 20,988	Rp 83,952	Rp 317,050			
17.	Amplop Besar warna c	Pack	-	-	-	-	10	Rp 12,650	Rp 126,500	10	Rp 14,548	Rp 145,475	10	Rp 16,730	Rp 167,296	10	Rp 19,239	Rp 192,391	10	Rp 22,125	Rp 221,249	Rp 852,951			
18.	Lacban Besar	Buah	-	-	-	-	60	Rp 15,000	Rp 759,000	60	Rp 17,250	Rp 1,035,000	60	Rp 19,838	Rp 1,190,250	60	Rp 22,813	Rp 1,368,788	60	Rp 26,235	Rp 1,574,106	Rp 5,927,383			
19.	lacban Sedang	Buah	-	-	-	-	60	Rp 12,500	Rp 586,500	60	Rp 14,375	Rp 862,500	60	Rp 16,531	Rp 991,875	60	Rp 19,011	Rp 1,140,656	60	Rp 21,863	Rp 1,311,755	Rp 4,893,526			
20.	lacban Kecil	Buah	-	-	-	-	60	Rp 11,500	Rp 448,500	60	Rp 13,225	Rp 793,500	60	Rp 15,209	Rp 912,525	60	Rp 17,490	Rp 1,049,404	60	Rp 20,114	Rp 1,206,814	Rp 4,410,983			
21.	lacban Bening	Buah	-	-	-	-	10	Rp 15,000	Rp 103,500	10	Rp 17,250	Rp 172,500	10	Rp 19,838	Rp 198,375	10	Rp 22,813	Rp 228,131	10	Rp 26,235	Rp 262,351	Rp 964,897			
22.	Pulpel Balliner	Dos	-	-	-	-	2	Rp 138,000	Rp 276,000	2	Rp 158,700	Rp 317,400	2	Rp 182,505	Rp 365,010	2	Rp 209,881	Rp 419,762	2	Rp 241,363	Rp 482,726	Rp 1,860,905			
23.	Pulpel Snowmen	Dos	-	-	-	-	36	Rp 18,000	Rp 579,600	36	Rp 20,700	Rp 745,200	36	Rp 23,805	Rp 856,980	36	Rp 27,376	Rp 985,527	36	Rp 31,482	Rp 1,133,356	Rp 4,300,807			
24.	Spidol Besar	Buah	-	-	-	-	24	Rp 12,000	Rp 179,400	24	Rp 13,800	Rp 331,200	24	Rp 15,870	Rp 380,880	24	Rp 18,251	Rp 438,012	24	Rp 20,988	Rp 503,714	Rp 1,833,302			
25.	Spidol Kecil	Lusin	-	-	-	-	12	Rp 16,550	Rp 198,600	12	Rp 19,033	Rp 228,390	12	Rp 21,887	Rp 262,649	12	Rp 25,170	Rp 302,046	12	Rp 28,946	Rp 347,353	Rp 1,339,085			
26.	Pensil 2 B	Lusin	-	-	-	-	6	Rp 17,250	Rp 103,500	6	Rp 19,838	Rp 119,025	6	Rp 22,813	Rp 136,879	6	Rp 26,235	Rp 157,411	6	Rp 30,170	Rp 181,022	Rp 697,860			
27.	Stabilo	Buah	-	-	-	-	24	Rp 10,000	Rp 179,400	24	Rp 11,500	Rp 276,000	24	Rp 13,225	Rp 317,400	24	Rp 15,209	Rp 365,010	24	Rp 17,490	Rp 419,762	Rp 1,557,668			
28.	Staples No. 10	Dos																							

NO	JENIS MATERIIL	SAT	DATA AWAL	KIRSUT	BUT IDEAL	KU RANG	TARGET RENSTRA														TOTAL JUM BUT			KET	
							TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023						
							VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	GAR		
32. Hecter Besar	Buah	-	-	-	-	-	12	Rp 28,750	Rp 345,000	12	Rp 33,063	Rp 396,750	12	Rp 38,022	Rp 456,263	12	Rp 43,725	Rp 524,702	12	Rp 50,284	Rp 603,407		Rp 2,326,170		
33. Hecter Kecil	Buah	-	-	-	-	-	24	Rp 14,375	Rp 345,000	24	Rp 16,531	Rp 396,750	24	Rp 19,011	Rp 456,263	24	Rp 21,863	Rp 524,702	24	Rp 25,142	Rp 603,407		Rp 2,326,218		
34. Clips	Dos	-	-	-	-	-	12	Rp 12,075	Rp 144,900	12	Rp 13,886	Rp 166,635	12	Rp 15,969	Rp 191,630	12	Rp 18,365	Rp 220,375	12	Rp 21,119	Rp 253,431		Rp 977,019		
35. Binder Clips No. 180	Dos	-	-	-	-	-	12	Rp 5,750	Rp 69,000	12	Rp 6,613	Rp 79,350	12	Rp 7,604	Rp 91,253	12	Rp 8,745	Rp 104,940	12	Rp 10,057	Rp 120,681		Rp 465,272		
36. Binder Clips No. 200	Dos	-	-	-	-	-	12	Rp 9,775	Rp 117,300	12	Rp 11,241	Rp 134,895	12	Rp 12,927	Rp 155,129	12	Rp 14,867	Rp 178,399	12	Rp 17,097	Rp 205,158		Rp 790,929		
37. Binder Clips No. 230	Dos	-	-	-	-	-	12	Rp 12,075	Rp 144,900	12	Rp 13,886	Rp 166,635	12	Rp 15,969	Rp 191,630	12	Rp 18,365	Rp 220,375	12	Rp 21,119	Rp 253,431		Rp 977,019		
38. Binder Clips No. 350	Dos	-	-	-	-	-	12	Rp 13,800	Rp 165,600	12	Rp 15,870	Rp 190,440	12	Rp 18,251	Rp 219,006	12	Rp 20,988	Rp 251,857	12	Rp 24,136	Rp 289,635		Rp 1,116,586		
39. Tip-X	Dos	-	-	-	-	-	24	Rp 8,625	Rp 207,000	24	Rp 9,919	Rp 238,050	24	Rp 11,407	Rp 273,758	24	Rp 13,118	Rp 314,821	24	Rp 15,085	Rp 362,044		Rp 1,395,769		
40. Cutter	Buah	-	-	-	-	-	24	Rp 10,925	Rp 262,200	24	Rp 12,564	Rp 301,530	24	Rp 14,448	Rp 346,760	24	Rp 16,616	Rp 398,773	24	Rp 19,108	Rp 458,589		Rp 1,767,948		
41. Isi Cutter	Kotak	-	-	-	-	-	24	Rp 5,000	Rp 110,400	24	Rp 5,750	Rp 138,000	24	Rp 6,613	Rp 158,700	24	Rp 7,604	Rp 182,505	24	Rp 8,745	Rp 209,881		Rp 799,582		
42. Lem Kertas	Buah	-	-	-	-	-	12	Rp 7,000	Rp 69,000	12	Rp 8,050	Rp 96,600	12	Rp 9,258	Rp 111,090	12	Rp 10,646	Rp 127,754	12	Rp 12,243	Rp 146,917		Rp 551,408		
43. Label Tandatangan	Buah	-	-	-	-	-	24	Rp 25,000	Rp 331,200	24	Rp 28,750	Rp 690,000	24	Rp 33,063	Rp -	24	Rp 38,022	Rp 912,525	24	Rp 43,725	Rp 1,049,404		Rp 2,983,201		
44. Bantal Stempel	Buah	-	-	-	-	-	4	Rp 12,000	Rp 32,200	4	Rp 13,800	Rp 55,200	4	Rp 15,870	Rp 63,480	4	Rp 18,251	Rp 73,002	4	Rp 20,988	Rp 83,952		Rp 307,850		
45. Tinta Stempel	Botol	-	-	-	-	-	12	Rp 11,000	Rp 117,300	12	Rp 12,650	Rp 151,800	12	Rp 14,548	Rp 174,570	12	Rp 16,730	Rp 200,756	12	Rp 19,239	Rp 230,869		Rp 875,342		
46. Kalkulator	Buah	-	-	-	-	-	4	Rp 161,000	Rp 644,000	4	Rp 185,150	Rp 740,600	4	Rp 212,923	Rp 851,690	4	Rp 244,861	Rp 979,444	4	Rp 281,590	Rp 1,126,360		Rp 4,342,110		
47. Penggaris Besi Uk. 30	Buah	-	-	-	-	-	12	Rp 5,500	Rp 55,200	12	Rp 6,325	Rp 75,900	12	Rp 7,274	Rp 87,285	12	Rp 8,365	Rp 100,378	12	Rp 9,620	Rp 115,434		Rp 434,245		
48. Penggaris Besi Uk. 50	Buah	-	-	-	-	-	12	Rp 6,325	Rp 75,900	12	Rp 7,274	Rp 87,285	12	Rp 8,365	Rp 100,378	12	Rp 9,620	Rp 115,434	12	Rp 11,062	Rp 132,750		Rp 511,795		
49. Materai 6000	Lemba	-	-	-	-	-	120	Rp 8,800	Rp 1,056,000	120	Rp 10,120	Rp 1,214,400	120	Rp 11,638	Rp 1,396,560	120	Rp 13,384	Rp 1,606,044	120	Rp 15,391	Rp 1,846,951		Rp 7,120,435		
50. Materai 3000	Lemba	-	-	-	-	-	180	Rp 5,750	Rp 1,035,000	180	Rp 6,613	Rp 1,190,250	180	Rp 7,604	Rp 1,368,788	180	Rp 8,745	Rp 1,574,106	180	Rp 10,057	Rp 1,810,221		Rp 6,979,085		
51. Blanko SSP	Buah	-	-	-	-	-	6	Rp 21,850	Rp 131,100	6	Rp 25,128	Rp 150,765	6	Rp 28,897	Rp 173,380	6	Rp 33,231	Rp 199,387	6	Rp 38,216	Rp 229,295		Rp 883,950		
52. Blanko Faktur Pajak	Buah	-	-	-	-	-	1	Rp 28,750	Rp 28,750	1	Rp 33,063	Rp 33,063	1	Rp 38,022	Rp 38,022	1	Rp 43,725	Rp 43,725	1	Rp 50,284	Rp 50,284		Rp 193,847		
53. Batterai	Buah	-	-	-	-	-	16	Rp 25,000	Rp 73,600	16	Rp 28,750	Rp 460,000	16	Rp 33,063	Rp 529,000	16	Rp 38,022	Rp 608,350	16	Rp 43,725	Rp 699,603		Rp 2,370,617		
54. Amplop Gaji warna put	Dos	-	-	-	-	-	36	Rp 16,000	Rp 517,500	36	Rp 18,400	Rp 662,400	36	Rp 21,160	Rp 761,760	36	Rp 24,334	Rp 876,024	36	Rp 27,984	Rp 1,007,428		Rp 3,825,256		
Lain-lain																									
1. Laptop	Unit	-	-	-	-	-	1	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	1	Rp 11,902,500	Rp 11,902,500												Rp 42,375,752	
2. Printer	Unit	-	-	-	-	-	1	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	2	Rp 991,875	Rp 1,983,750	2	Rp 1,140,700	Rp 2,281,400										Rp 9,913,857
3. Cartridge Canon Hitam	Dos	-	-	-	-	-	24	Rp 260,000	Rp 6,240,000															Rp 6,240,000	
4. Cartridge canon Warna	Dos	-	-	-	-	-	12	Rp 295,000	Rp 3,540,000															Rp 3,540,000	
5. Mesin ketik Manual	Unit	-	-	-	-	-	0	-																Rp 2,595,501	
6. Mesin FC cannon IR 502	Unit	-	-	-	-	-	0	-																Rp 36,975,001	
7. Scanner	Unit	-	-	-	-	-	0	-																Rp 1,013,551	
8. Panel Data	Unit	-	-	-	-	-	1	Rp 115,000	Rp 115,000	1	Rp 132,250	Rp 132,250	1	Rp 152,100	Rp 152,100	1	Rp 174,900	Rp 174,900	2	Rp 201,150	Rp 402,300		Rp 976,555		
9. Flashdisk 8 GB	Buah	-	-	-	-	-	8	Rp 195,500	Rp 1,564,000															Rp 1,564,000	
10. External Disk 500 GB	Buah	-	-	-	-	-	1	Rp 690,000	Rp 690,000															Rp 690,000	
11. Komputer	Unit	-	-	-	-	-																		Rp 120,000,005	
12. CD - RW	Buah	-	-	-	-	-	24	Rp 5,750	Rp 138,000																Rp 138,000
A MESIN STATIONER																									
1 MT-88	Unit	2	-	12	(10)	2	375,000,000	750,000,000	2	393,750,000	787,500,000	2	413,437,500	826,875,000	2	434,109,375	868,218,750	2	455,814,844	911,629,688	10	4,144,223,438			
2 HSD	Unit	2	-	12	(10)	2	375,000,000	750,000,000	2	393,750,000	787,500,000	2	413,437,500	826,875,000	2	434,109,375	868,218,750	2	455,814,844	911,629,688	10	4,144,223,438			

  
 Kendari, 13 Nopember 2019  
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULTRA  
 KARORENA  
 JOKO TUTUKONOTO, S.H., S.I.K.  
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050530

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI TENGGARA

RENCANA PEMELIHARAAN KEKUATAN (RENHARKUAT) LOGISTIK POLRI TAHUN 2020-2024

NO.	JENIS MATERIIL	SAT	TARGET RENSTRA													TOTAL JUM	KET		
			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024				
			VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	BUT GAR		
<b>A. BAG PERALATAN</b>																			
1	Rammor R2 :																		
1.1	SEPEDA MOTOR STAF	Unit	854	20	40,000,000	800,000,000	23	46,000,000	1,058,000,000	26	52,900,000	1,399,205,000	30	60,835,000	1,850,448,613	35	69,960,250	2,447,218,290	7,554,871,903
1.2	SEPEDA MOTOR ALINS	Unit	62	30	40,000,000	1,200,000,000	35	46,000,000	1,587,000,000	40	52,900,000	2,098,807,500	46	60,835,000	2,775,672,919	52	69,960,250	3,670,827,435	11,332,307,854
1.3	R2 RAN PAT YAMAHA VIXION	Unit	100	15	40,000,000	600,000,000	17	46,000,000	793,500,000	20	52,900,000	1,049,403,750	23	60,835,000	1,387,836,459	26	69,960,250	1,835,413,718	5,666,153,927
1.4	R2 PATROLI MEDAN SULIT	Unit	78	15	34,000,000	510,000,000	17	39,100,000	674,475,000	20	44,965,000	891,993,188	23	51,709,750	1,179,660,990	26	59,466,213	1,560,101,660	4,816,230,838
1.5	RANPAT R2 LANTAS 900 CC	Unit	15	3	35,000,000	105,000,000	3	40,250,000	138,862,500	4	46,287,500	183,645,656	5	53,230,625	242,871,380	5	61,215,219	321,197,401	991,576,937
1.6	RANPAT R2 YAMAHA RX KING	Unit	838	100	20,000,000	2,000,000,000	115	23,000,000	2,645,000,000	132	26,450,000	3,498,012,500	152	30,417,500	4,626,121,531	175	34,980,125	6,118,045,725	18,887,179,756
1.7	RANPAT R2 BENELI PAM OBVIT	Unit	3	5	325,000,000	1,625,000,000	6	373,750,000	2,149,062,500	7	429,812,500	2,842,135,156	8	494,284,375	3,758,723,744	9	568,427,031	4,970,912,152	15,345,833,552
1.8	RANPAT R2 SUZUKI TRAIL	Unit	66	5	400,000,000	2,000,000,000	6	460,000,000	2,645,000,000	7	529,000,000	3,498,012,500	8	608,350,000	4,626,121,531	9	699,602,500	6,118,045,725	18,887,179,756
1.9	R2 RAIMAS 150 CC / 250 cc	Unit	123	5	190,000,000	950,000,000	6	218,500,000	1,256,375,000	7	251,275,000	1,661,555,938	8	288,966,250	2,197,407,727	9	332,311,188	2,906,071,719	8,971,410,384
1.10	TON TINDAK PHH 250 CC	Unit	75	2	495,000,000	990,000,000	2	569,250,000	1,309,275,000	3	654,637,500	1,731,754,188	3	752,833,125	2,289,930,158	3	865,758,094	3,028,432,634	9,349,153,979
1.11	RAN R2 BHABINKAMTIBMAS	Unit	644	1	750,000,000	750,000,000	1	862,500,000	991,875,000	1	991,875,000	1,311,754,688	2	1,140,656,250	1,734,795,574	2	1,311,754,688	2,294,267,147	7,082,692,409
1.12	RAN R2 UJI SIM	Unit	18	1	585,000,000	585,000,000	1	672,750,000	773,662,500	1	773,662,500	1,023,168,656	2	889,711,875	1,353,140,548	2	1,023,168,656	1,789,528,375	5,524,500,079
1.13	RAN R2 LIDIK SIDIK	Unit	9	1	585000000	585000000	1	672,750,000	773,662,500	1	773,662,500	1,023,168,656	2	889,711,875	1,353,140,548	2	1,023,168,656	1,789,528,375	5,524,500,079
2	Rammor R-4						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	SEDAN RANJAB / STAF	Unit	17	2	420,000,000	840,000,000	2	483,000,000	1,110,900,000	3	555,450,000	1,469,165,250	3	638,767,500	1,942,971,043	3	734,582,625	2,569,579,205	7,932,615,498
2.2	JEEP RANJAB/STAF	Unit	50	2	450,000,000	900,000,000	2	517,500,000	1,190,250,000	3	595,125,000	1,574,105,625	3	684,393,750	2,081,754,689	3	787,052,813	2,753,120,576	8,499,230,890
2.3	TRUK RINGAN PICK UP STAF	Unit	1	4	480,000,000	1,920,000,000	5	552,000,000	2,539,200,000	5	634,800,000	3,358,092,000	6	730,020,000	4,441,076,670	7	839,523,000	5,873,323,896	18,131,692,566
2.4	BUS KECIL/MINI BUS STAF	Unit	29	2	820,000,000	1,640,000,000	2	943,000,000	2,168,900,000	3	1,084,450,000	2,868,370,250	3	1,247,117,500	3,793,419,656	3	1,434,185,125	5,016,797,495	15,487,487,400
2.5	RANSUS AMBULANCE	Unit	16	5	470,000,000	2,350,000,000	6	540,500,000	3,107,875,000	7	621,575,000	4,110,164,688	8	714,811,250	5,435,692,799	9	822,032,938	7,188,703,727	22,194,362,214
2.6	RANSUS KERETA MERTA	Unit	1	1	480,000,000	480,000,000	1	552,000,000	634,800,000	1	634,800,000	839,523,000	2	730,020,000	1,110,269,168	2	839,523,000	1,468,330,974	4,532,923,142
2.7	RANSUS UNIT KOMLEK	Unit	3	2	900,000,000	1,800,000,000	2	1,035,000,000	2,380,500,000	3	1,190,250,000	3,148,211,250	3	1,368,787,500	4,163,509,378	3	1,574,105,625	5,506,241,153	16,998,461,781
2.8	RANSUS TAHANAN	Unit	17	2	900,000,000	1,800,000,000	2	1,035,000,000	2,380,500,000	3	1,190,250,000	3,148,211,250	3	1,368,787,500	4,163,509,378	3	1,574,105,625	5,506,241,153	16,998,461,781
2.9	RANSUS YANMAS / BLKK	Unit	16	2	900,000,000	1,800,000,000	2	1,035,000,000	2,380,500,000	3	1,190,250,000	3,148,211,250	3	1,368,787,500	4,163,509,378	3	1,574,105,625	5,506,241,153	16,998,461,781
2.10	RANTIS PENARIK BARRIER	Unit	11	2	900,000,000	1,800,000,000	2	1,035,000,000	2,380,500,000	3	1,190,250,000	3,148,211,250	3	1,368,787,500	4,163,509,378	3	1,574,105,625	5,506,241,153	16,998,461,781
2.11	RANTIS APC 4 X 4	Unit	8	2	900,000,000	1,800,000,000	2	1,035,000,000	2,380,500,000	3	1,190,250,000	3,148,211,250	3	1,368,787,500	4,163,509,378	3	1,574,105,625	5,506,241,153	16,998,461,781
2.12	RANTIS PUBLIK ADDRES	Unit	5	23	900,000,000	20,700,000,000	26	1,035,000,000	27,375,750,000	30	1,190,250,000	36,204,429,375	35	1,368,787,500	47,880,357,848	40	1,574,105,625	63,321,773,255	195,482,310,478
2.13	RANTIS DOUBLE CABIN	Unit	2	5	900,000,000	4,500,000,000	6	1,035,000,000	5,951,250,000	7	1,190,250,000	7,870,528,125	8	1,368,787,500	10,408,773,445	9	1,574,105,625	13,765,602,881	42,496,154,452
2.14	RANTIS DIKMAS LANTAS	Unit	2	4	900,000,000	3,600,000,000	5	1,035,000,000	4,761,000,000	5	1,190,250,000	6,296,422,500	6	1,368,787,500	8,327,018,756,25	6,996025	1,574,105,625	11,012,482,305	33,996,923,561
2.15	RANSUS INAFIS	Unit	2	4	900,000,000	3,600,000,000	5	1,035,000,000	4,761,000,000	5	1,190,250,000	6,296,422,500	6	1,368,787,500	8,327,018,756,25	6,996025	1,574,105,625	11,012,482,305	33,996,923,561
2.16	RANSUS UNIT TKP	Unit	1	4	900,000,000	3,600,000,000	5	1,035,000,000	4,761,000,000	5	1,190,250,000	6,296,422,500	6	1,368,787,500	8,327,018,756,25	6,996025	1,574,105,625	11,012,482,305	33,996,923,561
2.17	RANSUS SATWA ANJING K9	Unit	4	20	18,000,000	360,000,000	23	20,700,000	476,100,000	26	23,805,000	629,642,250	30	27,375,750	832,701,875,63	34,980125	31,482,113	1,101,248,231	3,399,692,356
2.18	RANSUS MONITORING OBVIT	Unit	2	20	5,000,000	100,000,000	23	5,750,000	132,250,000	26	6,612,500	174,900,625	30	7,604,375	231,306,076,56	34,980125	8,745,031	305,902,286	944,358,988
2.19	RANSUS UJI SIM LANTAS	Unit	8	2	20,000,000	40,000,000	2	23,000,000	52,900,000	3	26,450,000	69,960,250	3	30,417,500	92,522,430,63	34,980125	34,980,125	122,360,915	377,743,595
2.20	RANSUS SUPERVISI LANTAS	Unit	2	2	20,000,000	40,000,000	2	23,000,000	52,900,000	3	26,450,000	69,960,250	3	30,417,500	92,522,430,63	34,980125	34,980,125	122,360,915	377,743,595
2.21	RANSUS R2 LIDIK SIDIK	Unit	13	20	10,000,000	200,000,000	23	11,500,000	264,500,000	26	13,225,000	349,801,250	30	15,208,750	462,612,153,13	34,980125	17,490,063	611,804,573	1,888,717,976
2.22	RANPAT SEDAN	Unit	34	20	9,500,000	190,000,000	23	10,925,000	251,275,000	26	12,563,750	332,311,188	30	14,448,313	439,481,545,47	34,980125	16,615,559	581,214,344	1,794,282,077
2.23	RANPAT JEEP	Unit	2	20	9,500,000	190,000,000	23	10,925,000	251,275,000	26	12,563,750	332,311,188	30	14,448,313	439,481,545,47	34,980125	16,615,559	581,214,344	1,794,282,077
2.24	RAN PAT BUS KECIL/MINIBUS	Unit	22	5	9,500,000	47,500,000	6	10,925,000	62,818,750	7	12,563,750	83,077,797	8	14,448,313	109,870,386,37	8,74503125	16,615,559	145,303,586	448,570,519
2.25	RANPAT TRUK RINGAN/PICK UP	Unit	98	4	9,500,000	38,000,000	5	10,925,000	50,255,000	5	12,563,750	66,462,238	6	14,448,313	87,896,309,09	6,996025	16,615,559	116,242,869	358,856,415
2.26	RANPAT DOUBLE CABIN 4X4	Unit	105	10	9,500,000	95,000,000	12	10,925,000	125,637										

NO.	JENIS MATERIIL	SAT	TARGET RENSTRA															TOTAL JUM	KET	
			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024					
			VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	BUT GAR		
	3.BUS SEDANG	Unit	30	30	14,900,000	447,000,000	35	17,135,000	591,157,500	40	19,705,250	781,805,794	46	22,661,038	1,033,938,162,23	52,470,1875	26,060,193	1,367,383,220	4,221,284,676	
	4.BUS BESAR	Unit	-	10	56,000,000	560,000,000	12	64,400,000	740,600,000	13	74,060,000	979,443,500	15	85,169,000	1,295,314,028,75	17,490,0625	97,944,350	1,713,052,803	5,288,410,332	
	5.RANSUS TANGKI AIR	Unit	1	2	30,000,000	60,000,000	2	34,500,000	79,350,000	3	39,675,000	104,940,375	3	45,626,250	138,783,645,94	3,4980125	52,470,188	183,541,372	566,615,393	
	6.RANSUS TANGKI BBM	Unit	2	5	7,000,000	35,000,000	6	8,050,000	46,287,500	7	9,257,500	61,215,219	8	10,646,125	80,957,126,80	8,74503125	12,243,044	107,065,800	330,525,646	
	7.RANSUS TAHANAN	Unit	5	2	9,500,000	19,000,000	2	10,925,000	25,127,500	3	12,563,750	33,231,119	3	14,448,313	43,948,154,55	3,4980125	16,615,559	58,121,434	179,428,208	
	8.RANSUS SIM KELILING	Unit	7	2	9,500,000	19,000,000	2	10,925,000	25,127,500	3	12,563,750	33,231,119	3	14,448,313	43,948,154,55	3,4980125	16,615,559	58,121,434	179,428,208	
	9.RANSUS EOD JIBOM	Unit	2	5	12,500,000	62,500,000	6	14,375,000	82,656,250	7	16,531,250	109,312,891	8	19,010,938	144,566,297,85	8,74503125	21,862,578	191,188,929	590,224,367	
	10.TRUK SEDANG BOX ANGKUT PAL	Unit	24	5	7,500,000	37,500,000	6	8,625,000	49,593,750	7	9,918,750	65,587,734	8	11,406,563	86,739,778,71	8,74503125	13,117,547	114,713,357	354,134,620	
	11.RANTIS AWC	Unit	16	10	32,000,000	320,000,000	12	36,800,000	423,200,000	13	42,320,000	559,682,000	15	48,668,000	740,179,445,00	17,4900625	55,968,200	978,887,316	3,021,948,761	
	12.RANTIS KOMANDO RESKRIMUM	Unit	2	10	600,000	6,000,000	12	690,000	7,935,000	13	793,500	10,494,038	15	912,525	13,878,364,59	17,4900625	1,049,404	18,354,137	56,661,539	
4	Roda-3																			
	1.RAN R3 MOTOR PINTAR	Unit	-	-	5,500	-												-		
5	Sepeda																			
	1.SEPEDA PATROLI	Unit	100	100	8,500	850,000	115	9,775	1,124,125	132	11,241	1,486,655	152	12,927	1,966,102	175	14,867	2,600,169	8,027,051	
6	Kendaraan Apung																			
	1.KAPAL PATROLI	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A.KLAS "C" TYPE C1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B.KLAS "C" TYPE C2	Unit	9	2	140,000,000	280,000,000	2	161,000,000	370,300,000	3	185,150,000	489,721,750	3	212,922,500	647,657,014	3	244,860,875	856,526,402	2,644,205,166	
	C.KLAS "C" TYPE C3	Unit	8	4	30,000,000	120,000,000	5	34,500,000	158,700,000	5	39,675,000	209,880,750	6	45,626,250	277,567,292	7	52,470,188	367,082,744	1,133,230,785	
	JUMLAH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.KAPAL NON STANDAR	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A.PERAHU KARET + MESIN	Unit	18	6	28,000,000	168,000,000	7	32,200,000	222,180,000	8	37,030,000	293,833,050	9	42,584,500	388,594,209	10	48,972,175	513,915,841	1,586,523,100	
	B.SPEED BOAT	Unit	15	5	28,000,000	140,000,000	6	32,200,000	185,150,000	7	37,030,000	244,860,875	8	42,584,500	323,828,507	9	48,972,175	428,263,201	1,322,102,583	
	C.RIGID INFLATABLE BOAT	Unit	2	2	28,000,000	56,000,000	2	32,200,000	74,060,000	3	37,030,000	97,944,350	3	42,584,500	129,531,403	3	48,972,175	171,305,280	528,841,033	
	D.PERAHU CANOE	Unit	35	20	28,000,000	560,000,000	23	32,200,000	740,600,000	26	37,030,000	979,443,500	30	42,584,500	1,295,314,029	35	48,972,175	1,713,052,803	5,288,410,332	
	F.PERAHU KAYAK	Unit	55	25	28,000,000	700,000,000	29	32,200,000	925,750,000	33	37,030,000	1,224,304,375	38	42,584,500	1,619,142,536	44	48,972,175	2,141,316,004	6,610,512,915	
B	SENJATA API						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Senpi Genggam						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A.REVOLVER KAL.38						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.R1-V1 PINDAD	Pucuk	528	200	20,000	4,000,000	230	23,000	5,290,000	265	26,450	6,996,025	304	30,418	9,252,243	350	34,980	12,236,091	37,774,360	
	2.R1-V2 PINDAD	Pucuk	13	20	20,000	400,000	23	23,000	529,000	26	26,450	699,603	30	30,418	925,224	35	34,980	1,223,609	3,777,436	
	3.COP 4"	Pucuk	5	5	20,000	100,000	6	23,000	132,250	7	26,450	174,901	8	30,418	231,306	9	34,980	305,902	944,359	
	4.CPP 4"	Pucuk	109	50	20,000	1,000,000	58	23,000	1,322,500	66	26,450	1,749,006	76	30,418	2,313,061	87	34,980	3,059,023	9,443,590	
	5.CPPS 4"	Pucuk	22	20	20,000	400,000	23	23,000	529,000	26	26,450	699,603	30	30,418	925,224	35	34,980	1,223,609	3,777,436	
	6.COLT DETECTIVE	Pucuk	68	20	20,000	400,000	23	23,000	529,000	26	26,450	699,603	30	30,418	925,224	35	34,980	1,223,609	3,777,436	
	7.COLT COBRA	Pucuk	5	5	20,000	100,000	6	23,000	132,250	7	26,450	174,901	8	30,418	231,306	9	34,980	305,902	944,359	
	8.COLT COMANDO	Pucuk	0	25	20,000	500,000	29	23,000	661,250	33	26,450	874,503	38	30,418	1,156,530	44	34,980	1,529,511	4,721,795	
	9.LLAMA SPAIN 4"	Pucuk	87	20	20,000	400,000	23	23,000	529,000	26	26,450	699,603	30	30,418	925,224	35	34,980	1,223,609	3,777,436	
	10.TAURUS BRAZIL 4"	Pucuk	645	150	20,000	3,000,000	173	23,000	3,967,500	198	26,450	5,247,019	228	30,418	6,939,182	262	34,980	9,177,069	28,330,770	
	11.S & W 2 "	Pucuk	94	30	20,000	600,000	35	23,000	793,500	40	26,450	1,049,404	46	30,418	1,387,836	52	34,980	1,835,414	5,666,154	
	12.S & W 4"	Pucuk	245	245	20,000	4,900,000	282	23,000	6,480,250	324	26,450	8,570,131	373	30,418	11,333,998	429	34,980	14,989,212	46,273,590	
	B.PISTOL KAL.9 MM						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.GLOCK 17 C	Pucuk	13	13	50,000	650,000	15	57,500	859,625	17	66,125	1,136,854	20	76,044	1,503,489	23	87,450	1,988,365	6,138,333	
	2.STYER	Pucuk	2	2	50,000	100,000	2	57,500	132,250	3	66,125	174,901	3	76,044	231,306	3	87,450	305,902	944,359	
	3.SIG SAUER P320	Pucuk	65	65	50,000	3,250,000	75	57,500	4,298,125	86	66,125	5,684,270	99	76,044	7,517,447	114	87,450	9,941,824	30,691,667	
	4.HS-9	Pucuk	898	898	50,000	44,900,000	1,033	57,500	59,380,250	1,188	66,125	78,530,381	1,366	76,044	103,856,428	1,571	87,450	137,350,127	424,017,186	
	5.PINDAD MAG 4	Pucuk	50	50	50,000	2,500,000	58	57,500	3,306,250	66	66,125	4,372,516	76	76,044	5,782,652	87	87,450	7,647,557	23,608,975	







NO.	JENIS MATERIIL	SAT	TARGET RENSTRA															TOTAL JUM BUT GAR	KET		
			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024						
			DATA AWAL VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR													
58.BALISTIC SHIELD	Buah	1	1	25,000	25,000	1	28,750	33,063	1	33,063	43,725	2	38,022	57,827	2	43,725	76,476	236,090			
59.PIGSTIC EOD DISRUPTER WS	Buah	3	3	25,000	75,000	3	28,750	99,188	4	33,063	131,175	5	38,022	173,480	5	43,725	229,427	708,269			
60.DEMOLITION CABLE	Buah	3	3	25,000	75,000	3	28,750	99,188	4	33,063	131,175	5	38,022	173,480	5	43,725	229,427	708,269			
61.BLASTING MACINE INITIATOR	Buah	3	3	25,000	75,000	3	28,750	99,188	4	33,063	131,175	5	38,022	173,480	5	43,725	229,427	708,269			
62.CARTRIDGE DESTRUCTOR	Buah	460	460	25,000	11,500,000	529	28,750	15,208,750	608	33,063	20,113,752	700	38,022	26,600,199	805	43,725	35,178,763	108,601,284			
63.HOOK AND LINE KIT MK 4	Buah	10	10	25,000	250,000	12	28,750	330,625	13	33,063	437,252	15	38,022	578,265	17	43,725	764,756	2,360,897			
64.NON MAGNETIC TOOLKIT	Buah	2	2	25,000	50,000	2	28,750	66,125	3	33,063	87,450	3	38,022	115,653	3	43,725	152,951	472,179			
65.SPECIAL OPERATION KIT	Buah	1	1	25,000	25,000	2	28,750	57,500	2	33,063	76,044	3	38,022	100,568	3	43,725	133,001	392,113			
66.EOD SEARCH TOOLKIT	Buah	3	3	25,000	75,000	3	28,750	99,188	4	33,063	131,175	5	38,022	173,480	5	43,725	229,427	708,269			
67.DRAGON PANT SEARCH LIGHT	Buah	6	6	25,000	150,000	7	28,750	198,375	8	33,063	262,351	9	38,022	346,959	10	43,725	458,853	1,416,538			
68.FLOOD LINGH	Buah	3	3	25,000	75,000	3	28,750	99,188	4	33,063	131,175	5	38,022	173,480	5	43,725	229,427	708,269			
69.BINOKULAR TEROPONG	Buah	5	5	25,000	125,000	6	28,750	165,313	7	33,063	218,626	8	38,022	289,133	9	43,725	382,378	1,180,449			
70.NIGHT VISION DEVICE	Buah	1	1	25,000	25,000	2	28,750	57,500	2	33,063	76,044	3	38,022	100,568	3	43,725	133,001	392,113			
71.COOL BOX	Buah	1	1	25,000	25,000	2	28,750	57,500	2	33,063	76,044	3	38,022	100,568	3	43,725	133,001	392,113			
72.CAMERA CANON DIGITAL	Buah	1	1	25,000	25,000	2	28,750	57,500	2	33,063	76,044	3	38,022	100,568	3	43,725	133,001	392,113			
73.MASKER M98 KHUS BOM CBRN	Buah	29	29	25,000	725,000	33	28,750	958,813	38	33,063	1,268,030	44	38,022	1,676,969	51	43,725	2,217,792	6,846,603			
74.CANISTER FILTER 22 CBRN	Buah	29	29	25,000	725,000	33	28,750	958,813	38	33,063	1,268,030	44	38,022	1,676,969	51	43,725	2,217,792	6,846,603			
75.CANISTER NBC 2209	Buah	29	29	25,000	725,000	33	28,750	958,813	38	33,063	1,268,030	44	38,022	1,676,969	51	43,725	2,217,792	6,846,603			
76.BOTOL MINUM MASKER CBRN	Buah	29	29	25,000	725,000	33	28,750	958,813	38	33,063	1,268,030	44	38,022	1,676,969	51	43,725	2,217,792	6,846,603			
77.MASKER GAS NCB K3	Buah	28	28	25,000	700,000	32	28,750	925,750	37	33,063	1,224,304	43	38,022	1,619,143	49	43,725	2,141,316	6,610,513			
78.CANISTER FILTER NCB K3	Buah	24	24	25,000	600,000	28	28,750	793,500	32	33,063	1,049,404	37	38,022	1,387,836	42	43,725	1,835,414	5,666,154			
79.ALPAL SAR RUANG TERBATAS	Buah	1	1	25,000	25,000	2	28,750	57,500	2	33,063	76,044	3	38,022	100,568	3	43,725	133,001	392,113			
80.ALAT BANTU PENYELAMATAN	Buah	1	1	25,000	25,000	2	28,750	57,500	2	33,063	76,044	3	38,022	100,568	3	43,725	133,001	392,113			
81.ALPAL FREKWENSI TINGGI	Buah	5	5	25,000	125,000	6	28,750	165,313	7	33,063	218,626	8	38,022	289,133	9	43,725	382,378	1,180,449			
82.ALPAL SIMULTEST KBR CDS	Buah	1	1	25,000	25,000	2	28,750	57,500	2	33,063	76,044	3	38,022	100,568	3	43,725	133,001	392,113			
83.IRLASER/ILUMINATOR AND VIS	Buah	50	50	25,000	1,250,000	58	28,750	1,653,125	66	33,063	2,186,258	76	38,022	2,891,326	87	43,725	3,823,779	11,804,487			
84.LASER RANGE FINDER GAG	Buah	6	6	25,000	150,000	7	28,750	198,375	8	33,063	262,351	9	38,022	346,959	10	43,725	458,853	1,416,538			
85.IRLASER/ILUMINATOR AND VIS	Buah	101	101	25,000	2,525,000	116	28,750	3,399,313	134	33,063	4,416,241	154	38,022	5,840,478	177	43,725	7,724,033	23,845,064			
86.SOUND SYSTEM MANPACK	Buah	511	511	25,000	12,775,000	588	28,750	16,894,938	676	33,063	22,343,555	777	38,022	29,549,351	894	43,725	39,079,017	120,641,861			
87.ALAT SAR DETEKSIS VISUAL	Buah	1	1	25,000	25,000	2	28,750	57,500	2	33,063	76,044	3	38,022	100,568	3	43,725	133,001	392,113			
88.ALAT SAR DETEKSIS ACCUSTIK	Buah	1	1	25,000	25,000	2	28,750	57,500	2	33,063	76,044	3	38,022	100,568	3	43,725	133,001	392,113			
89.HELM ANTI PELURU LV.III A	Buah	550	550	25,000	13,750,000	633	28,750	18,184,375	727	33,063	24,048,836	836	38,022	31,804,586	962	43,725	42,061,564	129,849,361			
90.MOBILE TACTICAL X RAY	Buah	2	2	25,000	50,000	2	28,750	66,125	3	33,063	87,450	3	38,022	115,653	3	43,725	152,951	472,179			
91.AUDIO VIDEO FORENSIK	Buah	1	1	25,000	25,000	2	28,750	57,500	2	33,063	76,044	3	38,022	100,568	3	43,725	133,001	392,113			
92.GHILE SUIT	Buah	30	30	25,000	750,000	35	28,750	991,875	40	33,063	1,311,755	46	38,022	1,734,796	52	43,725	2,294,267	7,082,692			
93.NIGHT VISION GOOGLE GEN 3	Buah	9	9	25,000	225,000	10	28,750	297,563	12	33,063	393,526	14	38,022	520,439	16	43,725	688,280	2,124,808			
<b>B.ALSUS RESKRIMUM</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.ROMPI ANTI PELURU LEVEL III	Buah	485	485	50,000	24,250,000	558	57,500	32,070,625	641	66,125	42,413,402	738	76,044	56,091,724	848	87,450	74,181,304	229,007,055			
2.PERALATAN OLAH TKP	Buah	20	20	50,000	1,000,000	23	57,500	1,322,500	26	66,125	1,749,006	30	76,044	2,313,061	35	87,450	3,059,023	9,443,590			
3.CAMERA FOTO	Buah	17	17	50,000	850,000	20	57,500	1,124,125	22	66,125	1,486,655	26	76,044	1,966,102	30	87,450	2,600,169	8,027,051			
4.VOICE RECORDER	Buah	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225			
5.HANDYCAMS	Buah	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225			
6.INAFIS MAT SCUBER	Buah	8	8	50,000	400,000	9	57,500	529,000	11	66,125	699,603	12	76,044	925,224	14	87,450	1,223,609	3,777,436			
7.QUICK RESPONS MASTER CRIME	Buah	2	2	50,000	100,000	2	57,500	132,250	3	66,125	174,901	3	76,044	231,306	3	87,450	305,902	944,359			
8.INAVIS KIT	Buah	27	27	50,000	1,350,000	31	57,500	1,785,375	36	66,125	2,361,158	41	76,044	3,122,632	47	87,450	4,129,681	12,748,846			
9.HELM ANTI PELURU LV.IIIA	Buah	100	100	50,000	5,000,000	115	57,500	6,612,500	132	66,125	8,745,031	152	76,044	11,565,304	175	87,450	15,295,114	47,217,949			
10.BORGOL TANGAN BESI	Buah	100	100	50,000	5,000,000	115	57,500	6,612,500	132	66,125	8,745,031	152	76,044	11,565,304	175	87,450	15,295,114	47,217,949			
11.BORGOL TANGAN PLASTIK	Buah	100	100	50,000	5,000,000	115	57,500	6,612,500	132	66,125	8,745,031	152	76,044	11,565,304	175	87,450	15,295,114	47,217,949			
12.ALPAL DIGITAL MAMBIIS	Buah	21	21	50,000	1,050,000	24	57,500	1,388,625	28	66,125	1,836,457	32	76,044	2,428,714	37	87,450	3,211,974	9,915,769			
13.INAFIS PORTABLE SYSTEM	Buah	5	5	50,000	250,000	6	57,500	330,625	7	66,125	437,252	8	76,044	578,265	9	87,450	764,756	2,360,897			

NO.	JENIS MATERIIL	SAT	TARGET RENSTRA																KET
			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024				
			VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	BUT GAR	
C.ALSUS RESKRIMUS																			
1.ALAT PEN VOICE RECORD	Buah	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
2.KAMERA DIGITAL	Buah	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
3.TKP UNIT	Buah	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
4.GPS	Buah	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
5.MOBILE UNIT	Buah	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
6. ROMPI ANTI PELURU LV.III	Buah	10	10	50,000	500,000	12	57,500	661,250	13	66,125	874,503	15	76,044	1,156,530	17	87,450	1,529,511	4,721,795	
D. ALSUS RESNARKOBA																			
1.FLOW ANALISIS SYSTEM	Buah	4	4	50,000	200,000	5	57,500	264,500	5	66,125	349,801	6	76,044	462,612	7	87,450	611,805	1,888,718	
2.PREPARAT BOX	Buah	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
3.GPS	Buah	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
4.VOICE RECORDER PEN	Buah	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
5.TEST KIT NARKOBA	Buah	28	28	50,000	1,400,000	32	57,500	1,851,500	37	66,125	2,448,609	43	76,044	3,238,285	49	87,450	4,282,632	13,221,026	
6.ROMPI ANTI PELURU LV.III	Buah	14	14	50,000	700,000	16	57,500	925,750	19	66,125	1,224,304	21	76,044	1,619,143	24	87,450	2,141,316	6,610,513	
E.ALSUS BINMAS																			
1.DIGITAL WIRELESS	Btr	32	32	50,000	1,600,000	37	57,500	2,116,000	42	66,125	2,798,410	49	76,044	3,700,897	56	87,450	4,894,437	15,109,744	
2.NARKOBA TEST KIT		1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
3.KAMERA DIGITAL		1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
4.HANDYCAM	Btr	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
5.MEGAPHONE		227	227	50,000	11,350,000	261	57,500	15,010,375	300	66,125	19,851,221	345	76,044	26,253,240	397	87,450	34,719,909	107,184,745	
F.ALSUS PAMOBVIT																			
1.MOBILE MONITORING MMCP		1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
2.WALK THROUG METAL DETEC	Btr	2	2	50,000	100,000	2	57,500	132,250	3	66,125	174,901	3	76,044	231,306	3	87,450	305,902	944,359	
3.IMPLUSE GUN FIRE	Btr	2	2	50,000	100,000	2	57,500	132,250	3	66,125	174,901	3	76,044	231,306	3	87,450	305,902	944,359	
4.ROMPI ANTI PELURU LV.III		14	14	50,000	700,000	16	57,500	925,750	19	66,125	1,224,304	21	76,044	1,619,143	24	87,450	2,141,316	6,610,513	
5.CHECK BAG X-RAY		2	2	50,000	100,000	2	57,500	132,250	3	66,125	174,901	3	76,044	231,306	3	87,450	305,902	944,359	
G.ALSUS INTELKAM																			
1.VOICE RECORDER PEN	Btr	27	27	50,000	1,350,000	31	57,500	1,785,375	36	66,125	2,361,158	41	76,044	3,122,632	47	87,450	4,129,681	12,748,846	
2.HANDYCAM		8	8	50,000	400,000	9	57,500	529,000	11	66,125	699,603	12	76,044	925,224	14	87,450	1,223,609	3,777,436	
3.CAMERA DIGITAL		28	28	50,000	1,400,000	32	57,500	1,851,500	37	66,125	2,448,609	43	76,044	3,238,285	49	87,450	4,282,632	13,221,026	
4.METAL DETECTOR	Btr	1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
5.MANPACK		1	1	50,000	50,000	2	57,500	115,000	2	66,125	152,088	3	76,044	201,136	3	87,450	266,002	784,225	
6.MESIN SANDI		6	6	50,000	300,000	7	57,500	396,750	8	66,125	524,702	9	76,044	693,918	10	87,450	917,707	2,833,077	
7.ALPAL SKCS ONLINE		16	16	50,000	800,000	18	57,500	1,058,000	21	66,125	1,399,205	24	76,044	1,850,449	28	87,450	2,447,218	7,554,872	
H.ALSUS LANTAS																			
1.ROMPI LANTAS		186	186	50,000	9,300,000	214	57,500	12,299,250	246	66,125	16,265,758	283	76,044	21,511,465	325	87,450	28,448,913	87,825,386	
2.JAS HUJAN		115	115	50,000	5,750,000	132	57,500	7,604,375	152	66,125	10,056,786	175	76,044	13,300,099	201	87,450	17,589,381	54,300,642	
3.HELM LANTAS		77	77	50,000	3,850,000	89	57,500	5,091,625	102	66,125	6,733,674	117	76,044	8,905,284	135	87,450	11,777,238	36,357,821	
4.CAMERA DIGITAL		2	2	50,000	100,000	2	57,500	132,250	3	66,125	174,901	3	76,044	231,306	3	87,450	305,902	944,359	
5.TRAFIK CONE		20	20	50,000	1,000,000	23	57,500	1,322,500	26	66,125	1,749,006	30	76,044	2,313,061	35	87,450	3,059,023	9,443,590	
6.ALAT KLIPIENG		2	2	50,000	100,000	2	57,500	132,250	3	66,125	174,901	3	76,044	231,306	3	87,450	305,902	944,359	
6.SIMULATOR SIM R4/R2		11	11	50,000	550,000	13	57,500	727,375	15	66,125	961,953	17	76,044	1,272,183	19	87,450	1,682,463	5,193,974	
E ALINS / ALOGINS																			
1.TALI KAPAL	Btr	300	300	25,000	7,500,000	345	28,750	9,918,750	397	33,063	13,117,547	456	38,022	17,347,956	525	43,725	22,942,671	70,826,924	
2.TALI ELASTIS		300	300	25,000	7,500,000	345	28,750	9,918,750	397	33,063	13,117,547	456	38,022	17,347,956	525	43,725	22,942,671	70,826,924	
3.SARUNG TANGAN PANJAT		360	360	25,000	9,000,000	414	28,750	11,902,500	476	33,063	15,741,056	548	38,022	20,817,547	630	43,725	27,531,206	84,992,309	
4.HELM SAR	Btr	50	50	25,000	1,250,000	58	28,750	1,653,125	66	33,063	2,166,258	76	38,022	2,891,326	87	43,725	3,823,779	11,804,487	





NO.	JENIS MATERIIL	SAT		TARGET RENSTRA												TOTAL JUM	KET	
				TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
DATA AWAL		VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	BUT GAR	
C	FUNGSI LANTAS																0	
	1. TUTUP KEPALA																-	
	- Pet Lantas Pria	Stel	399	399	170,200	67,909,800	479	204,240	97,790,112	575	245,088	140,817,761	689	294,106	202,777,576	827	352,927	291999709.8
	- Pet Lantas Wanita	Stel	46	46	170,200	7,829,200	55	204,240	11,274,048	66	245,088	16,234,629	79	294,106	23,377,866	95	352,927	33664126.94
	- Pet Pria	Stel	399	399	170,200	67,909,800	479	204,240	97,790,112	575	245,088	140,817,761	689	294,106	202,777,576	827	352,927	291999709.8
	- Pet PDU Wanita	Stel	46	46	170,200	7,829,200	55	204,240	11,274,048	66	245,088	16,234,629	79	294,106	23,377,866	95	352,927	33664126.94
	- Topi Olahraga	Stel	445	445	57,500	25,587,500	534	69,000	36,846,000	641	82,800	53,058,240	769	99,360	76,403,866	923	119,232	110021566.5
	2. TUTUP BADAN																0	
	- PDL LANTAS PRIA/WANITA	Stel	445	445	600,000	267,000,000	534	720,000	384,480,000	641	864,000	553,651,200	769	1,036,800	797,257,728	923	1,244,160	1148051128
	- PDU PRIA	Stel	399	399	1,158,000	462,042,000	479	1,389,600	665,340,480	575	1,667,520	958,090,291	689	2,001,024	1,379,650,019	827	2,401,229	1986696028
	- PDU WANITA NON HIJAB	Stel	15	15	1,158,000	17,370,000	18	1,389,600	25,012,800	22	1,667,520	36,018,432	26	2,001,024	51,866,542	31	2,401,229	74687820.6
	- PDU WANITA HIJAB	Stel	31	31	1,158,000	35,998,000	37	1,389,600	51,693,120	45	1,667,520	74,438,093	54	2,001,024	107,190,854	64	2,401,229	154354829.2
	- Pakaian Olahraga	Stel	445	445	250,000	111,250,000	534	300,000	160,200,000	641	360,000	230,688,000	769	432,000	332,190,720	923	518,400	478354636.8
	- T' Shirt	Stel	445	445	77,000	34,265,000	534	92,400	49,341,600	641	110,880	71,051,904	769	133,056	102,314,742	923	159,667	147333228.1
	3. TUTUP KAKI																-	
	- Sepatu Angkelboot wanita	Stel	46	46	322,000	14,812,000	55	386,400	21,252,000	66	463,680	30,602,880	79.2	556,416	44,068,147	95	667,699,20	63,458,131,97
	- Sepatu PDH Pria	Stel	399	399	600,000	239,400,000	478	720,000	344,160,000	573.6	864,000	495,590,400	688.32	1,036,800	713,650,176	826	1,244,160,00	1,027,656,253,44
	- Sepatu PDH Wanita	Stel	46	46	253,000	11,638,000	55	303,600	16,698,000	66	364,320	24,045,120	79.2	437,184	34,624,973	95	524,620,80	49,859,960,83
	- Sepatu Olahraga	Stel	445	445	300,000	133,500,000	534	360,000	192,240,000	640.8	432,000	276,825,600	768.96	518,400	398,628,864	923	622,080,00	574,025,564,16
	- Sepatu Tunggang Walmor	Stel	399	399	900,000	359,100,000	478	1,080,000	516,240,000	573.6	1,296,000	743,385,600	688.32	1,555,200	1,070,475,264	826	1,866,240,00	1,541,484,380,16
	- Kaos Kaki PDH	Stel	445	445	22,500	10,012,500	534	27,000	14,418,000	640.8	32,400	20,761,920	768.96	38,880	29,897,165	923	46,656,00	43,051,917,31
	- Kaos Kaki PDL	Stel	445	445	30,000	13,350,000	534	36,000	19,224,000	640.8	43,200	27,682,560	768.96	51,840	39,862,886	923	62,208,00	57,402,556,42
	- Kaos Kaki Olahraga	Stel	445	445	22,500	10,012,500	534	27,000	14,418,000	640.8	32,400	20,761,920	768.96	38,880	29,897,165	923	46,656,00	43,051,917,31
D	FUNGSI BRIMOB																-	
	1. TUTUP KEPALA																-	
	- Pet Pria	Stel	683	683	170,200	116,246,600	819	204,240	167,272,560	982.8	245,088	240,872,486	1179.36	294,106	346,856,380	1415	352,926,72	499,473,187,80
	- Pet PDU Wanita	Stel	4	4	170,200	680,800	4	204,240	816,960	4.8	245,088	1,176,422	5.76	294,106	1,694,048	7	352,926,72	2,439,429,49
	- Baret + Emblem	Stel	687	687	120,000	82,440,000	824	144,000	118,656,000	988.8	172,800	170,864,640	1186.56	207,360	246,045,082	1424	248,832,00	354,304,917,50
	- Topi Olahraga	Stel	687	687	57,500	39,502,500	824	69,000	56,856,000	988.8	82,800	81,872,640	1186.56	99,360	117,896,602	1424	119,232,00	169,771,106,30
	2. TUTUP BADAN																-	
	- PDL Brimob Pria/Wanita	Stel	687	687	600,000	412,200,000	824	720,000	593,280,000	988.8	864,000	854,323,200	1186.56	1,036,800	1,230,225,408	1424	1,244,160,00	1,771,524,587,52
	- PDU Pria	Stel	683	683	1,158,000	790,914,000	819	1,389,600	1,138,082,400	988.8	1,667,520	1,638,838,656	1179.36	2,001,024	2,359,927,665	1415	2,401,228,80	3,398,295,837,08
	- PDU Wanita Hijab	Stel	4	4	1,158,000	4,632,000	4	1,389,600	5,558,400	4.8	1,667,520	8,004,096	5.76	2,001,024	11,525,898	7	2,401,228,80	16,597,293,47
	- PDU Wanita Non Hijab	Stel	0	0	1,158,000	-	0	1,389,600	-	0	1,667,520	-	0	2,001,024	-	0	2,401,228,80	-
	- Pakaian Olahraga	Stel	687	687	250,000	171,750,000	824	300,000	247,200,000	988.8	360,000	355,968,000	1186.56	432,000	512,593,920	1424	518,400,00	738,135,244,80
	- T Shirt	Stel	687	687	77,000	52,899,000	824	92,400	76,137,600	988.8	110,880	109,638,144	1186.56	133,056	157,878,927	1424	159,667,20	227,345,655,40
	3. TUTUP KAKI																-	
	- Sepatu PDL Pria/Wanita	Psng	687	687	700,000	480,900,000	824	840,000	692,160,000	988.8	1,008,000	996,710,400	1186.56	1,209,600	1,435,262,976	1424	1,451,520,00	2,066,778,685,44
	- Sepatu PDH Pria	Psng	683	683	600,000	409,800,000	824	720,000	593,280,000	988.8	864,000	854,323,200	1186.56	1,036,800	1,230,225,408	1424	1,244,160,00	1,771,524,587,52
	- Sepatu PDH Wanita	Psng	4	4	253,000	1,012,000	4	303,600	1,214,400	4.8	364,320	1,748,736	5.76	437,184	2,518,180	7	524,620,80	3,626,178,97
	- Sepatu Olahraga	Psng	687	687	300,000	206,100,000	824	360,000	296,640,000	988.8	432,000	427,161,600	1186.56	518,400	615,112,704	1424	622,080,00	885,762,293,76
	- Kaos Kaki PDH	Psng	687	687	22,500	15,457,500	824	27,000	22,248,000	988.8	32,400	32,037,120	1186.56	38,880	46,133,453	1424	46,656,00	66,432,172,03
	- Kaos Kaki PDL	Psng	687	687	30,000	20,610,000	824	36,000	29,664,000	988.8	43,200	42,716,160	1186.56	51,840	61,511,270	1424	62,208,00	88,576,229,38
	- Kaos Kaki Olahraga	Psng	687	687	22,500	15,457,500	824	27,000	22,248,000	988.8	32,400	32,037,120	1186.56	38,880	46,133,453	1424	46,656,00	66,432,172,03
E	FUNGSI POLAIR																	
	1. TUTUP KEPALA																	
	- Pet Pria	Stel	163	163	170,200	27,742,600	195	204,240	39,826,800	234	245,088	57,350,592	280.80	294,106	82,584,852	337	352,926,72	118,922,188
	- Pet PDU Wanita	Stel	-	-	170,200	-	-	204,240	-	-	245,088	-	-	294,106	-	352,926,72	-	
	- Baret + Emblem	Stel	163	163	120,000	19,560,000	195	144,000	28,080,000	234	172,800	40,435,200	280.80	207,360	58,226,688	337	248,832,00	83,846,431
	- Topi Olahraga	Stel	163	163	57,500	9,372,500	195	69,000	13,455,000	234	82,800	19,375,200	280.80	99,360	27,900,288	337	119,232,00	40,176,415

NO.	JENIS MATERIIL	SAT	TARGET RENSTRA															TOTAL JUM	KET
			DATA AWAL			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			BUT GAR	
			VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR		
	2. TUTUP BADAN					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- PDL Polair Pria/Wanita	Stel	163	163	600,000	97,800,000	195	720,000	140,400,000	234	864,000	202,176,000	280,80	1,036,800	291,133,440	337	1,244,160,00	419,232,154	1,150,741,594
	- PDU Pria	Stel	163	163	1,158,000	188,754,000	195	1,389,600	270,972,000	234	1,667,520	390,199,680	280,80	2,001,024	561,887,539	337	2,401,228,80	809,118,056	2,220,931,276
	- PDU Wanita Hijab	Stel	0	0	1,158,000	-	-	1,389,600	-	-	1,667,520	-	-	2,001,024	-	-	2,401,228,80	-	-
	- PDU Wanita Non Hijab	Stel	0	0	1,158,000	-	-	1,389,600	-	-	1,667,520	-	-	2,001,024	-	-	2,401,228,80	-	-
	- Pakaian Olahraga	Stel	163	163	250,000	40,750,000	195	300,000	58,500,000	234	360,000	84,240,000	280,80	432,000	121,305,600	337	518,400,00	174,680,064	479,475,664
	- T' Shirt	Stel	163	163	77,000	12,551,000	195	92,400	18,018,000	234	110,880	25,945,920	280,80	133,056	37,362,125	337	159,667,20	53,801,460	147,678,505
	3. TUTUP KAKI					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Sepatu PDL Pria/Wanita	Psgn	163	163	700,000	114,100,000	195	840,000	163,800,000	234	1,008,000	235,872,000	280,80	1,209,600	339,655,680	337	1,451,520,00	489,104,179	1,342,531,859
	- Sepatu PDH Pria	Psgn	163	163	600,000	97,800,000	195	720,000	140,400,000	234	864,000	202,176,000	280,80	1,036,800	291,133,440	337	1,244,160,00	419,232,154	1,150,741,594
	- Sepatu PDH Wanita	Psgn	0	0	253,000	-	-	303,600	-	-	364,320	-	-	437,184	-	-	524,620,80	-	-
	- Sepatu Olahraga	Psgn	163	163	300,000	48,900,000	195	360,000	70,200,000	234	432,000	101,088,000	280,80	518,400	145,566,720	337	622,080,00	209,616,077	575,370,797
	- Kaos Kaki PDH	Psgn	163	163	22,500	3,667,500	195	27,000	5,265,000	234	32,400	7,581,600	280,80	38,880	10,917,504	337	46,656,00	15,721,206	43,152,810
	- Kaos Kaki PDL	Psgn	16	16	30,000	48,000,000	19	36,000	684,000	23	43,200	984,960	27,36	51,840	1,418,342	33	62,208,00	2,042,413	5,609,715
	- Kaos Kaki Olahraga	Psgn	16	16	22,500	360,000	19	27,000	513,000	23	32,400	738,720	27,36	38,880	1,063,757	33	46,656,00	1,531,810	4,207,287
F	<b>FUNGSI PROVOS</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1. TUTUP KEPALA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pet Pria	Stel	193	193	170,200	32,848,600	231	204,240	47,179,440	277	245,088	67,938,394	332,64	294,106	97,831,287	399	352,926,72	140,877,053	386,674,773
	- Pet PDU Wanita	Stel	4	4	170,200	680,800	4	204,240	816,960	5	245,088	1,176,422	5,76	294,106	1,694,048	7	352,926,72	2,439,429	6,807,660
	- Baret + Emblem	Stel	197	197	120,000	23,640,000	236	144,000	33,984,000	283	172,800	48,936,960	339,84	207,360	70,469,222	408	248,832,00	101,475,680	278,505,863
	- Topi Olahraga	Stel	197	197	57,500	11,327,500	236	69,000	16,284,000	283	82,800	23,448,960	339,84	99,360	33,766,502	408	119,232,00	48,623,763	133,450,726
	2. TUTUP BADAN					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- PDL Provos Pria/Wanita	Stel	197	197	600,000	118,200,000	236	720,000	170,208,000	284	864,000	245,099,520	340	1,036,800	352,943,309	408	1,244,160	508,238,365	1,394,689,193
	- PDU Pria	Stel	193	193	1,158,000	223,494,000	232	1,389,600	321,831,360	278	1,667,520	463,437,158	334	2,001,024	667,349,508	400	2,401,229	960,983,292	2,637,095,318
	- PDU Wanita Hijab	Stel	3	3	1,158,000	3,474,000	4	1,389,600	5,002,560	4	1,667,520	7,203,686	5	2,001,024	103,7308	6	2,401,229	14,937,564	40,991,119
	- PDU Wanita Non Hijab	Stel	1	1	1,158,000	1,158,000	1	1,389,600	1,667,520	1	1,667,520	2,401,229	2	2,001,024	34,577,696	2	2,401,229	4,979,188	13,663,706
	- Pakaian Olahraga	Stel	197	197	250,000	49,250,000	236	300,000	70,920,000	284	360,000	102,124,800	340	432,000	147,059,712	408	518,400	211,765,985	581,120,497
	- T' Shirt	Stel	197	197	77,000	15,169,000	236	92,400	21,843,360	284	110,880	31,454,438	340	133,056	452,943,91	408	159,667	65,223,923	178,985,113
	3. TUTUP KAKI					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
	- Sepatu PDL provos Pria/Wanita	Psgn	197	197	700,000	137,900,000	236	840,000	198,576,000	284	1,008,000	285,949,440	340	1,209,600	411,767,194	408	1,451,520	592,944,759	1,627,137,392
	- Sepatu PDH Pria	Psgn	193	193	600,000	115,800,000	232	720,000	166,752,000	278	864,000	240,122,880	334	1,036,800	345,776,947	400	1,244,160	497,918,804	1,366,370,631
	- Sepatu PDH Wanita	Psgn	4	4	253,000	1,012,000	5	303,600	1,457,280	6	364,320	2,098,483	7	437,184	302,1816	8	524,621	4,351,415	11,940,994
	- Sepatu Olahraga	Psgn	197	197	300,000	59,100,000	236	360,000	85,104,000	284	432,000	122,549,760	340	518,400	176,471654	408	622,080	254,119,182	697,344,597
	- Kaos Kaki PDH	Psgn	197	197	22,500	4,432,500	236	27,000	6,382,800	284	32,400	9,191,232	340	38,880	132,35374	408	46,656	19,058,939	52,300,845
	- Kaos Kaki PDL	Psgn	197	197	30,000	5,910,000	236	36,000	8,510,400	284	43,200	12,254,976	340	51,840	176,47165	408	62,208	25,411,918	69,734,460
	- Kaos Kaki Olahraga	Psgn	197	197	22,500	4,432,500	236	27,000	6,382,800	284	32,400	9,191,232	340	38,880	132,35374	408	46,656	19,058,939	52,300,845
G	<b>FUNGSI PAMINAL</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	1. TUTUP KEPALA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
	- Pet Pria	Stel	36	36	170,200	6,127,200	43	204,240	8,823,168	52	245,088	12,705,362	62	294,106	182,957,21	75	352,927	26,345,838	72,297,290
	- Pet PDU Wanita	Stel	3	3	170,200	510,600	4	204,240	735,264	4	245,088	1,058,780	5	294,106	152,4643	6	352,927	2,195,487	6,024,774
	- Topi Olahraga	Stel	39	39	57,500	2,242,500	47	69,000	3,229,200	56	82,800	4,650,048	67	99,360	669,609	81	119,232	9,642,340	26,460,157
	2. TUTUP BADAN					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	- Pakaian paminal Pria	Stel	36	36	215,000	7,740,000	43	258,000	11,145,600	52	309,600	16,049,664	62	371,520	231,11516	75	445,824	33,280,583	91,327,363
	- Pakaian paminal wanita	Stel	3	3	215,000	645,000	4	258,000	928,800	4	309,600	1,337,472	5	371,520	192,5960	6	445,824	2,773,382	7,610,614
	- PDU Pria	Stel	36	36	1,158,000	41,688,000	43	1,389,600	60,030,720	52	1,667,520	86,444,237	62	2,001,024	124,479,701	75	2,401,229	179,250,769	491,893,427
	- PDU Wanita Hijab	Stel	3	3	1,158,000	3,474,000	4	1,389,600	5,002,560	4	1,667,520	7,203,686	5	2,001,024	103,7308	6	2,401,229	14,937,564	40,991,119
	- PDU Wanita Non Hijab	Stel	0	0	1,158,000	-	-	1,389,600	-	-	1,667,520	-	-	2,001,024	0	-	2,401,229	-	-
	- Pakaian Olahraga	Stel	39	39	250,000	9,750,000	47	300,000	14,040,000	56	360,000	20,217,600	67	432,000	291,13344	81	518,400	41,923,215	115,044,159
	- T' Shirt	Stel	39	39	77,000	3,003,000	47	92,400	4,324,320	56	110,880	6,227,021	67	133,056	896,6910	81	159,667	12,912,350	35,433,601

NO.	JENIS MATERIIL	SAT		TARGET RENSTRA												TOTAL JUM	KET			
				DATA AWAL			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TOTAL JUM	KET
				VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR		
	3. TUTUP KAKI																			
- Sepatu Preman Pria	Psgn	36	36	415,000	14,940,000	43	498,000	21,513,600	52	597,600	30,979,584	62	717,120	44,610,601	75	860,544	64,239,265	176,283,050		
- Sepatu Preman Wanita	Psgn	3	3	345,000	1,035,000	4	414,000	1,490,400	4	496,800	2,146,176	5	596,160	3,090,493	6	715,392	4,450,311	12,212,380		
- Sepatu PDH Pria	Psgn	36	36	600,000	21,600,000	43	720,000	31,104,000	52	864,000	44,789,760	62	1,036,800	64,497,254	75	1,244,160	92,876,046	254,867,061		
- Sepatu PDH Wanita	Psgn	3	3	253,000	759,000	4	303,600	1,092,960	4	364,320	1,573,862	5	437,184	2,266,362	6	524,621	3,263,561	8,955,745		
- Sepatu Olahraga	Psgn	39	39	300,000	11,700,000	47	360,000	16,848,000	56	432,000	24,261,120	67	518,400	34,936,013	81	622,080	50,307,858	138,052,991		
- Kaos Kaki PDH	Psgn	39	39	22,500	877,500	47	27,000	1,263,600	56	32,400	1,819,584	67	38,880	2,620,201	81	46,656	3,773,089	10,353,974		
- Kaos Kaki PDL	Psgn	39	39	30,000	1,170,000	47	36,000	1,684,800	56	43,200	2,426,112	67	51,840	3,493,601	81	62,208	5,030,786	13,805,299		
- Kaos Kaki Olahraga	Psgn	39	39	22,500	877,500	47	27,000	1,263,600	56	32,400	1,819,584	67	38,880	2,620,201	81	46,656	3,773,089	10,353,974		
<b>H FUNGSI INTELKAM</b>																				
<b>1. TUTUP KEPALA</b>																				
- Pet Pria	Stel	548	548	170200	93,269,600	658	204,240	134,308,224	789	245,088	193,403,843	947	294,106	278,501,533	1,136	352,927	401,042,208	1,100,525,408		
- Pet PDU Wanita	Stel	27	27	170200	4,595,400	32	204,240	6,617,376	39	245,088	9,529,021	47	294,106	13,721,791	56	352,927	19,759,379	54,222,967		
- Topi Olahraga	Stel	575	575	57500	33,062,500	690	69,000	47,610,000	828	82,800	68,558,400	994	99,360	98,724,096	1,192	119,232	142,162,698	390,117,694		
<b>2. TUTUP BADAN</b>																				
- Pakaian Preman Pria	Stel	548	548	215,000	117,820,000	658	258,000	169,660,800	789	309,600	244,311,552	947	371,520	351,808,635	1,136	445,824	506,604,434	1,390,205,421		
- Pakaian Preman wanita	Stel	27	27	215,000	5,805,000	32	258,000	8,359,200	39	309,600	12,037,248	47	371,520	17,333,637	56	445,824	24,960,437	68,495,523		
- PDU Pria	Stel	548	548	1,158,000	634,584,000	658	1,389,600	913,800,960	789	1,667,520	1,315,873,382	947	2,001,024	1,894,857,671	1,136	2,401,229	2,728,595,046	7,487,711,059		
- PDU Wanita Hijab	Stel	19	19	1,158,000	22,002,000	23	1,389,600	31,682,880	27	1,667,520	45,623,347	33	2,001,024	65,697,620	39	2,401,229	94,604,573	256,610,420		
- PDU Wanita Non Hijab	Stel	8	8	1,158,000	9,264,000	10	1,389,600	13,340,160	12	1,667,520	19,209,830	14	2,001,024	27,662,156	17	2,401,229	39,833,504	109,309,650		
- Pakaian Olahraga	Stel	575	575	250,000	143,750,000	690	300,000	207,000,000	828	360,000	298,080,000	994	432,000	429,235,200	1,192	518,400	618,098,688	1,696,163,888		
- T' Shirt	Stel	575	575	77,000	44,275,000	690	92,400	63,756,000	828	110,880	91,808,640	994	133,056	132,204,442	1,192	159,667	190,374,396	522,418,478		
<b>3. TUTUP KAKI</b>																				
- Sepatu Preman Pria	Psgn	548	548	415,000	227,420,000	658	498,000	327,484,800	789	597,600	471,578,112	947	717,120	679,072,481	1,136	860,544	977,864,373	2,683,419,766		
- Sepatu Preman Wanita	Psgn	27	27	345,000	9,315,000	32	414,000	13,413,600	39	496,800	19,315,584	47	596,160	27,814,441	56	715,392	40,052,795	109,911,420		
- Sepatu PDH Pria	Psgn	548	548	600,000	328,800,000	658	720,000	473,472,000	789	864,000	681,799,680	947	1,036,800	981,791,539	1,136	1,244,160	1,413,779,816	3,879,643,036		
- Sepatu PDH Wanita	Psgn	27	27	253,000	6,831,000	32	303,600	9,836,640	39	364,320	14,164,762	47	437,184	20,397,257	56	524,621	29,372,050	80,601,708		
- Sepatu Olahraga	Psgn	575	575	300,000	172,500,000	690	360,000	248,400,000	828	432,000	357,696,000	994	518,400	515,082,240	1,192	622,080	741,718,426	2,035,396,666		
- Kaos Kaki PDH	Psgn	575	575	22,500	12,937,500	690	27,000	18,630,000	828	32,400	26,827,200	994	38,880	38,631,168	1,192	46,656	55,628,882	152,654,750		
- Kaos Kaki PDL	Psgn	575	575	30,000	17,250,000	690	36,000	24,840,000	828	43,200	35,769,600	994	51,840	51,508,224	1,192	62,208	74,171,843	203,539,667		
- Kaos Kaki Olahraga	Psgn	575	575	22,500	12,937,500	690	27,000	18,630,000	828	32,400	26,827,200	994	38,880	38,631,168	1,192	46,656	55,628,882	152,654,750		
<b>I FUNGSI RES, NARKOBA, TAHTI</b>																				
<b>1. TUTUP KEPALA</b>																				
- Pet Pria	Stel	911	911	170,200	155,052,200	1,093	204,240	223,275,168	1,312	245,088	321,516,242	1,574	294,105,60	462,983,388	1,889	352,926,72	666,696,079	1,829,523,078		
- Pet PDU Wanita	Stel	84	84	170,200	14,296,800	101	204,240	20,587,392	121	245,088	29,645,844	145	294,105,60	42,690,016	174	352,926,72	61,473,623	168,693,676		
- Topi Olahraga	Stel	995	995	57,500	57,212,500	1,194	69,000	82,386,000	1,433	82,800	118,635,840	1,719	99,360,00	170,835,610	2,063	119,232,00	246,003,278	675,073,227		
<b>2. TUTUP BADAN</b>																				
- Pakaian Preman Pria	Stel	911	911	215,000	195,865,000	1,093	258,000	282,045,600	1,312	309,600	406,145,664	1,574	371,520,00	584,849,756	1,889	445,824,00	842,183,649	2,311,089,669		
- Pakaian Preman wanita	Stel	84	84	215,000	18,060,000	101	258,000	26,006,400	121	309,600	37,449,216	145	371,520,00	53,926,871	174	445,824,00	77,654,694	213,097,181		
- PDU Pria	Stel	911	911	1,158,000	1,054,938,000	1,093	1,389,600	1,519,110,720	1,312	1,667,520	2,187,519,437	1,574	2,001,024,00	3,150,027,989	1,889	2,401,228,80	4,536,040,304	12,447,636,450		
- PDU Wanita Hijab	Stel	72	72	1,158,000	83,376,000	86	1,389,600	120,061,440	104	1,667,520	172,888,474	124	2,001,024,00	248,959,402	149	2,401,228,80	358,501,539	983,786,854		
- PDU Wanita Non Hijab	Stel	11	11	1,158,000	12,738,000	13	1,389,600	18,342,720	16	1,667,520	26,413,517	19	2,001,024,00	38,035,464	23	2,401,228,80	54,771,068	150,300,769		
- Pakaian Olahraga	Stel	995	995	250,000	248,750,000	1,194	300,000	358,200,000	1,433	360,000	515,808,000	1,719	432,000,00	742,763,520	2,063	518,400,00	1,069,579,469	2,935,100,989		
- T' Shirt	Stel	995	995	77,000	76,615,000	1,194	92,400	110,325,600	1,433	110,880	158,868,864	1,719	133,056,00	228,771,164	2,063	159,667,20	329,430,476	904,011,105		
<b>3. TUTUP KAKI</b>																				
- Sepatu Preman Pria	Psgn	911	911	415,000	378,065,000	1,093	498,000	544,413,600	1,312	597,600	783,955,584	1,574	717,120,00	1,128,896,041	1,889	860,544,00	1,625,610,299	4,460,940,524		
- Sepatu Preman Wanita	Psgn	84	84	345,000	28,980,000	101	414,000	41,731,200	121	496,800	60,092,928	145	596,160,00	86,533,816	174	715,392,00	124,608,696	341,946,640		

NO.	JENIS MATERIIL	SAT		TARGET RENSTRA												TOTAL JUM	KET		
			DATA AWAL	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			
			VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	BUT GAR	
- Sepatu PDH Pria	Psgn	911	911	600,000	546,600,000	1,093	720,000	787,104,000	1,312	864,000	1,133,429,760	1,574	1,036,800,00	1,632,138,854	1,889	1,244,160,00	2,350,279,950	6,449,552,565	
- Sepatu PDH Wanita	Psgn	84	84	253,000	21,252,000	101	303,600	30,602,880	121	364,320	44,068,147	145	437,184,00	63,458,132	174	524,620,80	91,379,710	250,760,869	
- Sepatu Olahraga	Psgn	995	995	300,000	298,500,000	1,194	360,000	429,840,000	1,433	432,000	618,969,600	1,719	518,400,00	891,316,224	2,063	622,080,00	1,283,495,363	3,522,121,187	
- Kaos Kaki PDH	Psgn	995	995	22,500	22,387,500	1,194	27,000	32,238,000	1,433	32,400	46,422,720	1,719	38,880,00	66,848,717	2,063	46,656,00	96,262,152	264,159,089	
- Kaos Kaki PDL	Psgn	995	995	30,000	29,850,000	1,194	36,000	42,984,000	1,433	43,200	61,896,960	1,719	51,840,00	89,131,622	2,063	62,208,00	128,349,536	352,212,119	
- Kaos Kaki Olahraga	Psgn	995	995	22,500	22,387,500	1,194	27,000	32,238,000	1,433	32,400	46,422,720	1,719	38,880,00	66,848,717	2,063	46,656,00	96,262,152	264,159,089	
<b>J PAM OBVIT</b>																			
<b>1. TUTUP KEPALA</b>																			
- Pet Pria	Stel	112	112	170,200	19,062,400	134	204,240	27,449,856	161	245,088	39,527,793	194	294,105,60	56,920,021	232	352,926,72	81,964,831	224,924,901	
- Pet PDU Wanita	Stel	3	3	170,200	510,600	4	204,240	735,264	4	245,088	1,058,780	5	294,105,60	1,524,643	6	352,926,72	2,195,487	6,024,774	
- Topi Olahraga	Stel	115	115	57,500	6,612,500	138	69,000	9,522,000	166	82,800	13,711,680	199	99,360,00	19,744,819	238	119,232,00	28,432,540	78,023,539	
<b>2. TUTUP BADAN</b>																			
- PDU Pam Obvit Pria	Stel	112	112	600,000	67,200,000	134	720,000	96,768,000	161	864,000	139,345,920	194	1,036,800	200,658,125	232	1,244,160	288,947,700	792,919,745	
- PDU Pam Obvit wanita	Stel	3	3	600,000	1,800,000	4	720,000	2,592,000	4	864,000	3,732,480	5	1,036,800	5,374,771	6	1,244,160	7,739,671	21,238,922	
- PDU Pria	Stel	112	112	1,158,000	129,696,000	134	1,389,600	186,762,240	161	1,667,520	268,937,626	194	2,001,024	387,270,181	232	2,401,229	557,669,060	1,530,335,107	
- PDU Wanita Hijab	Stel	3	3	1,158,000	3,474,000	4	1,389,600	5,002,560	4	1,667,520	7,203,686	5	2,001,024	10,373,308	6	2,401,229	14,937,564	40,991,119	
- PDU Wanita Non Hijab	Stel	-	-	1,158,000	-	-	1,389,600	-	-	1,667,520	-	-	2,001,024	-	-	2,401,229	-	-	
- Pakaian Olahraga	Stel	115	115	250,000	28,750,000	138	300,000	41,400,000	166	360,000	59,616,000	199	432,000	85,847,040	238	518,400	123,619,738	339,232,778	
- T' Shirt	Stel	115	115	77,000	8,855,000	138	92,400	12,751,200	166	110,880	18,361,728	199	133,056	26,440,888	238	159,667	38,074,879	104,483,696	
<b>3. TUTUP KAKI</b>																			
- Sepatu PDL Pam Obvit Pria	Psgn	112	112	700,000	78,400,000	134	840,000	112,896,000	161	1,008,000	162,570,240	194	1,209,600	234,101,146	232	1,451,520	337,105,650	925,073,035	
- Sepatu PDL Pam Obvit Wanita	Psgn	3	3	700,000	2,100,000	4	840,000	3,024,000	4	1,008,000	4,354,560	5	1,209,600	6,270,566	6	1,451,520	9,029,616	24,778,742	
- Sepatu PDH Pria	Psgn	112	112	600,000	67,200,000	134	720,000	96,768,000	161	864,000	139,345,920	194	1,036,800	200,658,125	232	1,244,160	288,947,700	792,919,745	
- Sepatu PDH Wanita	Psgn	3	3	253,000	759,000	4	303,600	1,092,960	4	364,320	1,571,362	5	437,184	2,266,362	6	524,621	3,263,561	8,955,745	
- Sepatu Olahraga	Psgn	115	115	300,000	34,500,000	138	360,000	49,680,000	166	432,000	71,539,200	199	518,400	103,016,448	238	622,080	148,343,685	407,079,333	
- Kaos Kaki PDH	Psgn	115	115	22,500	2,587,500	138	27,000	3,726,000	166	32,400	5,365,440	199	38,880	7,726,234	238	46,656	11,125,776	30,530,950	
- Kaos Kaki PDL	Psgn	115	115	30,000	3,450,000	138	36,000	4,968,000	166	43,200	7,153,920	199	51,840	10,301,645	238	62,208	14,834,369	40,707,933	
- Kaos Kaki Olahraga	Psgn	115	115	22,500	2,587,500	138	27,000	3,726,000	166	32,400	5,365,440	199	38,880	7,726,234	238	46,656	11,125,776	30,530,950	
<b>K PNS</b>																			
<b>1. TUTUP KEPALA</b>																			
- Pet Pria	Stel	71	71	170,200	12,084,200	85	204,240	17,401,248	102	245,088	25,057,797	123	294,106	36,083,228	147	352,927	51,959,848	142,586,321	
- Pet PDU Wanita	Stel	108	108	170,200	18,381,600	130	204,240	26,469,504	156	245,088	38,116,086	187	294,106	54,887,163	224	352,927	79,037,515	216,891,869	
- Topi Olahraga	Stel	179	179	57,500	10,292,500	215	69,000	14,821,200	258	82,800	21,342,528	309	99,360	30,733,240	371	119,232	44,255,866	121,445,334	
- Peci Hitam	Stel	179	179	57,000	10,203,000	215	68,400	14,692,320	258	82,080	21,156,941	309	98,496	30,465,995	371	118,195	43,871,032	120,389,288	
- Filcap :																			
1. Gol. II	Buah	94	94	50,000	4,700,000	113	60,000	6,768,000	135	72,000	9,745,920	162	86,400	14,034,125	195	103,680	20,209,140	55,457,185	
2. Gol. III	Buah	78	78	50,000	3,900,000	94	60,000	5,616,000	112	72,000	8,087,040	135	86,400	11,645,338	162	103,680	16,769,286	46,017,664	
3. Gol. IV	Buah	5	5	60,000	300,000	6	72,000	432,000	7	86,400	622,080	9	103,680	895,795	10	124,416	1,289,945	3,539,820	
<b>2. TUTUP BADAN</b>																			
- PDH Pria	Stel	71	71	426,000	30,246,000	85	511,200	43,554,240	102	613,440	62,718,106	123	736,128	90,314,072	147	883,353,60	130,052,264	356,884,681	
- PDH wanita	Stel	12	12	426,000	5,112,000	14	511,200	7,361,280	17	613,440	10,600,243	21	736,128	15,264,350	25	883,353,60	21,980,664	60,318,538	
- PDH Wanita Hijab	Stel	96	96	448,000	43,008,000	115	537,600	61,931,520	138	645,120	89,181,389	166	774,144	128,421,200	199	928,972,80	184,926,528	507,468,636	
- PDU Pria	Stel	71	71	1,158,000	82,218,000	85	1,389,600	118,393,920	102	1,667,520	170,487,245	123	2,001,024	245,501,633	147	2,401,228,80	353,522,351	970,123,148	
- PDU Wanita Non Hijab	Stel	12	12	1,158,000	13,896,000	14	1,389,600	20,010,240	17	1,667,520	28,814,746	21	2,001,024	41,493,234	25	2,401,228,80	59,750,256	163,964,476	
- PDU Wanita Hijab	Stel	96	96	1,158,000	111,168,000	115	1,389,600	160,081,920	138	1,667,520	230,517,965	166	2,001,024	331,945,869	199	2,401,228,80	478,002,052	1,311,715,806	
- PDL Pria	Stel	71	71	600,000	42,600,000	85	720,000	61,344,000	102	864,000	88,335,360	123	1,036,800	127,202,918	147	1,244,160,00	183,172,202	502,654,481	
- PDL Wanita	Stel	108	108	600,000	64,800,000	130	720,000	93,312,000	156	864,000	134,369,280	187	1,036,800	193,491,763	224	1,244,160,00	278,628,139	764,601,182	

NO.	JENIS MATERIIL	SAT	DATA AWAL	TARGET RENSTRA												TOTAL JUM BUT GAR	KET		
				TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023						
				VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR	VOL	HARGA SAT	JML GAR				
	- Pakaian Batik Pria	Stel	71	71	400,000	28,400,000	85	480,000	40,896,000	102	576,000	58,890,240	123	691,200	84,801,946	147	829,440,00		
	- pakaian Batik Wanita Hijab	Stel	96	96	500,000	48,000,000	115	600,000	69,120,000	138	720,000	99,532,800	166	864,000	143,327,232	199	1,036,800,00		
	- Pakaian Batik Wanita non Hijab	Stel	12	12	400,000	4,800,000	14	480,000	6,912,000	17	576,000	9,953,280	21	691,200	14,332,723	25	829,440,00		
	- T" Shirt	Stel	179	179	77,000	13,783,000	215	92,400	19,847,520	258	110,880	28,580,429	309	133,056	41,155,817	371	159,667,20		
	- Pakaian Olahraga	Stel	179	179	250,000	44,750,000	215	300,000	64,440,000	258	360,000	92,793,600	309	432,000	133,622,784	371	518,400,00		
	<b>3. TUTUP KAKI</b>																		
	- Sepatu PDH Pria	Psng	71	71	400,000	28,400,000	85	480,000	40,896,000	102	576,000	58,890,240	123	691,200	84,801,946	147	829,440,00		
	- Sepatu PDH Wanita	Psng	108	108	253,000	27,324,000	130	303,600	39,346,560	156	364,320	56,659,046	187	437,184	81,589,027	224	524,620,80		
	- Sepatu PDL Wanita Angkelbot	Psng	108	108	322,000	34,776,000	130	386,400	50,077,440	156	463,680	72,111,514	187	556,416	103,840,580	224	667,699,20		
	- Sepatu Olahraga	Psng	179	179	300,000	53,700,000	215	360,000	77,328,000	258	432,000	111,352,320	309	518,400	160,347,341	371	622,080,00		
	- Kaos Kaki PDH	Psng	179	179	22,500	4,027,500	215	27,000	5,799,600	258	32,400	8,351,424	309	38,880	12,026,051	371	46,656,00		
	- Kaos Kaki PDL	Psng	179	179	30,000	5,370,000	215	36,000	7,732,800	258	43,200	11,135,232	309	51,840	16,034,734	371	62,208,00		
	- Kaos Kaki Olahraga	Psng	179	179	22,500	4,027,500	215	27,000	5,799,600	258	32,400	8,351,424	309	38,880	12,026,051	371	46,656,00		
<b>L</b>	<b>Kapor Lainnya</b>																		
	- Jas Hujan model baju celana	Stel	7,029	7,029	153,000	1,075,437,000	8,435	183,600	1,548,629,280	10,122	220,320	2,230,026,163	12,146	264,384	3,211,237,675	14,575	317,260,80		
	- Handuk mandi besar	Lbr	7,029	7,029	84,000	590,436,000	8,435	100,800	850,227,840	10,122	120,960	1,224,328,090	12,146	145,152	1,763,032,449	14,575	174,182,40		
	- Handuk Kecil (lapangan)	Lbr	7,029	7,029	31,000	217,899,000	8,435	37,200	313,774,560	10,122	44,640	451,835,366	12,146	53,568	650,642,928	14,575	64,281,60		
	- Ransel	Buah	6,850	6,850	324,000	2,219,400,000	8,220	388,800	3,195,936,000	9,864	466,560	4,602,147,840	11,837	559,872	6,627,092,890	14,204	671,846,40		
	- Koperriem Hitam	Utas	6,850	6,850	250,000	1,712,500,000	8,220	300,000	2,466,000,000	9,864	360,000	3,551,040,000	11,837	432,000	5,113,497,600	14,204	518,400,00		
	- Rompi Lantas	Lbr	445	445	216,000	96,120,000	534	259,200	138,412,800	641	311,040	199,314,432	769	373,248	287,012,782	923	447,897,60		

Kendari, 13 November 2019  
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULTRA  
 KARORENA

JOKO TUKONOTO, S.H., S.I.K.  
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050530

MATRIK RENBANGKUAT PERS DAN RENHARPUAN PERS POLDAL SULAWESI TENGGARA  
RENSTRA 2020-2024

NO	SATKER	DSP							RILL							TAHUN I RENSTRA (2020)							TAHUN I RENSTRA (2021)							TAHUN I RENSTRA (2022)							
		PA TI	PA MEN	PA MA	BA	PNS	FU NG	JML	PA TI	PA MEN	PA MA	BA	TA	PNS	JML	PA TI	PA MEN	PA MA	BA	TA	PNS	JML	PA TI	PA MEN	PA MA	BA	TA	PNS	JML	PA TI	PA MEN	PA MA	BA	TA	PNS	JML	
1	PIMPINAN	2						2	2						2	2							2												2		
2	SPRIPIM	2	10	6	9		27	1	2	16		3	22		1	2	16		3	22		1	2	16		3	22		1	2	16		3	22			
3	ITWASDA	9	25	4	15		53	10	6	13		5	34		9	6	13		5	33		8	6	13		5	32		8	6	13		5	32			
4	BIRO RENA	14	5	5	25		49	5	2	12		7	26		4	2	12		7	25		4	2	12		7	25		3	2	12		8	25			
5	BIRO OPS	13	10	18	22		63	10	3	26		5	44		10	5	27		5	47		9	5	27		6	47		5	5	27		6	43			
6	BIRO SDM	15	6	14	30		65	7	17	29		7	60		7	17	29		7	60		7	17	29		7	60		7	17	29		7	60			
7	BIRO LOG	17	6	15	33		71	5	3	21		9	38		4	3	21		9	37		3	3	21		8	35		3	3	21		8	35			
8	BIDHUMAS	11	11	12	24		58	3	3	18		4	28		3	3	19		4	29		3	3	19		4	29		2	2	19		4	27			
9	BIDKUM	10	2	2	25	5	44	2	3	8		2	15		2	3	8		2	15		2	3	8		2	15		2	3	8		3	16			
10	BIDPROPAM	14	44	50	20		128	4	9	50		2	65		4	9	50		2	65		4	9	50		2	65		4	9	50		2	65			
11	BID TIK	8	5	8	30		51	2	2	16		4	24		2	2	16		4	24		2	1	16		5	24		1	1	16		6	24			
12	BIDDKOKES	10	6	15	29	5	65	2	7	19	1	13	42		2	7	19	1	13	42		2	6	19	1	18	46		2	6	19	1	20	48			
13	RS BHAYANGKARA	18	79	34	24		155	1	3	13		24	41		1	3	14		24	42		1	3	14		31	49		1	3	14		33	51			
14	BIDKEU	8	5	7	17		37	2	2	8		5	17		2	2	8		5	17		2	2	8		6	18		2	2	8		7	19			
15	SETUM	1	1	1	20		23	1		6		7	14		0		6		7	13		1		6		7	14		1		6		7	14			
16	YANMA	4	6	72	33		115	2	11	45		4	62		2	11	45		4	62		2	11	45		4	62		2	10	45		4	61			
17	SPKT	5	6	12	14		37	2	3	11		1	17		2	3	11		1	17		1	3	11		1	16		1	3	11		1	16			
18	DITINTELKAM	39	39	160	25		263	14	16	92		1	123		14	16	92		1	123		10	16	97		1	124		10	14	97		1	122			
19	DITRESKRIMUM	35	59	99	24	4	221	13	15	77		3	108		12	15	77		3	107		9	15	78		3	105		9	13	78		3	103			
20	DITRESKRIMSUS	36	52	88	21	4	201	10	16	80		4	110		10	17	80		4	111		10	17	80		4	111		10	16	80		4	110			
21	DITRESPNARKOBA	25	34	78	17	4	158	9	10	48		4	71		7	10	48		4	69		5	10	10		4	29		5	9	10		4	28			
22	DITBINMAS	19	16	8	15		58	10	5	15		2	32		9	5	15		2	31		6	5	15		2	28		6	4	15		2	27			
23	DITSAMAPTA	12	42	386	16		456	7	14	192		1	214		6	15	172		1	194		6	25	348		1	380		6	32	438		2	478			
24	DITLANTAS	22	58	94	36		210	8	18	83		6	115		6	18	83		6	113		6	18	83		6	113		6	17	92		7	122			
25	DITPAMOBVIT	19	16	71	20		126	8	4	63		4	79		6	4	63		4	77		5	4	63		4	76		4	3	63		4	74			
26	DITTAHTI	5	18	41	13		77	1	4	15		1	21		1	4	15		1	21		1	4	15		1	21		1	2	15		1	19			
27	SPN	14	29	55	25	76	199	6	12	38		7	63		6	12	38		7	63		5	12	38		7	62		4	10	38		7	59			
28	DITPOLAIRUD	16	28	111	27		182	4	6	114	20	3	147		4	6	114	20	3	147		4	6	114	22	3	149		3	6	123	24	3	159			
29	SATBRIMOB	19	194	2210	76		2499	4	27	582	101	3	717		4	27	582	101	3	717		4	27	582	109	3	725		4	27	632	117	3	783			
30	PA / BA POLDA						0		4	7			11							0												0		0		0	
31	POLRES KENDARI	9	297	1030		60	1396	5	95	732		15	847		4	94	731		15	844		4	86	731		15	836		3	82	731		15	831			
32	POLRES BAU-BAU	5	243	902		59	1209	5	58	496		4	563		2	55	498		4	559		3	51	498		4	556		4	46	498		4	552			
33	POLRES KOLAKA	6	239	882		61	1188	4	66	480		5	555		4	63	480		5	552		4	58	480		5	547		3	51	480		5	539			
34	POLRES MUNA	5	259	959		56	1279	5	37	404		3	449		5	36	405		3	449		4	33	405		2	444		3	33	405		2	443			
35	POLRES KONAWE	5	203	797		50	1055	5	37	354		5	401		2	36	355		5	398		2	31	355		5	393		3	31	355		5	394			
36	POLRES BUTON	5	182	708		48	943	3	27	295		1	326		3	27	295		1	326		2	23	300		1	326		3	22	310		1	336			
37	POLRES KONSEL	5	224	897		54	1180	3	39	322		1	365		3	39	327		1	370		3	37	327		1	368		3	32	327		1	363			
38	POLRES BOMBANA	5	167	647		48	867	4	25	259		1	289		3	25	264		1	293		2	25	264		1	292		3	23	374		1	401			
39	POLRES KOLUT	5	145	583		42	775	4	18	253		1	276		4	18	258		1	281		4	17	294		1	316		3	20	294		1	318			
40	POLRES WAKATOBI	5	159	621		49	834	3	20	231			254		2	19	236			257		2	18	236			256		3	17	246			266			
41	POLRES KONUT	6	134	537		43	720	3	25	178		1	207		3	25	178		1	207		3	24	198		1	226		3	23	198		1	225			
42	POLRES BUTUR	6	139	550		45	740	4	18	182			204		4	18	182			204		4	18	202			224		4	17	202			223			
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>487</b>	<b>2930</b>	<b>12789</b>	<b>685</b>	<b>625</b>	<b>17879</b>	<b>2</b>	<b>201</b>	<b>692</b>	<b>5903</b>	<b>122</b>	<b>178</b>	<b>7098</b>	<b>2</b>	<b>179</b>	<b>682</b>	<b>5902</b>	<b>122</b>	<b>178</b>	<b>7065</b>	<b>2</b>	<b>160</b>	<b>656</b>	<b>6127</b>	<b>132</b>	<b>191</b>	<b>7268</b>	<b>2</b>	<b>151</b>	<b>624</b>	<b>6415</b>	<b>142</b>	<b>201</b>	<b>7535</b>	

NO	SATKER	DSP							RILL							TAHUN I RENSTRA (2023)							TAHUN I RENSTRA (2024)								
		PAT I	PA MEN	PA MA	BA	PNS	FUN G	JML	PA TI	PA MEN	PA MA	BA	TA	PNS	JML	PA TI	PA MEN	PA MA	BA	TA	PNS	JML	PA TI	PA MEN	PA MA	BA	TA	PNS	JML		
1	PIMPINAN	2						2	2						2	2						2	2						2		
2	SPRIPIM	2	10	6	9	27			1	2	16		3	22			1	2	16		3	22			1	2	16		3	22	
3	ITWASDA	9	25	4	15	53			10	6	13		5	34			7	6	13		5	31			5	8	13		5	31	
4	BIRO RENA	14	5	5	25	49			5	2	12		7	26			3	3	12		8	26			3	3	12		8	26	
5	BIRO OPS	13	10	18	22	63			10	3	26		5	44			4	6	27		6	43			5	5	27		6	43	
6	BIRO SDM	15	6	14	30	65			7	17	29		7	60			7	17	29		7	60			7	17	29		7	60	
7	BIRO LOG	17	6	15	33	71			5	3	21		9	38			2	3	21		8	34			3	3	21		7	34	
8	BIDHUMAS	11	11	12	24	58			3	3	18		4	28			1	3	19		4	27			2	3	19		4	28	
9	BIDKUM	10	2	2	25	5	44		2	3	8		2	15			2	3	8		3	16			2	3	8		3	16	
10	BIDPROPAM	14	44	50	20	128			4	9	50		2	65			4	9	50		2	65			2	8	50		2	62	
11	BID TIK	8	5	8	30	51			2	2	16		4	24			1	2	16		6	25			1	2	16		6	25	
12	BIDDOKKES	10	6	15	29	5	65		2	7	19	1	13	42			2	6	19	1	30	58			2	6	19	1	40	68	
13	RS BHAYANGKARA	18	79	34	24	155			1	3	13		24	41			1	3	14		45	63			1	2	14		50	67	
14	BIDKEU	8	5	7	17	37			2	2	8		5	17			2	2	7		7	18			1	3	8		7	19	
15	SETUM	1	1	1	20	23			1	6			7	14			1	6			7	14			1	6			6	13	
16	YANMA	4	6	72	33	115			2	11	45		4	62			2	9	45		4	60			1	10	45		4	60	
17	SPKT	5	6	12	14	37			2	3	11		1	17			0	2	11		1	14			1	2	11		1	15	
18	DITINTELKAM	39	39	160	25	263			14	16	92		1	123			8	14	97	1	120			9	14	97	1	121			
19	DITRESKRIMUM	35	59	99	24	4	221		13	15	77		3	108			7	13	78		3	101			9	13	78	3	103		
20	DITRESKRIMSUMSUS	36	52	88	21	4	201		10	16	80		4	110			10	16	80		4	110			9	15	80	4	108		
21	DITRESNARKOBA	25	34	78	17	4	158		9	10	48		4	71			2	8	10		4	24			4	9	10	4	27		
22	DITBINMAS	19	16	8	15	58			10	5	15		2	32			4	4	15		2	25			6	5	15	2	28		
23	DITSAMAPTA	12	42	386	16	456			7	14	192		1	214			5	33	478		2	518			4	30	498	2	534		
24	DITLANTAS	22	58	94	36	210			8	18	83		6	115			5	17	91		7	120			5	15	91	7	118		
25	DITPAMOBVIT	19	16	71	20	126			8	4	63		4	79			4	2	63		4	73			3	3	63	3	72		
26	DITTAHTI	5	18	41	13	77			1	4	15		1	21			1	3	15		1	20			1	3	15	1	20		
27	SPN	14	29	55	25	76	199		6	12	38		7	63			3	9	38		7	57			4	10	38		7	59	
28	DITPOLAIRUD	16	28	111	27	182			4	6	114	20	3	147			3	6	133	26	3	171			3	6	143	28	3	183	
29	SATBRIMOB	19	194	2210	76	2499			4	27	582	101	3	717			4	27	682	125	3	841			4	27	782	133	3	949	
30	PA / BA POLDA					0				4	7			11						0								0			
31	POLRES KENDARI	9	297	1030		60	1396		5	95	732		15	847			2	74	731		14	821			3	77	730		15	825	
32	POLRES BAU-BAU	5	243	902		59	1209		5	58	496		4	563			4	45	498		4	551			4	45	498	4	551		
33	POLRES KOLAKA	6	239	882		61	1188		4	66	480		5	555			3	47	480		5	535			3	48	480	5	536		
34	POLRES MUNA	5	259	959		56	1279		5	37	404		3	449			2	32	414		2	450			3	31	415	2	451		
35	POLRES KONAWE	5	203	797		50	1055		5	37	354		5	401			3	27	355		4	389			3	28	355	4	390		
36	POLRES BUTON	5	182	708		48	943		3	27	295		1	326			3	18	310		1	332			3	21	310	1	335		
37	POLRES KONSEL	5	224	897		54	1180		3	39	322		1	365			3	28	327	1	359			3	29	327	1	360			
38	POLRES BOMBANA	5	167	647		48	867		4	25	259		1	289			2	23	374		1	400			3	21	374	1	399		
39	POLRES KOLUT	5	145	583		42	775		4	18	253		1	276			2	20	314		1	337			3	20	324	1	348		
40	POLRES WAKATOB	5	159	621		49	834		3	20	231			254			3	8	256		267			3	10	266		279			
41	POLRES KONUT	6	134	537		43	720		3	25	178		1	207			3	23	208		1	235			3	22	218	1	244		
42	POLRES BUTUR	6	139	550		45	740		4	18	182			204			4	17	222		243			4	14	232		250			
JUMLAH		2	487	2930	12789	685	625	17879	2	201	692	5903	122	178	7098	2	130	590	6582	152	221	7677	2	137	593	6753	162	234	7881		

Kendari, 13 November 2019  
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULTRA  
 KARORENA

JOKO TUTUKONOTO, S.H., S.I.K.  
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050530

**MATRIK RENHARPUAN PERS POLDA SULAWESI TENGGARA**  
**RENSTRA 2020-2024**

NO	SATKER	TAHUN I RENSTRA (2020)						TAHUN I RENSTRA (2021)						TAHUN I RENSTRA (2022)						TAHUN I RENSTRA (2023)						TAHUN I RENSTRA (2024)										
		SES PIM MA	PTIK	SES MPI MME N	SES PATI	DIKLAT PIM PNS			SES PIM MA	PTIK	SES MPI MME N	SES PATI	DIKLAT PIM PNS			SES PIM MA	PTIK	SES MPI MME N	SES PATI	DIKLAT PIM PNS			SES PIM MA	PTIK	SES MPI MME N	SES PATI	DIKLAT PIM PNS									
						IV	III	II					IV	III	II					IV	III	II					IV	III	II							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	24	25	26	27	28	29	30
1	POLDA SULTRA	52	80	42	2	24	10	1	60	83	46	3	30	12	2	68	86	50	3	36	14	2	76	89	54	4	56	16	2	84	92	58	4	62	18	2

Kendari, 13 Nopember 2019  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULTRA  
KARORENA

JOKO TUTUKONOTO, S.H., S.I.K.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050530

MATRIKS PENGGUNAAN KEKUATAN PERSONEL POLDAM SULTRA DALAM OPERASI

NO	SANDI OPERASI	KEKUATAN YANG DILIBATKAN (TAHUN 2020)														KET	
		SPRIPIM	ROOPS	BRIMOB	SABHARA	OBVIT	RESKRIM	INTEL	LANTAS	KES	HUMAS	SATWA	TIK	POLAIRUD	BINMAS	PROVOS	
1	BINA KARUNA	3	11		5			2			2					24	2
2	KESELAMATAN	3	6		7			6	58		5						6
3	PEKAT	3	30		11		32	6			6	4	2			6	3
4	KETUPAT	3	4	15	15	6	22	7	46	6	3		3	11	8	4	
5	AMAN NUSA II	3	27	20	17		10	6		7	3		2	20	6	3	
6	PATUH	3	4					3	46		2						3
7	MANTAP PRAJA	3	30	320	130	20	150	60	75	15	12	6	12	60	25	35	
8	BINA KUSUMA	3	11		5			2			2					24	2
9	ZEBRA	3	6					3	46		2						3
10	SIKAT	3	22		11		32	6			6	4	2			6	3
11	LILIN	3	25	15	15	5	15	6	30	6	3	5	3	10	6	4	

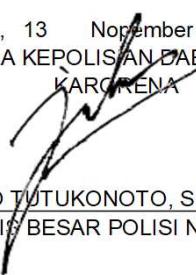
NO	SANDI OPERASI	KEKUATAN YANG DILIBATKAN (TAHUN 2021)														KET	
		SPRIPIM	ROOPS	BRIMOB	SABHARA	OBVIT	RESKRIM	INTEL	LANTAS	KES	HUMAS	SATWA	TIK	POLAIRUD	BINMAS	PROVOS	
1	BINA KARUNA	3	15		5		10	6			5					25	4
2	KESELAMATAN	3	10		7			7	50		5						5
3	PEKAT	3	25		15		32	10			6	6	3	10	7	6	
4	KETUPAT	3	25	20	15	6	22	10	50	10	6	6	3	15	10	6	
5	PATUH	3	10					7	50		5						5
6	MANTAP PRAJA	3	30	320	145	20	160	60	75	15	10	6	15	60	25	35	
7	BINA KUSUMA	3	15		5		10	6			5					25	4
8	ZEBRA	3	10					10	50		5						5
9	SIKAT	3	22		15		32	10			6	6	3	10	7	6	
10	LILIN	3	25	20	15	6	15	6	50	10	6	6	3	15	10	6	

NO	SANDI OPERASI	KEKUATAN YANG DILIBATKAN (TAHUN 2022)														KET	
		SPRIPIM	ROOPS	BRIMOB	SABHARA	OBVIT	RESKRIM	INTEL	LANTAS	KES	HUMAS	SATWA	TIK	POLAIRUD	BINMAS	PROVOS	
1	BINA KARUNA	3	15		5		10	6			5					25	4
2	KESELAMATAN	3	10		7			7	50		5						5
3	PEKAT	3	25		15		32	10			6	6	3	10	7	6	
4	KETUPAT	3	25	20	15	6	22	10	50	10	6	6	3	15	10	6	
5	PATUH	3	10					7	50		5						5
6	MANTAP PRAJA	3	30	320	145	20	160	65	75	15	10	6	15	65	25	35	
7	BINA KUSUMA	3	15		5		10	6			5					25	4
8	ZEBRA	3	10					10	50		5						5
9	SIKAT	3	25		15		32	10			6	6	3	10	7	6	
10	LILIN	3	25	20	15	6	15	6	50	10	6	6	3	15	10	6	

NO	SANDI OPERASI	KEKUATAN YANG DILIBATKAN (TAHUN 2023)														KET	
		SPRIPIM	ROOPS	BRIMOB	SABHARA	OBVIT	RESKRIM	INTEL	LANTAS	KES	HUMAS	SATWA	TIK	POLAIRUD	BINMAS	PROVOS	
1	BINA KARUNA	3	15		5		10	6			5					25	4
2	KESELAMATAN	3	10		7			7	50		5						5
3	PEKAT	3	25		15		32	10			6	6	3	10	7	6	
4	KETUPAT	3	25	20	15	6	22	10	50	10	6	6	3	20	10	6	
5	PATUH	3	10					7	50		5						5
6	MANTAP BRATA	3	30	320	145	20	170	65	75	15	10	6	15	65	25	35	
7	BINA KUSUMA	3	15		5		10	6			5					25	4
8	ZEBRA	3	10					10	50		5						5
9	SIKAT	3	25		15		32	10			6	6	3	10	7	6	
10	LILIN	3	25	20	15	6	20	6	50	10	6	6	3	20	10	6	

NO	SANDI OPERASI	KEKUATAN YANG DILIBATKAN (TAHUN 2024)														KET	
		SPRIPIM	ROOPS	BRIMOB	SABHARA	OBVIT	RESKRIM	INTEL	LANTAS	KES	HUMAS	SATWA	TIK	POLAIRUD	BINMAS	PROVOS	
1	BINA KARUNA	3	15		5		10	6			5				25	4	
2	KESELAMATAN	3	10		7			7	50		5					5	
3	PEKAT	3	25		15		32	10			6	6	3	10	7	6	
4	KETUPAT	3	25	20	15	6	22	10	50	10	6	6	3	25	10	6	
5	PATUH	3	10					7	50		5					5	
6	MANTAP PRAJA	3	30	320	145	20	160	65	75	15	10	6	15	65	25	35	
7	BINA KUSUMA	3	15		5		10	6			5				25	4	
8	ZEBRA	3	10					10	50		5					5	
9	SIKAT	3	25		15		32	10			6	6	3	10	7	6	
10	LILIN	3	25	20	15	6	20	6	50	10	6	6	3	25	10	6	

Kendari, 13 November 2019  
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULTRA  
 KARORENA

  
JOKO TUTUKONOTO, S.H., S.I.K.  
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050530